

Milik Departemen P dan K
Tidak diperdagangkan

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SULAWESI TENGAH



PROYEK PENELITIAN DAN PENCATATAN
KEBUDAYAAN DAERAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SEJARAH PENDIDIKAN DAERAH SULAWESI TENGAH



Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional
Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi
Kebudayaan Daerah
1981/1982

Penyunting

1. Sutrisno Kutoyo
2. Drs. S. Sumardi

DIREKTORAT KESENIAN SUB. DIREKTORAT PENGEMBANGAN APRESIASI DAN PRESTASI SENI SEKSI DOKUMENTASI	
Klas/Kode	No. Induk : 643/84
F 643 84	Tanggal : 4-8-84
	Paraf : ms

TIM PENULIS

1. **Dra. Ny. Nurhayati Nainggolan, Ketua**
2. **Daeng Patiro Laintagoa, BA. Sektetaris/Anggota**
3. **Dra. Ny. D. Borman Rumampuk, Anggota**
4. **Drs. R.E. Nainggolan, Anggota**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah Swt, karena perkenannya jualah maka naskah hasil Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah Sulawesi Tengah dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu yang direncanakan. Ini dapat dicapai berkat adanya kerja sama yang baik dengan berbagai pihak di daerah ini, terutama dengan pihak IKIP Ujung Pandang Cabang Palu, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tengah, dan bantuan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

Kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah ini adalah proyek Pelita dari Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Daftar Isian Proyek (DIP) Nomor 250/XXIII/3/1980 tanggal 12 Maret 1980, yang bertujuan meningkatkan Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah guna pengembangan dan ketahanan Nasional, dan menyediakan data kebudayaan bagi Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya untuk keperluan pelaksanaan kebijaksanaan Kebudayaan, penelitian dan masyarakat.

Sedangkan bagian yang ditetapkan di dalam kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan masing-masing adalah,

1. Sejarah Pendidikan Daerah
2. Sistem Kesatuan Hidup Setempat
3. Cerita Rakyat Yang Mengandung Nilai Pancasila
4. Permainan Rakyat
5. Pola Pemukiman

Dengan berpedoman Pola Penelitian Kerangka Laporan dan petunjuk pelaksanaan bagi masing-masing aspek penelitian ini yang telah disiapkan oleh Tim Pusat, maka pengelolaan selanjutnya dipercayakan kepada Ketua-ketua Tim aspek tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Kerja yang telah dibuat secara khusus untuk itu.

Dalam pelaksanaan dan penyelesaian tugas tersebut cukup banyak hambatan yang dialami, seperti sempitnya waktu dibandingkan dengan target dan luasnya wilayah penelitian, sulitnya komunikasi, terbatasnya informan, kurangnya referensi yang mendukung, langkanya tenaga peneliti dan sebagainya. Namun demikian telah diusahakan untuk mengatasi kesulitan dan hambat-

an itu, dan kami menyadari bahwa hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna.

Kami tak lupa menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya dan khususnya kami sampaikan terima kasih kepada:

1. Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, mulai dari tingkat Propinsi Kecamatan dan Desa.
2. Pimpinan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu.
3. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K sampai pada aparat pendidikan di Kabupaten dan Kecamatan,
4. Kepala Dinas dan Jawatan tingkat I dan II Sulawesi Tengah,
5. Tokoh-tokoh masyarakat, Tokoh-tokoh adat, para informan dan responden lainnya yang telah memberikan bantuan yang tidak ternilai harganya.

Kesemuanya ini sangat membantu kami untuk penyelesaian tugas ini.

Semoga naskah laporan ini bermanfaat bagi pembinaan dan perkembangan dan Kebudayaan Nasional kita, dan pembangunan Bangsa dan Negara yang kita cintai.

Palu, 31 Desember 1980
Pemimpin Proyek,

Drs. BOCHARI
NIP. 130207920

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	
PENGANTAR PROYEK IDKD	vii
PENGANTAR PROYEK IDKDDAERAH	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB. I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG BUDAYA MASYARAKAT	2
B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SECARA GARIS BESAR	9
BAB. II. PENDIDIKAN TRADISIONAL	23
A. PENDIDIKAN ZAMAN PURBA	23
1. <i>Kepercayaan</i>	24
2. <i>Adat Sopan Santun</i>	25
3. <i>Pengobatan</i>	25
4. <i>Kerajinan dan Teknologi</i>	26
5. <i>Kewiraan</i>	27
B. PENGARUH AGAMA ISLAM	
1. <i>Pendidikan Islam di Masyarakat</i>	27
2. <i>Tokoh-tokoh Guru</i>	30
BAB. III. PENDIDIKAN BARAT	33
A. PENGARUH PORTUGIS	33
1. <i>Kekuasaan Portugis</i>	33
2. <i>Pendidikan Portugis (Katolik Roma)</i>	34
B. PENDIDIKAN ZAMAN VOC	34
1. <i>Kekuasaan VOC</i>	35
2. <i>Pendidikan Untuk Warga VOC</i>	35
C. PENDIDIKAN ZAMAN HINDIA BELANDA (ABAD KE- 19)	36
BAB. IV. PENDIDIKAN PADA ABAD KE- 20	38
A. PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA	38

	1. <i>Pengaruh Politik Etika (Sekolah Desa)</i> .	41
	2. <i>Pendidikan Dasar</i>	44
	3. <i>Pendidikan Menengah Umum</i>	67
	4. <i>Pendidikan Kejuruan</i>	67
B.	PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL	82
	1. <i>Motivasi Agama</i>	83
	2. <i>Motivasi Faham Nasional</i>	85
	3. <i>Kelembagaan</i>	85
	4. <i>Tokoh-tokoh dan Pemikirannya</i>	108
BAB V.	PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG	110
A.	PENDIDIKAN PEMERINTAH	110
	1. <i>Pendidikan Dasar</i>	110
	2. <i>Pendidikan Kejuruan</i>	112
	3. <i>Kurikulum</i>	114
	4. <i>Guru-guru</i>	115
	5. <i>Keadaan pada Tahun Terakhir (Medio 1944 - 1945)</i>	115
B.	PENDIDIKAN SWASTA	117
BAB VI.	PENDIDIKAN PADA ZAMAN KEMERDEKAAN INDONESIA	120
A.	PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DARI TAHUN 1945 - 1950	121
	1. <i>Pendidikan Pemerintah</i>	123
	2. <i>Pendidikan Swasta</i>	127
B.	PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SEJAK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (1950 - 1980)	128
	1. <i>Pendidikan Dasar</i>	131
	2. <i>Pendidikan Menengah</i>	131
	3. <i>Pendidikan Kejuruan</i>	132
	4. <i>Pendidikan Tinggi</i>	134
BAB.	VII. PENUTUP	136
	— LAMPIRAN	
	— DAFTAR KEPUSTAKAAN	139
	— DAFTAR INFORMAN	142

BAB I

PENDAHULUAN

Tersusunnya tulisan "Sejarah Pendidikan Daerah" ini adalah sebagai hasil kerja dari tim peneliti aspek Sejarah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dari Proyek IDKD tahun 1980/1981. Sesuai dengan keadaan daerah maka tim berpedoman pada kerangka penulisan dari proyek IDKD Pusat, tapi yang dapat diuraikan hanyalah sesuai data-data atau kenyataan yang dijumpai di daerah Sulawesi Tengah. Masih ada beberapa pokok dalam kerangka penulisan yang terpaksa tak dapat diuraikan karena tak adanya keterangan atau data tentang hal tersebut. Walaupun demikian tim mengharapkan kiranya tulisan ini dapat dijadikan sebagai sumbangan bagi penyempurnaan data-data sejarah pendidikan Nasional Indonesia.

Tulisan Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah ini mencakup seluruh wilayah Propinsi Sulawesi Tengah yang meliputi 4 Kabupaten masing-masing Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, Kabupaten Luwuk Banggai dan Kabupaten Buol Toli-Toli. Dalam mencari data-data penulisan ini tim menghadapi kenyataan kurangnya data-data tertulis yang tersedia di daerah terutama mengenai masa-masa sebelum dan awal datangnya kekuasaan Belanda di Sulawesi Tengah sampai masa-masa tahun 1960-an.

Sebagai salah satu bekas wilayah dari Residen Manado pada zaman penjajahan Belanda maka tim berusaha meminta bantuan tambahan data dari Kepala Bidang PSK Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Utara di Manado dan Kepala Kantor Arsip Nasional Cabang Ujung Pandang di Kompleks Benteng Ujung Pandang, Sulawesi Selatan. Namun hingga saat kami memulai penulisan naskah ini kami tak memperoleh balasan surat dari kedua tempat tersebut. Oleh karena itu tim hanya menulis berdasarkan hasil wawancara di samping mempergunakan buku-buku hasil tulisan yang sangat terbatas jumlahnya yang ada dijumpai di Sulawesi Tengah sendiri serta data-data yang ada pada kantor Kanwil P dan K Sulawesi Tengah.

Tentang Sejarah Pendidikan sebelum adanya pendidikan formal, maka tim mengambil suku-suku terasing sebagai *sample* mengingat mereka itu masih tetap bertahan melaksanakan

cara-cara hidup tradisional yang diwarisi dari nenek moyangnya.

Adapun anggota tim peneliti Sejarah Pendidikan Daerah Sulawesi Tengah ini terdiri dari empat orang masing-masing:

1. Dra. Ny. N. Nainggolan, selaku Ketua aspek sejarah daerah merangkap anggota.
2. Laintagoa Daeng Patiro BA, sebagai Sektetaris merangkap anggota.
3. Dra. Ny. D. Borman, sebagai anggota.
4. Drs. R.E. Nainggolan, sebagai anggota.

Selanjutnya tim menyadari bahwa tulisan ini takkan terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak.

Untuk ini tim tak lupa menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Pemda Tingkat I dan Tingkat II se Sulawesi Tengah.
2. Kanwil P dan K Sulawesi Tengah bersama aparatnya, pada empat Kabupaten di Sulawesi Tengah.
3. Pimpinan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu.
4. Tokoh-tokoh Masyarakat dan Tokoh-tokoh Pendidikan di daerah Sulawesi Tengah yang telah memberikan informasi yang dibutuhkan baik lisan maupun tertulis. Walaupun tulisan ini kami laksanakan dengan cara semaksimal menurut kemampuan yang ada namun selaku manusia biasa yang memiliki kemampuan terbatas, maka tim menyadari bahwa tulisan ini belum begitu sempurna kiranya dalam penelitian-penelitian selanjutnya dapat lebih disempurnakan.

A. LATAR BELAKANG BUDAYA MASYARAKAT

Propinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari empat wilayah Kabupaten masing-masing Kabupaten Donggala, Kabupaten Poso, kabupaten Buol Toli-Toli dan Kabupaten Luwuk Banggai pada masa sebelum datangnya kekuasaan penjajah Belanda terdiri atas kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri.

Pada masa itu karena keadaan geografisnya, maka komunikasi antara satu tempat dengan tempat lainnya sangat sulit, karena sarana perhubungan belum memadai, maka tiap kerajaan otonom atas wilayah dan rakyatnya masing-masing.

Umumnya dapat dibedakan antara cara hidup dan pola berpikir antara penduduk kerajaan pesisir dan yang berada di daerah pedalaman. Kerajaan-kerajaan pantai ketika itu lebih

banyak mendapat pengaruh dari luar sedang daerah pedalaman terutama di wilayah Poso terdiri dari kelompok-kelompok suku dikepalai oleh kepala sukunya, masih mempertahankan tradisi/adat kebiasaannya masing-masing. Dari tradisi lisan dapat diketahui bahwa kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kabupaten Donggala banyak mendapat pengaruh dari Sulawesi Selatan (Luwu, Mandar, Bone, Wajo dan Goa), kerajaan di kabupaten Poso mendapat banyak pengaruh dari Luwu dan Bone, kerajaan Banggai mendapat pengaruh dari Ternate dan kerajaan Buol dan Toli-Toli dipengaruhi oleh Gorontalo, Ternate dan Sulawesi Selatan (Bone dan Goa).

Karena itu tidak heran bila ditemui banyak persamaan unsur-unsur budaya Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Selatan (Bugis, Makasar, Mandar), Gorontalo dan Ternate. Dapat dilihat umpamanya bentuk rumah, cara berpakaian, adat perkawinan, sistem nilai sosial, sistem kekerabatan, perlengkapan hidup dan sebagainya.

Hanya pada suku-suku terasing yang belum begitu banyak mengadakan kontak dengan dunia luar dan bertempat tinggal di atas gunung kita masih dapat menemukan adat istiadat dan kepercayaan asli yang mereka pertahankan pelaksanaannya. Daerah Sulawesi Tengah dihuni oleh banyak kelompok suku terasing. Konon ceriteranya mereka ini melarikan diri jauh ke pedalaman karena mereka tidak mau mengadakan kontak atau tidak mau tunduk kepada penguasaan suku lain.

Suku-suku terasing yang ada di Sulawesi Tengah ialah:

- Kabupaten Donggala : suku-suku Tolare, Raranggonau, Tajio, Pendau dan Lauje (rakyat setempat menyebutnya Daya).
- Kabupaten Poso : suku-suku Wana, Kahumamahon (Kayuma Rangka).
- Kabupaten Banggai : suku-suku Loon, Sea-Sea, Wana, Kahumamahon.
- Kabupaten Toli-Toli : suku-suku Daya, Lauje.

Di Pantai Timur Kabupaten Donggala, yaitu di Teluk Tomini dijumpai suku yang bahasanya agak lain daripada bahasa Ledo (Kaili dan bahasa Bare'e (Poso). Mereka menamakan dirinya suku Tialo dan suku Lauje. Kelompok suku ini percaya bahwa asal mula kehidupan mereka terjadi di suatu tempat di atas pe-

gunungan Palasa bernama Lembo Dayoan. Asal kejadian kehidupan manusia katanya karena pertemuan langit dan bumi. Nenek moyang mereka yang pertama bernama Saya Wuntu (perempuan) dari bumi dan yang laki-laki bernama Tompido dari langit. Setelah menjadi suami isteri mereka mempunyai empat orang anak masing-masing bernama: *Wulan Membua* (perempuan), *Yelelumu* (perempuan) *Yelelumpu* (laki-laki) dan *Sai Mandulang* (laki-laki).

Setelah dewasa Wulan Membua dengan Yelelumpu menjadi suami isteri menurunkan suku Tialo dan Yelelumu bersama Sai Mandulang menurunkan suku Lauje.¹⁾ Suku-suku terasing di Sulawesi Tengah menganut kepercayaan animisme dan dinamisme. Bukan hanya manusia dan binatang saja yang mempunyai jiwa tapi semua benda mati dan tumbuh-tumbuhan pun mempunyai roh.

Mereka percaya adanya roh jahat dan roh yang baik sehingga semua aspek budaya mereka erat kaitannya dengan kepercayaan mereka ini.

Dari peninggalan hasil budaya zaman prasejarah di Sulawesi Tengah dapat diketahui bahwa dahulu berkembang kebudayaan Megalitikum. Peninggalannya berbentuk patung-patung besar dan tempayan-tempayan atau tong batu di daerah ini disebut *kalamba*, yang masih kasar buatannya terutama ditemukan di daerah dataran tinggi Kecamatan Lore Utara dan Lore Selatan Kabupaten Poso. Begitu pula artepak-arterepak dari batu dan perunggu banyak ditemukan bertebaran di beberapa tempat di Sulawesi Tengah.

Dari ceritera rakyat yang berhasil dikumpulkan dapat diketahui bahwa pada zaman dahulu (prasejarah) kekuasaan yang mula-mula dikenal adalah kekuasaan yang berdasarkan keberanian. Dalam perkembangan selanjutnya masyarakat lalu mengenal adanya kekuasaan dari orang kuat yang telah kawin dengan puteri kayangan yang menjelma (To Manuru) dan turunan mereka inilah dianggap sebagai orang bangsawan yang selanjutnya setelah mereka mempunyai wilayah tertentu, lalu menimbulkan kekuasaan raja-raja.

Pada mulanya orang belum mengenal aturan-aturan hidup

1). Wawancara dengan Bapak Darimana di Tingkulang Kecamatan Tomini Kabupaten Donggala, tanggal 12-10-1977.

yang mengatur kehidupan dalam masyarakat. Mereka hidup secara kelompok-kelompok suku dan anggota-anggota kelompoknya hanya mengetahui bahwa yang berkuasa ialah orang yang terkuat dan berani menghadapi tantangan-tantangan baik dari pihak kelompok lain maupun dari alam. Dengan demikian semua peraturan yang dikeluarkan atau diucapkan oleh orang kuat tadi merupakan peraturan bagi anggota kelompoknya secara turun temurun.

Namun demikian karena anggota kelompok tadi tak biasa hidup terlepas dari lingkungan alamnya, lama kelamaan mulai dipengaruhi oleh kekuatan alamnya, sehingga mereka menerima bahwa di samping kekuatan dari si orang kuat ketua kelompoknya, ada lagi kekuasaan lain yang lebih kuat, maka timbullah kepercayaan animisme. Mereka percaya bahwa benda-benda di sekelilingnya mempunyai pula kekuatan gaib. Bukan manusia saja tetapi benda-benda seperti batu, pohon-pohon atau sungai-sungai pun mempunyai penunggu (kekuatan) malahan kekuatan ini dapat menguasai atau mengatasi kekuatan manusia.

Menurut mitos di daerah Sulawesi Tengah seorang kuat yang disebut Toma Langgai suatu peristiwa pergi berburu. Dalam perjalanannya ia bertemu dengan serumpun pohon bambu kuning (bambu emas) sehingga ia memerintahkan pengawalnya mengambil bambu kuning tersebut. Tetapi setiap bambu itu dipotong selalu terdengar suara jeritan seorang wanita. Karenanya pemotongan bambu dihentikan. Pada saat yang bersamaan alam menjadi gelap, terjadi guntur dan kilat lalu turun hujan lebat. Tiba-tiba bambu itu terbelah dan keluarlah seorang puteri cantik jelita.

Setelah puteri itu ke luar hujan pun berhenti. Melihat ini *To Malanggai* menjadi takjub dan menganggap putri ini penjelmaan dari kayangan (*To Manuru*). Menurut cerita putri tersebut lalu dikawini oleh *To Malanggai* dan keturunan mereka ini dianggap sebagai kaum bangsawan di daerah ini. Pada umumnya penjelmaan dari manusia kayangan dikenal di seluruh Sulawesi Tengah. Ada beberapa daerah yang memiliki mitos *To Manuru* dari bambu kuning ada pula dari semacam daun yang disebut daun *vavako* (*tavavavako*), ada yang dari perut semacam ikan dan ada pula yang ke luar menjelma dari batu hitam yang besar.

Selain itu di seluruh Sulawesi Tengah dikenal pula mitos *Sawerigading* yang pada beberapa tempat diabadikan dengan

beberapa tempat atau benda yang dianggap sebagai bukti kehadiran tokoh legendaris Sawerigading di Sulawesi Tengah pada zaman dahulu.

Dengan terjadinya perkawinan antara To Manuru dengan penguasa atau ketua-ketua kelompok To Manuru menjelma, maka mulailah terjadi perbaikan di dalam mengatur pemerintahan sebagai akibat pembaharuan yang dibawa oleh To Manuru tersebut. Lama kelamaan muncullah beberapa pusat kerajaan di mana raja-raja setempat membentuk badan-badan pelaksana pemerintahan yang diperlukan dalam memerintah suatu daerah.

Juga disusunlah norma-norma yang mengatur kehidupan dalam masyarakat yang kemudian dikenal sebagai adat. Dengan adanya kerajaan-kerajaan tersebut maka dalam masyarakat lalu dikenal tiga lapisan golongan.

1. Golongan raja dan bangsawan
2. Golongan merdeka
3. Golongan budak/hamba

Istilah untuk gelar raja di Sulawesi Tengah berbeda-beda sesuai istilah setempat. Di Kabupaten Donggala umumnya dipakai istilah *Magau* atau *Madika*, hanya dua tempat yang memakai istilah raja yaitu Banawa dan Moutong. (di Kabupaten Buol dipakai istilah *Kalangan* dan Kabupaten Poso dipakai istilah *Kabose*).

Kerajaan-kerajaan tua yang diketahui pernah ada di Sulawesi Tengah adalah:

- Di Kabupaten Donggala : Sindue, Banawa, Sigi, Biromaru, Dolo
Taweli, Tatanga, Palu, Kulawi, Parigi,
Lambunu, Moutong dan Kasimbar.
- Di Wilayah Kabupaten : Pamona, Napu – Bada, Mori, Bungku,
Poso Tojo, Una–Una.
- Di Kabupaten Luwuk : Banggai.
- Di Kabupaten Buol/ : Buol dan Toli–Toli.
Toli-Toli

Antara penguasa kerajaan-kerajaan tersebut di atas ada yang berhubungan keluarga melalui perkawinan namun dalam mengatur rakyat dan wilayahnya, masing-masing otonom. Begitu pula dengan raja-raja dari Sulawesi Selatan (Bone, Wajo, Mandar, Luwu, dan Gowa), Ternate dan Gorontalo terjalin pula hubungan dengan raja-raja Sulawesi Tengah, sehingga membawa pengaruh

perbaikan dalam tata cara pemerintahannya.

Pada umumnya kerajaan-kerajaan di Sulawesi Tengah dahulu melaksanakan sistem musyawarah dan mufakat dalam pemerintahannya yang menunjukkan pelaksanaan asas demokrasi karena seorang raja tak dapat bertindak sewenang-wenang, tetapi harus selalu mengikuti putusan hasil musyawarah dengan dewan adatnya masing-masing.

Bangunan yang dipakai sebagai tempat musyawarah atau melaksanakan upacara-upacara suci disebut *lobo* (di Palu dan Poso) atau *duhungga* (di Lore Utara dan Lore Selatan). Pada zaman prasejarah sampai abad ke 16 kepercayaan yang dianut adalah animisme dan dinamisme. Yang dipuja adalah suatu zat gaib yang tinggal di dunia atas (*kayangan*), di Poso disebut *Lamoa* dan di Banggai disebut *Pilogot*. Zat gaib ini dianggap akan memberi kebaikan atau bencana pada manusia tergantung dari cara manusia memujanya dengan mengadakan upacara pemujaan. Juga mereka menyembah pohon-pohon, batu-batu besar dan tempat-tempat yang dianggap angker untuk membujuk penunggu tempat tadi agar jangan mendatangkan bencana.

Pada zaman tersebut itu pula pengayauan kepala sering terjadi di antara kelompok satu terhadap kelompok lainnya karena ingin menambah *mana* atau untuk membalas dendam.

Datangnya pengaruh agama Islam ke Sulawesi Tengah diduga terjadi dalam pertengahan abad ke 16 yaitu dengan tibanya ajaran Islam di kerajaan Banggai dari Ternate. Yang mula-mula menerima ajaran agama Islam di Sulawesi Tengah adalah kaum raja-raja dengan keluarganya, terutama di kerajaan-kerajaan pantai yang sering didatangi oleh pedagang-pedagang Islam. Siapa pembawa pertama ajaran Islam ke Sulawesi Tengah dan kapan terjadinya belum dapat diketahui dengan pasti. Karena untuk wilayah Sulawesi Tengah tibanya ajaran Islam ini tidak terjadi serentak.

Di Kabupaten Donggala khususnya Palu, secara tradisi lisan diketahui bahwa yang membawa ajaran Islam pertama kali ke Palu adalah seorang tokoh yang bergelar Dato Karama (Datuk Keramat) yang nama aslinya adalah Abdullah Raqie. Dan yang memeluk pertama kali ajaran ini ketika itu adalah penguasa (*Madika*) Kabonena bernama Pue Njidi. Diduga Dato Karama ini dari Minangkabau hal ini diketahui dari turunannya yang bergelar Ince di depan namanya. Di Parigi diketahui seorang

tokoh pembawa Islam bernama *Dato* (Datuk) Mengaji. Kedua tokoh di atas wafat di Sulawesi Tengah dan kuburan Dato Karama terdapat di Kampung Lere Kota Palu sedang Datok Mengaji di Parigi.

Satu hal yang menarik perhatian adalah adanya kenyataan, bahwa di daerah seluruh Sulawesi Tengah umumnya pelajaran mengaji diajarkan dengan memakai cara mengeja pakai bahasa Bugis. Ini membuktikan bahwa yang menjadi guru mengaji pada masa dahulu adalah orang-orang dari daerah Bugis, Sulawesi Selatan. Kemudian dengan didirikannya perguruan Al Khairaat barulah mulai dipakai ejaan mengaji dalam bahasa arab. Dengan datangnya ajaran Islam ke Sulawesi Tengah, maka para pemeluknya lalu mengembangkan budaya daerah yang diperkaya dengan unsur-unsur budaya Islam.

Pada akhir abad 19 penjajah Belanda masuk ke Sulawesi Tengah menancapkan kuku penjajahannya dengan mendapat perlawanan dari penguasa/raja-raja setempat pada saat itu. Akan tetapi segala perlawanan tadi dapat ditekan oleh Belanda dengan memakai siasat adu domba antara raja-raja di Sulawesi Tengah.

Seiring dengan berkuasanya penjajah Belanda maka agama Kristen pun dikembangkan melalui *Zending*. Usaha *Zending* ini dipelopori oleh dua orang tokoh, yaitu A.C. Kruijt (seorang pendeta dan antropolog) dan Dr. N. Andriani seorang linguist (ahli ilmu bahasa). Mereka berdua bekerja keras menyiarkan agama Kristen terutama pada kelompok-kelompok suku di daerah pedalaman Poso. Dalam usaha mensukseskan usahanya ini keduanya mempelajari dan mencatat hal-hal yang menyangkut adat kebiasaan, bahasa, kepercayaan dari suku-suku yang didatanginya.

Demikianlah pula untuk melancarkan pelaksanaan *Zending*-nya maka dibukalah sekolah-sekolah oleh A.C. Kruijt dan kitab Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Bare'e (bahasa daerah Poso) oleh Dr. N. Andriani. Dengan demikian sampai saat ini penduduk Pamona, Mori, Lore, Kulawi dan daerah sekitarnya sebagian besar memeluk agama Kristen.

Meskipun agama Islam dan Kristen telah banyak penganutnya di Sulawesi Tengah, tapi kebanyakan suku-suku terasing yang tinggal di atas gunung-gunung masih tetap menganut kepercayaannya yang lama, sehingga dapat dikatakan kebudayaan Sulawesi Tengah merupakan perpaduan antara budaya lama dan kebudayaan yang sudah mendapat pengaruh unsur-unsur

budaya Islam dan Kristen.

B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SECARA GARIS BESAR

Sejak dari zaman purba hingga pertengahan abad ke-16, sebelum masuk-pengaruh agama Islam, di daerah Sulawesi Tengah berlaku pendidikan tradisional. Pendidikan tradisional yang hanya berlaku dalam lingkungan keluarga, para orang tua, yaitu ayah dan ibu serta semua keluarga tertua yang tinggal serumah menjadi guru utama bagi anak-anak dalam keluarga bersangkutan.

Pelajaran yang diberikan kepada anak-anak terutama adalah soal etika (adat sopan santun) dalam pergaulan di lingkungan keluarga menurut kepercayaan lama (animisme dan dinamisme) dan keterampilan kerja untuk mempertahankan diri dari alam sekitarnya untuk kelangsungan hidupnya.

Adat sopan santun dalam pergaulan yang dimaksud bukan hanya hubungan pergaulan dengan sesama manusia tetapi juga hubungan manusia dengan kekuatan-kekuatan gaib di luar seperti roh-roh yang menghuni pohon-pohon kayu, batu-batu dan air yang dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan dalam upacara-upacara atau sajian-sajian tertentu. Kalau hal ini tidak dilakukan maka para penghuni tempat-tempat yang disebutkan itu menimbulkan gangguan-gangguan yang dapat membahayakan hidup manusia.

Keterampilan kerja yang diajarkan adalah cara-cara untuk mendapatkan kebutuhan hidup sehari-hari seperti berburu, mencari ikan di air dan bertani, membuat tempat tinggal, serta membuat alat-alat perlengkapan kerja. Pendidikan tradisional di lingkungan keluarga ini kesemuanya berlangsung dengan sendirinya dengan sistem meniru apa yang dilakukan oleh orang tua, terutama ayah dan ibu.

Sesudah pertengahan abad ke-16, agama Islam masuk dan diterima, terutama oleh penduduk di daerah Sulawesi Tengah yang mendiami daerah-daerah di tepi pantai bagian timur maupun bagian barat. Agama Islam yang masuk pertama sekali di daerah Sulawesi Tengah itu dibawa oleh para ulama pedagang dari Ternate.

Yang mula-mula diajarkan para ulama yang datang itu kepada penduduk setempat adalah mengaji, membaca huruf Qur'an dengan metode menghafal. Satu per satu murid yang datang belajar pada ulama itu meniru dan menghafalkan bunyi dan

bentuk huruf yang diajarkan dengan sebaik-baiknya.

Yang menjadi tempat belajar para murid waktu itu adalah rumah dari keluarga tertentu seperti ketua kelompok raja, atau ketua kampung, tempat tinggal sang ulama tersebut. Lama kelamaan setelah banyak di antara penduduk yang dapat membaca huruf Qur'an (mengaji) maka mulailah diajarkan pelajaran pokok agama Islam, yaitu Ilmu Tauhid dan Ilmu Fiqh (Rukun Iman dan Rukun Islam), bahasa Arab dan Tassawuf. Tempat belajar bukan lagi di rumah-rumah tetapi sudah pindah ke surau (langgar) dan kemudian di mesjid- mesjid.

Gedung sekolah (madrasah) seperti apa yang kita kenal sekarang ini belum ada. Gedung sekolah (madrasah) sebagai tempat belajar para murid yang diajar oleh seorang atau beberapa orang guru (ustad) ada, setelah Belanda berkuasa di daerah ini akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20.

Untuk mengetahui perkembangan sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta di daerah Sulawesi Tengah sejak tahun 1900 sampai dengan tahun 1960 pada empat Kabupaten di daerah Propinsi Sulawesi Tengah dalam empat masa (periode) menurut data yang ada sebagai berikut:

Masa penjajahan pemerintah kolonial Belanda (1900–1941). Sekolah Dasar (Sekolah Rakyat) berkelas III dan berkelas IV, di Kabupaten Donggala 56 buah, Kabupaten Poso 89 buah, Kabupaten Buol Toli-Toli 27 buah dan di Kabupaten Banggai 63 buah. Banyaknya sekolah rakyat yang dapat dinikmati rakyat di keempat Kabupaten hanya 235 buah.

Pada pemerintahan militer Jepang (1942–1945), Sekolah Dasar mengalami peningkatan menjadi 275 buah berkelas III dan berkelas VI yang terdapat di Donggala 58 buah, Poso 106 buah, Buol Toli-Toli 33 buah dan di Kabupaten Banggai 78 buah.

Selama masa kemerdekaan dengan keadaan daerah Sulawesi Tengah yang menjadi bagian Negara Indonesia Timur (NIT) (1946–1950) telah meningkat menjadi 346 buah sekolah, 6 buah di antaranya SLTP.

Pada masa terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan daerah Sulawesi yang ibu kotanya Makasar. Setelah Propinsi Sulawesi dibagi dua menjadi Propinsi Sulawesi Utara–Tengah (Sulutteng) dengan ibu kota Manado dan Sulawesi Selatan Tenggara (Sulseltra) dengan ibu kota Makasar, maka daerah Sulawesi Tengah menjadi daerah administratif dari Pro-

pinsi Sulawesi Utara Tengah (1951–1964).

Keadaan Sekolah-sekolah di daerah Sulawesi Tengah dalam waktu sepuluh tahun jumlahnya dapat kita lihat di bawah ini. Untuk penambahan jumlahnya sekolah lanjutan baik Sekolah Lanjutan Pertama (SLTP) maupun Sekolah Lanjutan Atas (SLTA) dalam tulisan ini tidak diperinci lagi dalam sekolah-sekolah umum dan kejuruan yang ada, tapi hanya digunakan istilah SLTP dan SLTA saja. Jumlah sekolah ada 332 buah yang sebagian terdiri dari 28 buah SLTP dan 3 SLTA. Keadaan pembangunan sekolah-sekolah ini makin banyak sehingga jumlah sekolah seluruhnya yang ada di daerah Sulawesi Tengah pada akhir tahun 1960 ada 688 buah yang sebagian besar terdiri dari Sekolah Rakyat.²⁾

Keadaan jumlah sekolah yang disebutkan di atas itu belum termasuk sekolah-sekolah (madrasah) yang berada di bawah pengawasan Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya kita perlu meninjau perkembangan pendidikan di masa depan.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Biro Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tengah diketahui jumlah penduduk Sulawesi Tengah dari hasil sementara Sensus penduduk tahun 1980 sebanyak 1.165.886 orang.

Dari jumlah tersebut penduduk usia sekolah antara 13–15 tahun sebanyak 88.768 orang. Yang bersekolah ditampung pada sekolah-sekolah yang ada (SD dan SLTP umum dan kejuruan) 14.438 orang dan yang tidak sekolah 71.330 orang. Prosentase anak-anak usia sekolah antara 13–15 tahun yang sempat menikmati pendidikan di sekolah-sekolah (SD dan SLTP) negeri maupun swasta hanya kurang lebih 16,26% dan yang tidak sekolah kurang lebih 83,74%.

Jumlah penduduk usia sekolah antara 16–18 tahun sebanyak 79.801 orang. Dari jumlah ini yang dapat ditampung di sekolah-sekolah yang ada sekarang (SLTA Umum dan Kejuruan) negeri maupun swasta sebanyak 7.694 orang dan yang tidak sekolah 72.107 orang. Prosentase anak-anak usia sekolah antara 16–18 tahun yang dapat mengikuti pendidikan di sekolah hanya 9,64% dan yang tidak bersekolah 90,36%.

Melihat kenyataan ini di mana prosentase jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah jauh lebih besar daripada

jumlah anak yang bersekolah. Maka untuk waktu-waktu mendatang masih perlu ditambah jumlah sekolah-sekolah mulai dari tingkat SD sampai tingkat SLTA, supaya sedikit demi sedikit kebutuhan sebagian besar masyarakat terhadap pendidikan di daerah ini dapat dipenuhi.

Dengan penambahan jumlah sekolah-sekolah seperti disebutkan di atas, perbedaan begitu besar antar anak yang bersekolah dengan yang tidak bersekolah dapat diperkecil atau dikurangi, sehingga usaha pemerataan pendidikan di daerah Sulawesi Tengah dapat dicapai dalam waktu yang tidak begitu lama.

Jadi dalam waktu lima sampai sepuluh tahun mendatang ini sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk yang membutuhkan pendidikan di sekolah-sekolah, maka pemerintah dan rakyat Sulawesi Tengah harus berusaha keras untuk melipatgandakan jumlah sekolah yang ada sekarang secara bertahap dan berencana agar dapat dicapai target jumlah anak-anak yang bersekolah jauh lebih besar daripada anak-anak yang tidak bersekolah.

Dewasa ini murid-murid tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) yang tidak sempat melanjutkan studi pada Perguruan Tinggi di luar daerah sangat mendambakan adanya sebuah Perguruan Tinggi berdiri sendiri di Sulawesi Tengah. Seirama dengan keinginan para lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas tersebut di atas maka pemerintah dan rakyat Sulawesi Tengah umumnya sekarang ini sedang berusaha keras meminta kepada pemerintah pusat c.q. Dirjen Pendidikan Tinggi supaya di Sulawesi Tengah dapat didirikan sebuah Lembaga Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri.

Perkembangan sekolah di daerah Sulawesi Tengah pada 20 tahun terakhir (1961-1980) menunjukkan suatu kemajuan pesat sekali. Lebih-lebih setelah daerah ini dinyatakan sebagai daerah otonom yang berdiri sendiri pada tanggal 13 April 1964 (berdirinya Propinsi Sulawesi Tengah) perkembangan pendidikan menjadi cepat sekali kalau dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya.

Untuk mengetahui perkembangan pendidikan di daerah Sulawesi Tengah selama beberapa periode waktu tersebut dapat kita lihat pada banyaknya jumlah sekolah yang bertambah, termasuk juga sekolah-sekolah swasta. Perkembangan pesat se-

kolah-sekolah itu telah mampu menambah jumlah sekolah menjadi 1111 buah yang terdiri dari 147 buah TK, 824 SLTP dan 58 buah SLTA.

Biarpun demikian hingga akhir tahun 1980 jumlah seluruh sekolah yang ada di daerah Sulawesi Tengah mulai dari Taman Kanak-kanak sampai SLTA ada 1799 buah yang terdiri dari 148 buah TK, 1474 buah SD, 116 buah SLP dan 61 buah SLTA.³⁾ Kecuali penambahan Sekolah-sekolah yang ada di bawah pengawasan Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tengah seperti itu, ada pula penambahan jumlah sekolah-sekolah yang berada dalam pengawasan Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah. Keadaan sekolah madrasah yang berdasarkan agama Islam ini mulai dari tingkat Ibtidaiyah (SD) sampai tingkat Aliyah (SLTA) yang terdiri dari 268 buah Ibtidaiyah, 24 Tsanawiyah dan 8 buah Aliyah.⁴⁾

Sekolah pendidikan agama (PGA) baik Islam maupun Kristen terdapat di tiga kabupaten yaitu :

Kabupaten Donggala	1 buah milik Islam
Kabupaten Poso	1 buah milik Kristen (GKST)
Kabupaten Banggai	1 buah milik Kristen (GKLB)

dan ada lagi sebuah Sekolah Alkitab di Tentena, Kabupaten Poso.

Melihat jumlah SLTA dan banyaknya murid-murid setiap akhir tahun ajaran yang tamat menyelesaikan belajarnya pada sekolah-sekolah tersebut yang ingin melanjutkan pelajarannya ke tingkat Perguruan Tinggi, maka sudah sewajarnya masyarakat dan pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Tengah meminta kepada Pemerintah Pusat c.q. (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi supaya dalam waktu singkat di Daerah Sulawesi Tengah dapat didirikan sebuah Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri.

Sudah sejak dulu timbul keinginan masyarakat setempat untuk mendirikan sebuah Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri dan keinginan ini mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah

3). Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tengah, *Nomor Statistik Sekolah TK, SD, SLTP dan SLTA Propinsi Sulawesi Tengah. 1979/1980.*

4). Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah, *Data-data Keadaan Madrasah Dan Inpres Rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah tahun 1977 dan tahun 1978 Bidang Pendidikan Agama Islam, 1977/1978.* Halaman 18, 19.

Tingkat II. Dukungan tersebut terutama diwujudkan dalam bentuk material dan fasilitas.

Keinginan masyarakat mendirikan Perguruan Tinggi sejalan dengan perjuangan rakyat Sulawesi Tengah yang menghendaki agar daerah Sulawesi Tengah yang masih merupakan Daerah Administratif Propinsi Sulawesi Utara-Tengah dapat berdiri sendiri sebagai suatu Propinsi/Daerah otonomi yaitu Propinsi Sulawesi Tengah. Cita-cita ini telah dicetuskan sejak tahun 1962, dan pada tanggal, 8 Mei 1963 dibentuklah *Universitas Tadulako* yang disponsori oleh tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pendidik yang berada di kota Palu. Sebagai usaha lanjutan dari pembentukan Universitas tersebut, pada tanggal 28 November 1963 dibentuk sebuah yayasan bernama "Yayasan Universitas Tadulako" dengan akte nomor 55.

Pada tanggal, 12 September 1964 Universitas Tadulako dengan fakultas-fakultasnya terdaftar pada Departemen PTIP (Biro Perguruan Tinggi Swasta) dengan No.94/B/WT/64. Dengan SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan, Dr. Syarif Thayeb, tertanggal 26 September 1965 No.226/1965 dibentuklah Panitia Persiapan Penegerian Universitas Tadulako di Palu, yang bertugas mengadakan persiapan penegerian Universitas Tadulako menjadi Cabang dari Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

Pada tanggal 1 Januari 1966 Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan menerbitkan dua buah surat keputusan yang isinya sebagai berikut.

1. Universitas Tadulako di Palu dengan empat fakultas yakni:

Fakultas Peternakan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Sosial Politik dan Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, yang dengan SK Menteri PTIP No. 1 tahun 1966 dijadikan Universitas Negeri Cabang Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.

2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) yang tadinya merupakan sebuah fakultas dalam lingkungan Universitas Tadulako, dengan SK Menteri PTIP No. 2 tahun 1966 dijadikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Negeri Cabang dari IKIP Makassar yang terdiri dari dua fakultas yaitu: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) dan fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE).

Dengan dikeluarkannya dua buah surat keputusan tersebut di atas secara hukum kedua Perguruan Tinggi Negeri itu yakni Universitas Tadulako Cabang Universitas Hasanuddin dan IKIP Makassar Cabang Palu di Palu diakui keberadaannya (eksistensinya). Kedua perguruan Tinggi Negeri yang berstatus Cabang itu dengan kedudukan sama masing-masing membawa misi dan peranannya sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi tempat mencetak kader-kader pembangunan bangsa dan negara sekarang maupun di masa datang.

Dalam kelanjutan hidupnya, masing-masing Perguruan Tinggi tersebut mengalami kemajuan dalam perkembangannya dengan melaksanakan program-programnya sendiri-sendiri.

IKIP Makassar Cabang Palu yang tadinya hanya terdiri dua fakultas yaitu Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Umum dan Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta jurusan Ilmu Hayat, dengan SK Rektor IKIP Makassar tanggal 15 April 1967 No. 092/Pend/IKIP/67 terhitung tanggal 1 Januari 1967 ditambah lagi sebuah Fakultas di dalamnya, yaitu Fakultas Keguruan Sastera Seni (FKSS) dengan jurusan-jurusan:

a. Bahasa dan Sastera Indonesia, b. Bahasa dan Sastera Inggris.

Dengan SK Rektor IKIP Makassar tanggal 26 Maret 1968 No.246/Educ/1/IKIP/3/68, terhitung pada tanggal 1 Januari 1968 pada dua fakultas tersebut pertama, yaitu FIP dan FKIE masing-masing ditambahkan lagi satu jurusan di dalamnya. Pada Fakultas Ilmu Pendidikan ditambah jurusan Pendidikan Sosial (PS) dan pada Fakultas Keguruan Eksakta ditambahkan jurusan Ilmu Pasti (Matematika).

Dengan demikian sejak tahun 1968 IKIP Makassar Cabang Palu memiliki tiga buah fakultas dan enam jurusan masing-masing:

1. FIP dengan jurusan :
 - a. Pendidikan Umum (PU).
 - b. Pendidikan Sosial (PS).
2. FKIE dengan jurusan:
 - a. Ilmu Hayat.
 - b. Ilmu Pasti (Matematika).
3. KFSS dengan jurusan:
 - a. Bahasa dan Sastra Indonesia.
 - b. Bahasa dan Sastra Inggris.

Selain di Palu pada tahun 1967 di Luwuk, ibu kota Kabupaten Banggai berdiri pula Perguruan Tinggi filial dari UNSRAT dan IKIP Manado. Fakultas Sosial Politik Cabang Unsrat dan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) dengan

jurusan-jurusan: Bimbingan dan Penyuluhan (BP), Civics Hukum dan Ekonomi Umum.

Pada tahun 1970 STKIP di Luwuk menjadi filial dari IKIP Ujung Pandang dan ujian Sarjana Muda pertama tahun 1972 dilakukan oleh Kopertis Wilayah VII Ujung Pandang.

Di Poso (ibu kota Kabupaten Poso) tidak berapa lama kemudian berdiri pula sebuah Perguruan Tinggi dengan nama *Extension Cours* IKIP Manado di Poso dengan empat buah fakultas.

1. Fakultas Keguruan Ilmu Sosial (FKIS) dengan jurusan-jurusan:
 - a. Ekonomi Perusahaan.
 - b. Civics Hukum.
2. Fakultas Keguruan Ilmu Eksakta (FKIE) jurusan Ilmu Hayat.
3. Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) jurusan Teori dan Sejarah Pendidikan.
4. Fakultas Keguruan Sastra Seni (FKSS) dengan jurusan-jurusan:
 - a. Bahasa Sastra Indonesia.
 - b. Bahasa dan Sastra Inggris.

Sementara itu diusahakan Integrasi menuju Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri.

Bertitik tolak dari dua Perguruan Tinggi negeri berstatus Cabang di kota Palu yaitu Untad Cabang Unhas dan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu atas saran dan kebijaksanaan Pemerintah Daerah supaya kedua Perguruan Tinggi ini bersedia mengintegrasikan diri untuk menjadi sebuah Perguruan Tinggi Negeri berdiri sendiri; maka kebijaksanaan ini mendapat dukungan sepenuhnya dari pimpinan kedua Perguruan Tinggi tersebut.

Pada tanggal, 11 Nopember 1973, berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dibentuklah "Panitia Integrasi Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah" diketuai oleh Drs. Abdul Azis Larekeng yang pada waktu itu menjabat Ketua Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah. Pada waktu itu pula di depan/disaksikan oleh Ketua Panitia Integrasi Perguruan Tinggi se Sulawesi Tengah, kedua pimpinan Perguruan Tinggi tersebut (Untad Cabang Unhas dan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu), setelah melalui musyawarah dan mufakat di Palu menanda-tangani suatu pernyataan kebulatan pendapat mendukung kebijaksanaan Pe-

merintah Daerah Sulawesi Tengah untuk membentuk suatu lembaga Perguruan Tinggi Negeri yang berdiri sendiri.

Keinginan rakyat dan Pemerintah Daerah tersebut di atas ini disampaikan kepada Pemerintah Pusat c.q. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta. Hal ini mendapat tanggapan baik dari Dirjen Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Makaminang Makagiansar.

Pada bulan April 1976 Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. M. Makagiansar bersama rombongan datang ke daerah Sulawesi Tengah melihat dari dekat potensi yang ada pada kedua Perguruan Tinggi tersebut untuk dijadikan sebuah Perguruan Tinggi Negeri berdiri sendiri.

Selain kota Palu beliau pun sempat ke Poso melihat dari dekat keadaan Perguruan Tinggi *Extention Course* IKIP Manado di kota itu. Setelah kembali dari peninjauannya di Daerah Sulawesi Tengah beliau menyatakan bahwa

"Adanya suatu Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri di Sulawesi Tengah di masa yang akan datang bukanlah masalah. Yang menjadi masalahnya adalah kapan Perguruan Tinggi yang demikian ini diadakan, serta bagaimana bentuk Perguruan Tinggi sebaiknya".

Berdasarkan statement Dirjen Pendidikan Tinggi di atas ini diambil suatu kebijaksanaan oleh Pemerintah Pusat c.q. (Dirjen Pendidikan Tinggi membentuk suatu Tim yang diketuai oleh Dr. Soedjana Sapii untuk kemudian mengadakan serangkaian peninjauan pada Perguruan-perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah untuk mempelajari kemungkinan-kemungkinan dapat didirikannya sebuah Perguruan Tinggi berdiri sendiri.

Dari peninjauan beberapa hari di daerah itu, Tim tersebut memberikan suatu pemecahan masalah yang dibagi atas:

1. *Kebijaksanaan jangka pendek*:
 - a. Memperbaiki proses penyelenggaraan pendidikan terutama dalam bidang pelajaran dan pengajaran yang dalam waktu dekat ini dapat dilaksanakan.
 - b. Mengurangi rasa terisolasinya staf pengajar maupun mahasiswa di Sulawesi Tengah dengan memungkinkan mereka berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan nasional yang lebih luas.
2. *Kebijaksanaan jangka panjang*
Sebaiknya dibentuk Proyek Perguruan Tinggi di Sula-

wesi Tengah yang bertugas untuk melaksanakan serangkaian langkah-langkah yang teratur dan berencana untuk menciptakan suatu Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah yang berdiri sendiri dengan bentuk yang paling tepat menunjang perkembangan Sulawesi Tengah di kemudian hari. Proyek ini sebaiknya ditangani melalui tenaga-tenaga yang ada di Sulawesi Tengah sehingga hasilnya merefleksikan pandangan dari rakyat dan Pemerintah Sulawesi Tengah. Proyek ini hendaklah dibimbing oleh seseorang yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebagai ketuanya. Ketua Proyek ini berkewajiban untuk membimbing memberikan konsultasi dan pengarahan dalam perencanaan pengembangan Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah menuju kepada suatu bentuk Perguruan Tinggi yang paling tepat di kemudian hari. Di Sulawesi Tengah dengan pengendalian dari Pusat sehingga konsep-konsep yang tengah dikembangkan di Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nasional akan tetap dapat terbina dengan baik.

Bertolak dari rekomendasi Dr. Soedjana Sapii, maka direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, dengan Surat Tugas beliau No. 349/DJ/76 tertanggal, 1 Oktober 1976, menugaskan Drs. Sofyan Aman, Sekretaris Universitas Brawijaya di Malang, untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut selaku Ketua, dengan anggota-anggotanya terdiri dari pejabat-pejabat setempat yakni:

1. Drs. Musyi Amal, Dekan Koordinator Universitas Tadalako Cabang / unhas
2. Drs. R.E. Nainggolan, Dekan Koordinator IKIP Ujung Pandang Cabang Palu.
3. Drs. Kisman Abdullah, Kepala Direktorat Kesejahteraan Rakyat, Kantor Gubernur Propinsi Sulawesi Tengah.
4. Drs. H. Abdul Azis Larekeng, Ketua Bappeda Sualwesi Tengah.
5. Drs. P. Lima, Dosen Untad dan anggota Bappeda Sulawesi Tengah.
6. Drs. Yusuf Rungka, Kepala Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tengah.
7. Drs. Max Rumampuk, Dosen Untad selaku Sekretaris Tim.

Tugas yang diberikan kepada Drs. Sofyan Aman terutama adalah:

1. Meningkatkan pelayanan kepada mahasiswa dari sistem Pendidikan Tinggi yang ada di Sulawesi Tengah.
2. Mengadakan penelitian tentang kemungkinan adanya suatu Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri di Sulawesi Tengah, dengan hasil berupa rekomendasi kepada pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Kedua tugas tersebut di atas ini dilaksanakan dalam waktu yang sama.

Untuk melaksanakan tugas yang tercantum pada point 2 di atas Dekan Koordinator IKIP Ujung Pandang Cabang Palu mengambil suatu kebijaksanaan menugaskan tiga orang dosen masing-masing Dra. Ny. Nurhayati Nainggolan, Drs. Mirza Sutopo dan Daeng Patiro Laintagoa. BA. dengan surat tugas No. 142.02.1987 dan No. 149.22.1977 tanggal, 7 Maret 1977. Mengumpulkan data-data yang dibutuhkan tentang Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah. Data-data yang berhasil dikumpulkan oleh Tim kerja ini merupakan bahan laporan Ketua Proyek Drs. Sofyan Aman tentang Prospek Perguruan Tinggi di daerah Sulawesi Tengah, kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Jakarta.

Tim kerja di atas kemudian disempurnakan lagi dengan dikeluarkannya Surat Tugas tanggal, 2 Juli 1977 No.347.35.77 oleh Dekan Koordinator IKIP di mana Tim kerja IKIP INI selengkapnya sebagai berikut:

1. Drs. R.E. Nainggolan, Ketua merangkap anggota.
2. Drs. Mirza Sutopi, anggota.
3. Drs. Syamsuddin Hi. Chalid, anggota.
4. Dra. Ny. Nurhayati Nainggolan, anggota.
5. Daeng Patiro Laintagoa BA., anggota.

Tim kerja ini ditugaskan untuk:

1. Mengumpulkan data-data yang masih dibutuhkan.
2. Menganalisa data-data yang telah dikumpulkan.
3. Menyusun rekomendasi berdasarkan faktor-faktor mungkin tidaknya suatu Perguruan Tinggi berdiri sendiri di Sulawesi Tengah.
4. Menyusun program peningkatan pelayanan kepada Mahasiswa dari sistem yang sudah ada di Sulawesi Tengah.

Pada bulan Juli 1977 Tim kerja ini telah menyelesaikan laporannya dengan judul "Prospek Perguruan Tinggi di Sulawesi

Tengah (Suatu Feasibility Study)". Berdasarkan hasil dari Tim kerja IKIP dengan tambahan bahan-bahan dari anggota-anggota peneliti lainnya maka Ketua Proyek Perguruan Tinggi Sulawesi Tengah Drs. Sofyan Aman mengolah dan menyusun "*Laporan Tim tentang kemungkinan adanya suatu Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri di Sulawesi Tengah*" yang diajukan pada pertemuan Batu, Malang pada tanggal 13 – 15 Agustus 1977.

Pertemuan ini dipimpin/dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr . D. Tisna Amidjaja beserta staf, juga dihadiri oleh Rektor Unbraw Prof. Dardji Darmodiharyo SH., Rektor Unhas Ujung Pandang/Ketua BKS Perti Indonesia Timur Prof. Dr. Amiruddin, Rektor IKIP Ujung Pandang Drs. Abd. Karim, Ketua Tim Peneliti Drs. Sofyan Aman, Dekan Koordinator Universitas Tadulako Cabang Unhas serta Dekan Koordinator IKIP Ujung Pandang Cabang Palu dan staf Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah.

Pertemuan Batu Malang ini menghasilkan:

1. Meningkatkan Pengembangan Perguruan Tinggi di Palu dalam rangka realisasi pembentukan Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri, sesuai dengan hasrat masyarakat Sulawesi Tengah, diperlukan adanya persiapan yang mantap yang berbentuk masa transisi selama paling sedikitnya tiga tahun.
2. Masa transisi tersebut akan dimanfaatkan untuk pengisian kebutuhan pokok pengembangan lembaga Pendidikan Tinggi baik dari segi akademis maupun dari segi organisasi/administrasi serta fasilitas.

Sebagai realisasi dari Pertemuan Batu (Malang) tersebut maka keluarlah surat penugasan dari Dirjen Pendidikan Tinggi tertanggal, 21 Oktober 1978 No.2173/D1.4/C/78 kepada Tim Pengelola Organisasi Management Perguruan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

I. Tim Pengelola Pusat:

1. D.A. Tisna Amidjaja – sebagai konsultan.
2. Sofyan Aman – sebagai ketua Tim.
3. Soewarno – sebagai anggota.
4. K. Halim – sebagai anggota.
5. A.O.B. Situmorang – sebagai anggota.
6. O. Simbolon – sebagai anggota.

7. Y.H. Jalil — sebagai anggota.
8. Hamdan Mansoer — sebagai anggota.

II. Tim Pengelola Daerah:

1. R.E. Nainggolan — sebagai koordinator.
2. M. Fattah — sebagai wakil koordinator.
3. M. Daris Mattoreang — sebagai anggota.
4. Syamsuddin Hi. Chalid — sebagai anggota.
5. Musji Amal — sebagai anggota.
6. M. Idris — sebagai anggota.
7. H.N. Lamakarate — sebagai anggota.

Tim ini bertugas:

- a. Menyusun rencana program pengembangan Perguruan Tinggi di Palu menuju kemungkinan adanya suatu Perguruan Tinggi Negeri yang berdiri sendiri.
- b. Menyusun rencana peningkatan mutu Universitas Tadulako Cabang Universitas Hasanuddin dan IKIP Ujung Pandang Cabang Palu secara bersama-sama baik di bidang tenaga kerja, perangkat keras (*hard-ware*) maupun perangkat lunak (*soft-ware*).

Dalam melaksanakan tugasnya Tim diberi wewenang untuk menghubungi pihak-pihak pejabat yang diperlukan berkaitan dengan tugas tersebut di atas dan penugasan ini terhitung mulai 1 April 1978. Kemudian pada tanggal 11 – 12 Desember 1978 di Jakarta diadakan rapat kerja Tim Pengelola Pusat dan Pengelola Daerah dipimpin/dihadiri oleh Dirjen Pendidikan Tinggi beserta staf membahas kertas kerja yang diajukan oleh Tim Pengelola Daerah berjudul "Program Pengembangan Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah". Raker ini antara lain menghasilkan: Dalam masa peralihan dan pematapan persiapan Perguruan Tinggi Berdiri Sendiri di Sulawesi Tengah, dirasa perlu adanya satu wadah/badan yang dapat memimpin Perti tersebut di daerah sebagai Koordinator yang dapat bekerja lebih efektif dan efisien di daerah dalam penyusunan/pelaksanaan program-program yang integratif antara dua Perti yang ada.

Pada tanggal, 16 Pebruari 1980 Dirjen Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Dodi Tisna Amidjaja, bertempat di ruang sidang DPRD Tingkat I Sulawesi Tengah melantik anggota-anggota Koordina-

torium Perguruan Tinggi Sulawesi Tengah yang terdiri dari.

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang waktu itu dijabat oleh kolonel R.H. Eddy Djajang Djaja Atmadja, sebagai Ketua.
2. Drs. Madukallang Fattah, Wakil Ketua I Bidang Edukasi (Pendidikan).
3. Drs. R.E. Nainggolan, Wakil Ketua II Bidang Administrasi dan keuangan.
4. Drs. Max Rumampuk, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan.
5. Drs. M. Daris Mattoreang, Wakil Ketua IV Bidang Penelitian.
6. Drs. Syamsuddin Hi. Chalid, Wakil Ketua V Bidang Pengabdian Masyarakat.
7. Drs. Amir Bahri Ali, Wakil Ketua VI, Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

Demikianlah dalam masa peralihan menuju suatu Perguruan Tinggi berdiri sendiri para anggota koordinatorium melaksanakan tugas sesuai pembedangan masing-masing. Oleh Dirjen Pendidikan Tinggi telah disusun sebuah buku pedoman kerja koordinatorium berjudul: "Petunjuk Pelaksanaan Tugas Koordinatorium Perguruan Tinggi Sulawesi Tengah" yang diterbitkan pada tanggal, 31 Januari 1980.

Pemerintah c.q. Dirjen Pendidikan Tinggi di Jakarta telah menjanjikan selambat-lambatnya Agustus 1981 Perguruan Tinggi berdiri sendiri di Sulawesi Tengah sudah akan terwujud.

BAB II

PENDIDIKAN TRADISIONAL

A. PENDIDIKAN ZAMAN PURBA

Berdasarkan hasil penelitian lapangan maka dapat dikatakan bahwa Sulawesi Tengah kemungkinan tidak mendapat pengaruh agama Hindu dan Budha pada zaman dahulu. Sebelum abad ke-20 masyarakat Sulawesi Tengah belum mengenal lembaga pendidikan formal atau sekolah. Pendidikan terhadap anak-anak hanya berlangsung di dalam lingkungan keluarga masing-masing. Anak-anak diajari selain menguasai ketrampilan yang berguna dalam menghadapi tantangan hidup juga diberikan pengetahuan tentang adat istiadat. Terutama ditanamkan kepada anak-anak harus menghormati orang tua/leluhur.

Adalah merupakan pantangan keras menyebut nama orang tua sehingga yang dikenal hanyalah gelaran: bapak atau ibu si Yolo atau si Dei, paman atau bibi si Yolo atau di Dei. Anak dididik dan diajar mengenal sesuatu oleh orang tua dengan cara memberikan petunjuk yang harus dicontoh oleh anak-anak. Dengan cara meniru maka akhirnya si anak akan memahami/menguasai pengetahuan tersebut.

Suku-suku (kelompok-kelompok) yang tinggal di dataran-dataran tinggi/pedalaman terutama sumber penghidupan adalah berburu dan bertani secara sederhana (seperti umpamanya suku-suku terasing. Alat berburu yang dipakai adalah sumpit, tombak, jerat serta anjing. Makanan pokok mereka adalah umbi-umbian seperti talas, ubi, jelai (bailo) juga jagung, sagu dan pisang. Alat-alat yang mereka pakai bercocok tanam masih sederhana seperti parang, tongkat-tongkat kayu yang runcing. Mereka membuka suatu perladangan dengan membakar hutan lalu menanaminya dengan ubi, talas atau jagung. Ladang-ladang ini biasanya ditanami sekali dua kali lalu pindah lagi membuka areal perladangan baru dengan didahului upacara minta izin pada roh yang menguasai tanah.

Begitu pula kalau habis memetik hasil diadakan upacara pesta panen yang disebut *Vunja*, sebagai tanda syukur pada pelindung tanaman. *Vunja* adalah upacara pesta panen yang diadakan secara massal oleh satu lingkungan/kelompok. Caranya dengan mendirikan *Vunja* yaitu memancangkan satu tiang biasa-

nya terbuat dari pohon pinang diberi palang pada puncaknya tempat menggantungkan hasil tanaman, ada yang sudah dimasak ada pula yang masih mentah. Pemancangan tiang Vunja ini diiringi syair lagu yang disebut *modindi*, yaitu syair-syair yang merupakan pelepasan nazar atau ucapan syukur pada roh pelindung tanaman.

Setelah itu disusul dengan beramai-ramai menyanyikan lagu disebut *Kayori* sambil menari mengelilingi tiang Vunja. Dalam *Kayori* ini syair-syairnya merupakan campuran kata-kata dari bahasa Bare'e, Kaili dan Tajio.

1. Kepercayaan

Umumnya dahulu di Sulawesi Tengah sebelum datangnya pengaruh agama Islam dan Kristen kepercayaan yang dianut adalah pemujaan arwah/roh-roh. Di Poso kaum wanita merupakan penghubung dengan dunia roh yang disebut *Wurake*. Dunia roh terdapat di ruang angkasa antara bumi dan langit. Oleh sebab itu semua anak gadis mengalami suatu upacara inisiasi, di mana gadis-gadis itu dihubungkan dengan dunia roh.

Menurut Yan Kruijt dalam bukunya "Kabar Keselamatan di Poso", suku-suku pedalaman Poso (pada saat Zending mulai tiba di sana), menganut kepercayaan pada kuasa tanpa wujud (semacam dewa) disebut *Lamoa* yaitu kuasa roh-roh baik para bapak leluhur yang di per dewakan maupun roh-roh alam dan penguasa (dewa) langit. Dalam pengertian *Lamoa* ada ingatan kepada seluruh ruang cakrawala dan ruang angkasa sebagai suatu kehampaan besar yang diisi dengan kuasa yang tidak kelihatan. Kuasa itulah yang menentukan hidup matinya manusia, binatang serta tumbuh-tumbuhan¹).

Selanjutnya mereka percaya adanya susunan hirarkhi dalam dunia roh (dewa-dewa) yang tertinggi disebut *Lai* tinggal di atas dan *Ndara* (wanita). Menurut mitos, karena *Ndara* berbuat sumbang maka dihukum buang ke bawah melalui kawat tembaga. Ketika *Ndara* menyentuh permukaan air laut, busa laut menempel padanya lalu menjadi bumi. Makin lama bumi tersebut makin besar dan melebar lalu ditumbuhi pohon-pohonan. Itulah sebabnya dalam upacara memulai sesuatu kerja atau pesta syukuran mereka menyeru dan memohon kepada penguasa di atas dan di bawah (bumi).

Kuasa yang dikenal oleh semua orang disebut *Pue Mpala-*

buru, yang menjadikan manusia. Ia tinggal di tempat terbit dan terbenamnya matahari di seantero kubah langit yang diterangi-nya. Karenanya setiap upacara-upacara suci di Poso selalu menghadap ke arah matahari terbit atau dapat dikatakan adanya pemujaan pada matahari. Kepercayaan ini diturunkan kepada anak-anak melalui ajaran dari orang tua masing-masing.

2. Adat Sopan Santun.

Sejak anak-anak masih kecil sudah dididik untuk mengenal adat sopan santun. Melalui petunjuk/ceritera-ceritera orang tua meneruskan pengetahuan tentang adat sopan santun kepada anak-anaknya. Perbuatan apa saja yang secara adat boleh dilakukan dan yang dilarang diajarkan kepada anak-anak. Kalau terjadi pelanggaran adat maka sipelanggar akan dihukum denda secara adat. Jenis dendanya tergantung dari berat ringannya pelanggaran yang dilakukan dan hukumannya diputuskan melalui musyawarah para tua-tua adat.

3. Pengobatan

Segala jenis penyakit dianggap penyebabnya karena gangguan roh, sehingga penyembuhannya pun melalui dukun yang dapat mengadakan meditasi dengan roh. Di daerah Poso dukun-dukun terdiri dari wanita yang disebut *sando* (syaman). Melalui bantuan roh-roh pengobatan pada si sakit dilakukan. Ada kalanya harus memakai sesajen pada roh ada pula melalui ramuan daun-daunan atau akar kayu, tergantung dari petunjuk roh kepada dukun.

Supaya terhindar dari gangguan roh maka anak-anak dididik melalui larangan membuat kesalahan atau melakukan apa yang tak disenangi roh-roh maksudnya agar roh tak marah kepadanya. Upacara Pengobatan dengan meminta bantuan kepada roh ini di Kabupaten Donggala disebut *Balia*.

Tentang upacara *Balia* ini, si sakit harus menyiapkan diri menerima kehadiran makhluk-makhluk halus (roh). Datang tidaknya roh itu ada kalanya tergantung pada bunyi pukulan gong, gendang dan seruling. Karena itu bunyi-bunyian tadi harus bersemangat dan dukun bersama si sakit melakukan tarian sampai kesurupan. Upacara tersebut dipimpin oleh seorang dukun tua yang digelar *Tina Nu Balia* yang membacakan mantera-manteranya.

Di Kabupaten Donggala dikenal dua macam Balia yaitu: *Balia Tampilangi* dan *Salonde*. Balia Tampilangi adalah cara mengobati penyakit yang berat. Pengobatan ini dilakukan dengan menari-nari di atas bara api diiringi gendang dan nyanyian yang disebut *wadi*. Jabatan orang yang memukul gendang digelar *Bule*. Apabila dukun sudah kesurupan maka roh halus telah datang mengadakan pengobatan melalui si dukun.

Salonde adalah juga pengobatan dengan bantuan roh halus, di situ si dukun dan anak buahnya menyanyi diiringi pukulan gendang. Lagunya disebut *Ndolu*. Dengan iringan lagu dan gendang, si dukun menari di atas barang tajam, umpamanya parang dengan bagian yang tajam menghadap ke atas. Kadang-kadang perutnya diiris dengan benda tajam tanpa ia merasa sakit atau luka. Dalam keadaan demikian si dukun mengobati si sakit.

Ada pula pengobatan dengan cara membawa seperangkat sirih pinang, tombak dari kayu yang dilingkari garis-garis kuning dan hitam dan parang, ke tempat mula-mula si sakit mendapat penyakitnya umpamanya di sungai atau di pohon-pohon besar. Ke tempat itulah sajian-sajian tadi diletakkan oleh orang tua si sakit sambil diiringi kata-kata: "*Ragi si miu weago anepe ijori teanganau jari semama ini rapo mbosino. Jadi nimo te agar inta newe nau risita ailanga.*" (artinya: Barangkali kamu penghuni air yang menyebabkan penyakit anak saya, jadi kami minta supaya disembuhkan. Inilah bahagian kamu yang kami berikan).

4. Kerajinan dan Teknologi

Dalam bidang kerajinan dan teknologi, diketahui bahwa orang-orang pada zaman dahulu membuat kerajinan tangan dengan teknologi yang sangat sederhana. Hal ini dilakukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari antara lain membuat alat penutup badan dari kulit kayu, membuat tempat menyimpan barang/makanan dari anyaman daun-daunan atau rotan, bambu dan tanah liat.

Proses pembuatan kain dari kulit kayu diajarkan secara turun temurun dari orang tua kepada anak-anaknya. Bahan bakunya dari kulit semacam pokok kayu yang disebut *tea*. Pada saat memotong kayu ini harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Si penebang tidak boleh digigit oleh semut hitam yang besar karena apabila digigit, maka ini akan rusak.
- b. Waktu menebang dalam lingkungan itu tidak ada orang mati. Setelah kayunya ditebang mulailah kulitnya dikupas lalu direndam selama tiga hari supaya menjadi lembut. Sesudah itu kulit diletakkan di atas tatakan kayu, baru dipukul-pukul dengan alat pemukul dari batu yang disebut *ikke* supaya kulit itu melebar. Pemukulan ini melalui tiga tahap supaya menjadi tipis. Sesudah itu digosok dengan semacam buah agar menjadi lebih halus dan kuat. Untuk mewarnainya dicelup dengan ramuan rebusan semacam buah dengan kulit kayu lekatu.
- c. Sebagai wadah yang dipergunakan untuk menyimpan makanan mereka anyam daun-daunan, pohon silar, pandan, nipah dan rotan atau membuat periuk-periuk dari tanah liat. Sebagai piring makan ada yang mempergunakan daun bahkan memasak makanan di atas api, mereka menggunakan daun-daunan atau bambu. Begitu pula untuk mengambil dan menyimpan air dipergunakan bambu yang sekat ruas-ruasnya dilubangi memakai tehnik tertentu. Segala ketrampilan ini diturunkan kepada anak-anak dengan cara melihat dan menirukan.

5. Kewiraan

Untuk memperoleh ilmu kekebalan atau keberanian yang di Kabupaten Donggala disebut Ilmu kelaki-lakian atau *To Malang-gai* ada tiga caranya:

Pertama, melalui tapa.

Seseorang mencari ilmu tersebut dengan bertapa. Pada waktu bertapa datanglah makhluk halus berwujud manusia yang memberinya pengetahuan kekebalan.

Kedua, dengan cara melalui mimpi.

ketiga, dengan cara berguru secara individual pada orang yang telah memiliki ilmu itu.

B. PENGARUH AGAMA ISLAM

1. Pendidikan Islam di Masyarakat

Pengaruh agama Islam tiba di Sulawesi Tengah tidak terjadi

serentak di semua wilayah ini. Diduga daerah yang mula-mula didatangi pengaruh ini adalah kerajaan Banggai yang menerimanya dari Ternate. Diperkirakan hal ini terjadi pada akhir abad ke-16. Karena waktu itu kerajaan Banggai merupakan salah satu wilayah dari Ternate, sedangkan Ternate sendiri sudah merupakan kerajaan Islam di samping itu juga berperan sebagai salah satu pusat perdagangan rempah-rempah yang dikunjungi oleh para pedagang Islam. Dalam sejarah Banggai dikatakan bahwa kira-kira tahun 1580 datang seorang putra Jawa bernama Adi Cokro yang oleh rakyat Banggai dikenal dengan nama Mumbu Doi Jawa. Mumbu Doi Jawa ini dianggap sebagai pendiri kerajaan Banggai beristeri tiga orang, isteri pertama bernama Nurusupa adalah puteri sultan Ternate, isteri kedua puteri raja Singgolok dan ketiga adalah puteri Babulao. Dari isteri kedua yang merupakan puteri dari salah satu wilayah kerajaan Banggai bernama kerajaan Singgolok diperoleh seorang putera yang diberi nama Abu Kasim²). Nama ini sudah menunjukkan pengaruh Islam.

Kapan mula pertama dan siapa pembawa ajaran Islam yang pertama ke Sulawesi Tengah sampai sekarang belum ada kesempatan karena belum ditemukannya atau tidak adanya peninggalan sejarah yang dapat dijadikan pegangan. Datangnya pengaruh ajaran Islam ke Sulawesi Tengah tidak begitu mengubah proses pendidikan dan masih tetap seperti masa-masa sebelumnya yaitu berbentuk pendidikan dalam lingkungan keluarga. Hanya saja untuk pelajaran mengaji sudah ditempuh cara-cara murid mencari guru. Kadang-kadang rumah guru yang dijadikan tempat mengaji bersama-sama adakalanya pula guru yang dipanggil ke rumah seorang tokoh masyarakat yang sudah memeluk agama Islam, untuk mengajar mengaji anak-anak keluarga tersebut. Imbalan terhadap guru mengaji ini tergantung dari kerelaan orang tua murid-muridnya. Adakalanya dibayar dengan tenaga si murid membantu gurunya mengambil air atau kayu api, ada pula dengan cara memberikan imbalan berupa benda tergantung pada kemampuan orang tua si anak.

Sistem yang dipakai dalam mengajar mengaji ini adalah

2). Memori BKDH Kabupaten Banggai, 1973, halaman 1.

sistem meniru dan menghafal, guru yang duduk menghadapi murid-muridnya membaca lalu diikuti murid bersama-sama meniru apa yang dibaca oleh gurunya. Mula-mula mengeja huruf demi huruf dengan tanda bacanya lalu kata demi kata dan terakhir diajar membaca dengan berlagu.³⁾ Ejaan yang dipakai adalah ejaan dalam bahasa Bugis.

Dalam pengajian ini murid-murid hanya diajar membaca, tidak diajar menulis. Istilah mengajar seperti ini di Kabupaten Donggala disebut mengaji/panuntu. Lama kelamaan dengan adanya bangunan mesjid/surau maka mulai pulalah pengajaran mengaji ini dilaksanakan di mesjid/surau setempat.

Bagi orang dewasa untuk memperdalam pengetahuannya secara insidental apabila ada seorang ulama datang dengan perahu dari luar daerah, maka mereka secara beramai-ramai mendatangi ulama itu untuk mempelajari syari'ah agama/Rukun Iman dan Rukun Islam. Di samping itu ada pula yang belajar tarikat dan tasawwuf. Sebagai imbalan jasa orang-orang yang belajar tadi memberikan sumbangan berupa benda sesuai kemampuan masing-masing.

Pemberian pengajaran dilakukan secara ceramah pada waktu malam setelah selesai sembahyang magrib sampai subuh yang umumnya guru-guru tadi dari daerah Bugis (Sulawesi Selatan) sehingga harus memakai juru bahasa. Proses pengajaran ini hanya berlangsung selama ulama tadi berada di Sulawesi Tengah dan berakhir kalau sang ulama pulang ke daerah asalnya. Media lain yang dipakai sebagai tempat berda'wah adalah apabila ada pesta-pesta kawin atau kematian. Di situ para mubaligh mengadakan ceramah-ceramah agama kepada yang hadir.

- a. Dengan datangnya pengaruh agama Islam maka mulai pulalah hukum agama (syari'ah) dipraktekkan dalam kehidupan masyarakat pemeluknya terutama pada perkawinan (akad nikah), penguburan (dari cara-cara memandikan dan mengkafani dan menyembayangi mayat sampai ke pembacaan talqin), hukum warisan, khitanan dan sebagainya. Di samping menjalankan ibadah sembahyang lima waktu.
- b. Dalam bidang astronomi, berkembang apa yang disebut Katika atau palakiah, yaitu ilmu nجوم dengan memper-

3). Wawancara dengan Haji Jusuf Datuamas, Kepala P dan K kecamatan Baolan Kabupaten Buol Toli-Toli.

hitungkan letak bintang-bintang di langit Ilmu perbintangan ini juga dipakai sebagai patokan saat pengolahan tanah, pelayaran dan sebagainya.

- c. Bidang pengobatan pun mendapat pengaruh, yaitu dukun-dukun yang sudah memeluk agama Islam memakai jampi-jampi dengan ayat-ayat Qur'an atau bahasa Arab atau ada juga dengan menulis huruf Arab di kertas kemudian kertas ini direndam dengan air lalu diminumkan pada si sakit, waktu mengambil ramuan-ramuan obat membaca salawat tiga kali dan sebagainya.
- d. Dalam bidang ilmu bela diri ada pula guru-guru agama yang datang ke Sulawesi Tengah melengkapi ajaran-ajaran agama yang diajarkannya dengan mengajarkan silat atau kuntau. Tapi ilmu bela diri ini diajarkan secara perorangan bagi yang berminat.

2. Tokoh-tokoh Guru

Oleh karena wilayah Sulawesi Tengah menerima pengaruh Agama Islam tidak dalam waktu yang sama, maka di beberapa tempat dikenal beberapa orang tokoh guru atau pembawa ajaran agama ini yang umumnya sudah menjadi tokoh legenda.

Di Kabupaten Donggala dikenal orang tokoh guru besar yaitu di Palu dan sekitarnya terkenal tokoh *Dato Karama* (Datuk Keramat) yang nama aslinya Abdullah Raqie. Kedatangan tokoh ini dianggap sebagai pembawa ajaran Islam yang pertama ke Kaili. Tokoh ini menjadi tokoh legendaris yang memiliki ke-saktian. Menurut riwayatnya tokoh ini berasal dari Minangkabau dan putrinya yang bernama Ince Dingko kemudian kawin dengan keluarga raja-raja Kaili. Tentang tokoh ini tidak banyak yang diketahui tentang pemikiran dan hasil karyanya. Yang jelas masyarakat mengeramatkannya dan kuburannya sekarang dapat dilihat di kampung Lere di Kota Palu menjadi tempat yang ramai diziarahi orang.

Di Parigi dikenal seorang tokoh guru yang bergelar *Dato Mangaji* yang dianggap pembawa pertama ajaran ini pada raja Parigi yang bernama Magau Jango kemudian bernama Ma'ruf setelah masuk Islam. Dato Mangaji dikenal juga dengan nama Tori Agama, kuburannya terdapat di dekat istana Parigi.

Di bekas kerajaan Tawaeli dan Toribulu dipercayai oleh masyarakat setempat bahwa yang menyebarkan ajaran Islam

adalah orang-orang (mubaligh) dari Mandar. Di Tawaeli dikenal nama *Daeng Kondang* atau *Pue Bulangisi* dan di Toribulu dikenal tokoh yang bergelar *Pua Tarikati* karena membawa ajaran tarikat. Hanya saja tarikat aliran apa yang dibawanya sudah tak ada yang mengetahuinya.

Di bekas kerajaan Lambunu (Teluk Tomini) diduga ajaran Islam datang dari Ternate. Sampai sekarang masih ada disimpan di bekas kerajaan tersebut khotbah pertama yang dipercayai oleh penduduk setempat yang katanya dikirim oleh Sultan Ternate. Gulungan teks khotbah tersebut dijadikan benda keramat (arajang) di Bolano, tertulis dalam huruf dan bahasa Arab.

Di kerajaan Buol dahulu diduga ajaran Islam pertama datang dari Ternate, dan kemudian lebih berkembang lagi dengan datangnya orang-orang Bugis dari Sulawesi Selatan yang sudah memeluk agama Islam. Dalam sejarah Buol diketahui rajanya yang bernama Eato Muhammad Tahir bergelar Sultan berkuasa pada kurang lebih 1540–1545. Berdasarkan nama dan gelarnya ini maka dapat diduga selambat-lambatnya pada masa pemerintahannya ajaran Islam sudah tiba di Buol dari Ternate. Hal ini diketahui karena adanya persahabatan antara Sultan Eato dengan Sultan Hairun dari Ternate. Bukti dari adanya persahabatan ini ialah adanya tongkat berkepala emas yang di hulunya ada tulisan huruf Arab berbunyi Sultan Ternate. Walaupun Islam diduga sudah tiba pada abad ke-16 di Buol tapi tokoh guru yang terkenal di sana ini adalah seorang Arab bernama Syarif Mansur. Syarif Mansur ini adalah putra hasil perkawinan Syarif Ali dengan putri bangsawan Buol yang bernama Saeran. Syarif Mansur ini adalah salah seorang tokoh guru agama Islam yang gigih menyiarkan agama Islam dan memiliki jiwa patriotisme menentang datangnya penguasaan penjajahan Belanda. Tokoh ini wafat di Manado dalam usahanya menyebarkan ajaran Islam ke Manado sambil mengadakan perlawanan bersenjata melawan Belanda di Manado.

Tokoh guru lainnya yang dikenal di Luwuk Daratan (jasirah Luwuk) di Mendono kecamatan Kintom adalah Muhammad bin Abdullah bin Al Hasni atau populer dengan nama lainnya Mohammad Abdullah bin Djaelani.

Menurut informasi orang tua-tua setempat, Islam mula pertama masuk ke Mendono karena adanya hubungan dengan raja Bone (Sulawesi Selatan) pada zaman pemerintahan kepala suku bernama Tutumasoa. Pengganti Tutumasoa adalah *basa'nyo*

(raja) Hasyim yang bergelar *Mea Mata* (Mata merah). Di zaman pemerintahan basa'nyo Hasyim inilah pertama kali didirikan mesjid Mendono yang mihrabnya masih ada tersimpan sampai sekarang bertarikh 1235 Hijriah.

Tokoh guru Abdullah bin Djaelani ini sering datang memberikan pelajaran agama Islam bertempat di mesjid Mendono. Tokoh ini dikeramatkan dan dalam memberikan da'wahnya sering menghilang, kadang-kadang muncul di berbagai tempat yang berjauhan dalam waktu yang singkat seperti muncul di Mendono kemudian muncul pula di Kendari (Sulawesi Tenggara) pada hari yang sama. Peninggalan tokoh ini adalah apa yang disebut Peta Alam, selembur gulungan kulit unta bertuliskan huruf Arab Melayu kira-kira lima meter panjangnya yang sekarang disimpan di rumah keluarga Haji A.K. Muid di Mendono. Peta Alam ini merupakan cerita tentang proses kehidupan manusia dari awal kejadiannya sampai meninggal dunia dan kehidupan roh setelah meninggal semuanya berbentuk gambar-gambar. Kemudian gambar-gambar tersebut diberi penjelasan tertulis dengan memakai huruf Arab Melayu tapi tidak bertarikh.⁴⁾

4). Informasi Haji M.K. Muid di Mendono Kecamatan Kintom Kabupaten Luwuk tanggal, 27 Oktober 1980.

BAB III

PENDIDIKAN BARAT

A. PENGARUH PORTUGIS

1. Kekuasaan Portugis

Menurut ceritera dari para orang tua dahulu, sebelum datangnya bangsa Portugis dan Spanyol pernah datang ke daerah Sulawesi Tengah bangsa Belanda. Hal ini dapat dibenarkan dengan adanya naskah tertulis yang dibuat oleh seorang penulis Belanda terkenal bernama Dr. Albertus Christian Kruyt dalam bukunya berjudul "*De West Toraja's op Midden Celebes*".

Pada abad ke-17 orang Spanyol mempunyai sebuah faktori di Parigi. Dalam tulisan tersebut tidak begitu jelas faktori apa yang dimaksud. Tahun 1663 mereka meninggalkan Parigi karena tidak mendapatkan beras lagi dari Ternate.¹⁾ Bangsa Spanyol ini juga diperkirakan membangun sebuah benteng di Parigi. Di mana tempat benteng ini dibangun tidak begitu dikenal lagi oleh orang-orang yang hidup sekarang ini. Diperkirakan kampung yang sekarang bernama Loji di Parigi kemungkinan di situlah benteng tersebut didirikan.

Selain apa yang disebutkan di atas masih banyak lagi hal-hal yang dapat dijadikan bukti bahwa bangsa Portugis pernah bermukim di daerah Sulawesi Tengah ini. Di antaranya adalah diketemukannya meriam-meriam milik Portugis pada beberapa tempat seperti di Donggala, Parigi, Banggai, Luwuk dan sebagainya. Di Kecamatan Banggai kepulauan) masih dapat dilihat sekarang ini bekas sebuah benteng Portugis di tepi pantai, di dalamnya orang telah banyak membangun rumah tempat tinggal mereka.

Juga di daerah Kabupaten Banggai ini diketemukan topi yang pernah dipakai oleh tentara Spanyol berperang pada waktu dulu. Topi tersebut dapat dilihat sekarang ini di Gedung Museum Palu atau pada keluarga Drs. Lahmadi Mangas di Luwuk. Juga di rumah keluarga tertentu di daerah Banggai banyak diketemukan meriam tembaga dalam berbagai macam ukuran yang menurut mereka adalah meriam Portugis.

1). Drs. J. Visser dan Ny. S. Kadoawu BA, *Sejarah Kebudayaan suku-suku di Sulawesi Tengah*, Lembaga Penelitian Studi GKST, Tentena 1978. Halaman 3.

Menurut informasi dari Bapak Cornelis Sapa, Penilik Kebudayaan Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, mengatakan suku terasing, Khoumama'on yang mendiami daerah pegunungan Lingketeng, Kecamatan Bunta, adalah keturunan Portugis. Ciri badan mereka adalah tinggi, besar, hidung mancung kulit putih, sebahagian rambutnya pirang, pelipis menonjol dan mukanya memanjang (bentuk tubuhnya jangkung).

Di daerah Linketeng ini banyak juga diketemukan benda-benda peninggalan Portugis seperti topi perang seperti yang disebutkan di atas, meriam dan sebagainya.²⁾

2. Pendidikan Portugis (Katolik Roma).

Pada awal datangnya bangsa Portugis di daerah Sulawesi Tengah yang diperkirakan pada abad ke-17 dan sampai pada saat meninggalkan daerah ini pada tahun 1663 tak ada meninggalkan pengaruh apa pun dalam bidang keagamaan, pendidikan dan kebudayaan. Sejak saat meninggalkan daerah ini pada akhir abad ke-17 sampai pada saat datangnya bangsa Belanda akhir abad ke-19 tidak satu pun gedung sekolah yang didirikan oleh Portugis diketemukan di daerah Sulawesi Tengah.

Sekolah yang didirikan oleh organisasi Katolik Roma pertama di Sulawesi Tengah diketahui terdapat di Kabupaten Banggai pada abad ke-20 yaitu di Nulion (1933) dan bi Sambicut (1934) kedua-duanya di Kecamatan Totikum.

B. PENDIDIKAN ZAMAN VOC

1. Kekuasaan VOC

VOC sebagai suatu organisasi dagang yang usahanya semata-mata mencari keuntungan materi maka menurut riwayat mereka datang ke daerah Sulawesi Tengah untuk mencari emas. Pada tahun 1667 sudah mulai mengadakan kontak dengan penduduk yang ada di daerah lembah Palu dan sekitarnya seperti Donggala, Tawaeli dan juga di daerah Parigi dengan usaha mendekati raja-raja yang berkuasa pada masa itu. Maksud utama mereka adalah untuk mendapatkan emas sebanyak-banyaknya dari daerah ini.³⁾ Mata pencaharian penduduk daerah Sulawesi Tengah pada waktu

2). Hasil wawancara dengan Bapak *Cornelis Sapa* di Kecamatan Bunta, Kabupaten Banggai, tanggal 19-11-1977.

3). Drs. Visser dan Ny. Kadoawu BA, *op. cit.*, halaman 1.

itu terutama adalah bertani, berburu dan menangkap ikan. Pada waktu-waktu tertentu mereka banyak juga yang mencari emas sebagai mata pencaharian sambilan.

Tempat mereka mencari emas adalah di sungai-sungai yang besar di bagian hulu. Alat yang mereka gunakan adalah sejenis ayakan (tapis) dibuat dari rotan atau kulit bambu. Biji emas yang diperoleh tadi disimpan di dalam tabung-tabung buluh ayam lalu diserahkan kepada raja atau yang menjadi pimpinan kelompok pada waktu itu.

Hingga sekarang ini masih banyak diketemukan bekas tempat-tempat orang dahulu mencari emas di bagian hulu sungai-sungai besar, seperti Sungai Moutong, Sungai Taopa/Tuladenggi, Sungai Lambuno, Sungai Ongka/Malino, Sungai Tinombo, dan Sungai Tada. Tempat mencari emas tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga berbentuk kotak (benteng) yang terbuat dari susunan batu-batu (batu susun). Rupanya usaha penduduk mencari emas ini tidak berlangsung lama, kemudian habis. Setelah emas tidak ditemukan lagi maka VOC pun meninggalkan daerah ini.

Sebagai bukti bahwa VOC pernah berkuasa di daerah Sulawesi Tengah adalah dengan diketemukannya mata uang VOC yang pernah digunakan sebagai alat tukar (jual beli) di Sulawesi Tengah pada masa itu.

Di daerah pedalaman seperti Napu, Bada dan Besoa penduduk banyak juga melakukan usaha mencari emas di sungai-sungai sebagai pencaharian tambahan selain bertani memelihara kerbau dan memelihara ikan di kolam-kolam.⁴⁾

2. Pendidikan Untuk Warga VOC

Selama VOC berkuasa di Sulawesi tengah tidak ada pengaruh yang ditinggalkannya setelah pergi dari sini. Baik pengaruh di bidang agama pendidikan maupun kebudayaan.

Jadi VOC tidak meninggalkan sama sekali lembaga pendidikan di Sulawesi Tengah, baik lembaga pendidikan khusus disediakan bagi warga VOC maupun untuk rakyat pada umumnya.

C. PENDIDIKAN ZAMAN HINDIA BELANDA (ABAD KE-19)

4). Hasil wawancara dengan Bapak S. Kabo di Palu pada tanggal 5 Nopember 1977.

C. PENDIDIKAN ZAMAN HINDIA BELANDA (ABAD KE-19)

Pada tanggal 18 Pebruari 1892 Dr. Albertus Christian Kruyt tiba di Poso diantar oleh Asisten residen Gorontalo, Baron Van Hoevel, dengan menumpang kapal gubernemen "De Raaf".

Dr. A.C. Kruyt diutus oleh organisasi *Nederlandsche Zendingen Genootschap* (NZG = Perserikatan Utusan-Utusan Injil Belanda) untuk menyebar-luaskan agama Kristen Protestan di Sulawesi Tengah dengan mengambil tempat di daerah Poso (Tentena) sebagai pusatnya.

Kruyt memilih Tentena sebagai pusat karena penduduk pedalaman pada waktu itu masih memeluk agama asli (dinamisme-animisme) sedangkan penduduk yang mendiami daerah pantai (*Wingkem Poso* = Poso Pesisir) telah memeluk agama Islam.

Dalam usahanya menyebar-luaskan agama Kristen Protestan di daerah Poso ini A.C. Kruyt mendirikan sekolah-sekolah. Pada bulan Juli 1894 Kruyt mendirikan sekolah di Pantai dengan guru pertama bernama Kolondan (dari Minahasa). Kolondan bersama istri ditempatkan pada sebuah rumah yang khusus disediakan untuk mereka.

Pada bulan Oktober 1894 dibuka lagi sebuah sekolah di *Tomasa* dipimpin oleh guru Kaligis (juga dari Manado) dan tidak lama kemudian dibuka pula sebuah sekolah di Buyumboyo (Bukit Bambu) dipimpin oleh guru bernama Sekeh. Sekolah-sekolah yang didirikan pada tiga tempat tersebut di atas, pada saat mulai dibuka belum berjalan sebagaimana mestinya.

Sekolah-sekolah ini berjalan dengan baik sekitar tahun 1897.

Fungsi sekolah pada waktu itu selain sebagai tempat belajar mendapatkan ilmu pengetahuan membaca, menulis dan berhitung juga berfungsi sebagai rumah ibadah (gereja). Guru-gurunya pun selain sebagai guru sekolah juga sebagai pendeta (guru injil).

Pada tanggal 18 Maret 1895 Dr. Adriani datang untuk pertama kalinya di Poso. Beliau adalah seorang ahli bahasa sehingga dengan datangnya Dr. Adriani ini Dr. A.C. Kruyt mendapat teman yang baik sekali untuk mensukseskan usahanya. Dengan bantuan Dr. Adriani diterjemahkanlah ajaran-ajaran agama Kristen dari buku Injil (Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru) ke dalam bahasa Bare'e (Pamona) untuk mempermudah orang-

orang di daerah Poso nempelajari Agama Kristen.

Pada tahun 1902 selesailah diterjemahkan ceritera-ceritera Perjanjian Baru dan pada tahun 1906 selesai pula diterjemahkan ceritera-ceritera dari kitab Perjanjian lama.⁵⁾

5). Jan Kruyt; *Kabar Keselamatan* di Poso, BPK Gunung Mulia, Jakarta Pusat Jakarta, halaman 100, 102, 108, 114.

BAB IV

PENDIDIKAN PADA ABAD KE-20

A. PENDIDIKAN PEMERINTAH HINDIA BELANDA

Usaha bangsa Belanda untuk mendirikan sekolah-sekolah guna mencerdaskan bangsa Indonesia adalah sejalan dengan keinginan politik kolonialnya yang ingin mengeruk dan mengambil kekayaan bangsa dan bumi Indonesia untuk kepentingan negaranya. Baik itu kekayaan material berupa hasil bumi seperti hasil perkebunan, kehutanan, pertambangan dan sebagainya mau pun kekayaan imateril berupa hasil-hasil budaya bangsa seperti adat istiadat, bahasa, kesenian dan lain-lain.

Tujuan utama pemerintah Belanda mendirikan sekolah-sekolah adalah untuk mendidik rakyat menjadi pandai tulis, baca dan dapat dijadikan tenaga pekerja (pegawai) murah di Indonesia umumnya di Sulawesi Tengah khususnya dan dimanfaatkan pemerintah Belanda untuk mencapai tujuan politik kolonialnya sebagaimana disebutkan di atas.

Sulawesi Tengah sebagai suatu wilayah Indonesia bagian Timur nanti sempat dimasuki Belanda pada akhir abad ke - 19 dan permulaan abad ke - 20. Mereka yang datang pada akhir abad ke- 19 itu adalah para sarjana Belanda ahli ilmu bangsa-bangsa (sosiolog dan antropolog) seperti Dr. Albertus Cristian Kruyt (1892) dan ahli bahasa (linguist) seperti Dr. N. Adriani (1895) ke dua-duanya mula-mula tiba di Poso. Tujuan utama mereka adalah menyebarkan agama Kristen di daerah ini sebagai utusan dari *Nederlandsche Zendelings Genootschap* (NZG) yang berpusat di Negeri Belanda. Badan inilah yang kemudian setelah Belanda berkuasa diberi kepercayaan oleh pemerintah menyelenggarakan pendidikan rakyat di daerah Poso dan sekitarnya (*Resort Timini Boch*).

Bangsa Belanda yang datang pada permulaan abad ke- 20 adalah mereka yang merupakan alat pemerintahan kekuasaan Belanda dengan pangkat kontrolieur atau *civiel gezaghebber* dikawal oleh sejumlah tentara yang pada saat itu disebut *serdadu kompania*.

Kedatangan mereka di daerah Sulawesi Tengah memang dipaksakan karena tujuan utama ingin menguasai sebab dengan jalan menguasai daerah ini mereka bebas mengeruk dan mengambil kekayaan alamnya tanpa mendapat rintangan dari siapapun juga. Para raja dan rakyat yang menentang masuknya kekuasaan Belanda di daerah ini satu demi satu dapat ditaklukkan dengan keampuhan politik *divide et impera*. Di tempat-tempat di mana ada raja bersama rakyatnya menentang, Belanda berusaha mendekati dan menarik hati keluarga atau saudara dari raja yang menentang tadi yang juga mempunyai pengikut-pengikut yang setia. Dengan janji-janji yang memikat hati jika Belanda berkuasa, maka saudara dari raja-raja yang menentang ini bersama para pengikutnya mulai berhati busuk kepada saudaranya sendiri. Akhirnya mereka bersama pengikutnya mau diperalat oleh Belanda menjadi pembantu memerangi dan melawan saudaranya sendiri. Dengan jalan demikian ini maka dengan mudah Belanda menanamkan kekuasaannya di Sulawesi Tengah.

Karena penaklukkan Belanda terhadap daerah-daerah di Sulawesi Tengah tidak bersamaan waktunya, maka pendirian sekolah-sekolah oleh pemerintah Hindia Belanda di daerah ini (Sulteng) berbeda-beda pula waktunya. Sebelum menguraikan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada saat-saat mulai berkuasa sampai masa datangnya pemerintah militer Jepang bahkan sampai pada Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 di Sulawesi Tengah hanya terdapat sekolah-sekolah pemerintah yang menyelenggarakan pendidikan rakyat sebagai berikut:

1. Sekolah Desa berkelas 3, disebut *Volkschool* (VS) kemudian berubah menjadi *Bestuur Volkschool* (BVS).
2. Sekolah Desa berkelas 4, disebut *Inlandsche Standaard School* (ISS).
3. *Vervolgschool* (sekolah sambungan) terdiri dari dua kelas yaitu kelas 4 dan 5. Sekolah ini merupakan tempat melanjutkan anak-anak yang telah menamatkan pelajarannya di kelas 3 (*Volkschool*). Pada umumnya *Vervolgschool* ini terdapat di Ibu Kota kerajaan.
4. Sekolah Desa kelas II (Sekolah Gubernemen kls. II) berkelas 5, di mana penyelenggaraan pendidikan mulai dari Kelas I s.d kelas 5 bertempat di gedung yang sama.

5. *Volks Onderwijzer* (VO) yang kemudian berubah menjadi *Cursus Volks Onderwijzer* (CVO). Sekolah ini merupakan sekolah kejuruan, yaitu tempat mendidik calon-calon guru sekolah desa baik yang berkelas 3, berkelas 4 dan yang berkelas 5. Lama pendidikan berlangsung dua tahun sesudah tamat kelas 5. Yang menjadi guru pada VO/CVO ini adalah kepala Sekolah *Vervolgschool* yang pada umumnya mereka itu adalah tamatan *Kweekschool Ambon*, *Kweekschool Kaluwatu* di Sangir Talaud atau tamatan *normaalschool* (NS) di Makassar.

Selain sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda yang bersifat umum banyak pula sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi-organisasi swasta yang bersifat khusus keagamaan seperti organisasi *Nederlandsche Zendelings Genootschap* (NZG) berpusat di Tentena (Poso), *Indische Kerk di Luwuk*, *Leger Des Heils* (LDH) atau lebih dikenal dengan sebutan Bala Keselamatan (BK) di Lembah Palu dan sekitarnya Roma Katolik di Luwuk (Sambiut) yang kesemuanya berusaha menyebar-luaskan ajaran Kristen di Daerah Sulawesi Tengah ini.

Organisasi swasta lainnya yang juga banyak mendirikan sekolah-sekolah yang bersifat khusus keagamaan yaitu SI yang kemudian menjadi PSII, Muhammadiyah, Nahdatussyafiiyah kemudian berubah menjadi Nahdatul Ulama dan Organisasi Alkhairat. Semua organisasi tersebut kemudian ini berusaha meningkatkan mutu pengetahuan dan menyebar-luaskan agama Islam melalui pendidikan bagi pemeluknya melalui sekolah-sekolah dengan menggunakan administrasi yang lebih teratur sesuai dengan kemajuan zaman. Di samping menyelenggarakan pendidikan khusus keagamaan semua organisasi swasta yang di sebutkan di atas baik yang Kristen maupun Islam juga menyelenggarakan sekolah-sekolah yang bersifat umum yang kurikulumnya mengikuti kurikulum sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, hanya namanya mengikuti istilah menurut agama masing-masing.

Untuk sekolah-sekolah yang diselenggarakan oleh organisasi Islam karena selalu mendapat pengawasan keras dari pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dan ternyata para tokoh pendiri dan pengajar (guru) pada sekolah-sekolah tersebut kemudian banyak menjadi tokoh-tokoh pergerakan menentang

penjajah sebelum Jepang datang, maka penguraiannya akan ditempatkan pada sub bab. B dan bawah ini.

Selain jenis-jenis sekolah yang telah disebutkan sebelumnya masih ada jenis sekolah lainnya yaitu *HIS (Hollandsch Inlandsche School)* yang memberikan mata pelajaran bahasa Belanda kepada murid-muridnya selain mata pelajaran umum yang sama dengan apa yang diterima oleh murid-murid pada Sekolah Gubernemen kelas II berkelas 5 *Vervolgschool*. Sekolah HIS ini didirikan atas permintaan masyarakat terpelajar dan mereka yang keadaan ekonominya cukup baik guna menjadi tempat anak-anak mereka melanjutkan pelajarannya setelah tamat dari *Bestuur Volksschool* atau *Inlandsche Standaard School* bahkan ada pula mereka yang telah tamat dari *Vervolgschool* dan Sekolah Gubernemen kelas II yang masuk HIS tersebut dengan maksud khusus untuk belajar bahasa Belanda.

Yang mendirikan sekolah HIS ini adalah organisasi swasta baik dari Kristen maupun Islam ini dan pada umumnya tidak berlangsung lama kemudian ditutup karena biayanya mahal. Kecuali HIS yang didirikan dan diselenggarakan oleh *Organisatie Zending (NZG)* di Poso yang dibuka pada tahun 1971 berlangsung agak lama karena pemerintah Hindia Belanda mempercayakan penyelenggaraannya pada organisasi ini dan mendapat bantuan dari pemerintah pada tahun 1930. Sekolah ini ditutup setelah pemerintah Jepang datang dan berkuasa di daerah Sulawesi Tengah pada awal tahun 1942.

Selain HIS organisasi *Zending (NZG)* juga mendirikan Sekolah Pendidikan Guru (SPG) di Pendolo (Pamona Selatan) pada tahun 1913 yang dipimpin langsung oleh Dr. A.C. Kruyt sendiri hingga tahun 1929 dan pada tahun 1939 dipindahkan ke Tentena, Pamona Utara. Setelah di Tentena yang menjadi pimpinan Sekolah Pendidikan Guru ialah Jan Kruyt (Putera Dr. A.C. Kruyt), sampai Jepang datang tahun 1942.

1. Pengaruh Politik Etika (Sekolah Desa)

Kita semua telah mengetahui maksud dan tujuan politik etika pemerintah Hindia Belanda, yaitu memperbaiki taraf hidup rakyat Indonesia dengan jalan mencerdaskan rakyat melalui pendidikan di sekolah-sekolah, memperbaiki ekonomi dengan membangun irigasi-irigasi (pengairan) dan berusaha memin-dahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang masih

kurang penduduknya (transmigrasi) dengan tujuan pokoknya guna mendapatkan tenaga buruh murahan di daerah-daerah perkebunan yang baru dibuka oleh usaha swasta Belanda. Maksudnya untuk meningkatkan taraf hidup bangsa Indonesia tetapi sebaliknya bangsa Belanda akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena dengan dibukanya daerah-daerah produksi baru dengan jalan membangun sekolah-sekolah pembukaan sawah-sawah baru dengan membangun irigasi dan pemindahan penduduk (transmigrasi), keuntungan materialnya makin banyak; mereka (Belanda) dapatkan dari tanah air tercinta ini melalui peraturan-peraturan yang sangat mengikat. Segala macam jenis pajak dikeluarkan untuk mendapatkan keuangan dari kantong rakyat dan lain-lain sebagainya.

Khususnya dalam usaha pemerintah Hindia Belanda mencerdaskan rakyat Indonesia dengan membangun sekolah-sekolah guna mendapatkan tenaga kerja (buruh) murahan membantu Belanda dalam pekerjaan-pekerjaan tertentu, di Sulawesi Tengah usaha ini pun dilakukannya.

Di daerah Sulawesi Tengah pemerintah Hindia Belanda mulai membangun sekolah-sekolah bagi rakyat di tempat-tempat yang telah dikuasainya. Penguasaan Belanda terhadap daerah ini pada awal abad ke-20 tidak bersamaan waktunya. Oleh sebab itu pendirian sekolah-sekolah di daerah-daerah Sulawesi Tengah yang sekarang meliputi empat Kabupaten masing-masing Kabupaten Buol Toli-Toli, Donggala, Poso dan Luwuk berbeda-beda pula waktunya.

Daerah Poso (Kab. Poso) adalah daerah yang pertama sekali dikuasai oleh Belanda dengan menempatkan seorang kontrolieur pertama di daerah ini pada tanggal 5 September 1894 yang berkedudukan di Mapane ibu kota Kecamatan Poso Pesisir sekarang. Mulai tanggal 1 Maret 1895 kedudukan kontrolieur dipindahkan dari Mapane ke Poso. Pada tahun 1901 Tuan Enggelenberg datang di Poso, sebagai seorang kontrolieur negeri Poso menggantikan kontrolieur pertama yang namanya tidak disebutkan. Pada tahun 1905 Tuan Enggelenberg dipindahkan ke Donggala dan menjadi asisten residen pertama untuk afdeling Donggala (Sulawesi Tengah) pada waktu itu.¹⁾

1) Jan Kruyt: *Kabar Keselamatan di Poso*, BPK Gunung Mulia Jakarta Pusat, 1977, Hal.101, 142, 143.

Belanda menguasai daerah Buol (Kab. Buol Toli-Toli) pada tahun 1896 dengan penempatan Dr. H. Siber sebagai kontroliur pertama di Buol yang memerintah dari tahun 1896 – 1898.²⁾ Dua daerah lainnya yaitu masing-masing Donggala (Kab. Donggala) dapat dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun ± 1904 setelah perlawanan Malonda dari Gunung Bale dipatahkan dan daerah Luwuk (Kab. Banggai) dikuasai Belanda pada tahun 1908 setelah Belanda dapat mematahkan perlawanan Laginda dan para pengikutnya.

Setelah pemerintah Hindia Belanda menguasai sepenuhnya keempat daerah disebut di atas ini mulai mereka mendirikan sekolah-sekolah di tempat-tempat tersebut.

- a. Pada tahun 1903 pemerintah Hindia Belanda mulai mendirikan sebuah Sekolah Desa berkelas 4 di Roji (Buol) dengan guru yang mengajar pertama adalah M. Biga dari Gorontalo.³⁾ Buol waktu itu masih bagian dari Wilayah Pemerintah Afdeling Gorontalo.
- b. Pada tahun 1904 sebuah Sekolah Desa berkelas 3 didirikan oleh Pemerintah Belanda di Saatu, Poso Pesisir. Selama kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Poso hanya sebuah sekolah desa negeri milik pemerintah yang ada yaitu di Mapane (Saatu), lainnya adalah sekolah-sekolah desa milik Zending. Pada tahun 1904 itu juga sekolah desa pertama milik Zending didirikan di Pandiri.⁴⁾ Guru yang mengajar pertama pada sekolah desa berkelas 3 di Saatu itu tidak diketahui namanya, dan pada umumnya guru-guru yang mengajar di daerah Poso hingga tahun 1916 kebanyakan berasal dari Manado.⁵⁾
- c. Pada tahun 1905 pemerintah Belanda mendirikan Sekolah Desa berkelas 3 di Labuan Bajo, Donggala. Pada tahun itu juga sekolah desa berkelas 3 didirikan pula di kampung Loji, Parigi. Guru-guru yang mengajar pertama pada kedua sekolah tersebut tidak diketahui lagi namanya oleh orang-orang yang

2) T. Kawandaud: *Tambo dan Sejarah Buol*, Drukkery Annaser 1949, Gorontalo, Hal.69.

3) T. Kawandaud: *op.cit.*, Hal. 65.

4) Wawancara dengan Bapak W.L. Talasa di Poso Tgl. 15-11-77.

5) Jan Kruyt, *op. cit.*, Hal. 253.

hidup sekarang. Sekolah yang dibangun di Donggala tahun 1905 itu, pada tahun 1915 ditingkatkan menjadi Sekolah Dasar berkelas 4 dengan guru-guru yang mengajar pada saat itu antara lain Muhammad (kepala sekolah) dibantu oleh guru Abi Muhammad, Dunggio, Abdul Kadir dan Mauuti Saleh kesemuanya berasal dari Gorontalo.⁶⁾

- d. Pada tahun 1909 pemerintah Belanda mendirikan sebuah Sekolah Desa berkelas 3 di Lobu, Kecamatan Pagimana dan sebuah Sekolah Desa berkelas 4 di Lompio, Kecamatan Banggai (kepulauan).

Guru pertama yang mengajar pada sekolah berkelas 3 di Lobu itu bernama Johan Lumentut dari Minahasa, nenek dari Drs. Amir Lumentut, Kepala Sub. Bidang Personalia pada Kanwil Dep. P dan K. Propinsi Sulawesi Tengah saat ini. Guru yang mengajar pertama pada sekolah desa berkelas 4 di Banggai tidak diketahui lagi namanya.

2. Pendidikan Dasar

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa sejak pemerintah Belanda berkuasa di daerah Sulawesi Tengah pada akhir abad ke-19 sampai saat datangnya kekuasaan militer Jepang awal tahun 1942 jenis-jenis sekolah dasar yang ada yaitu:

- a. Sekolah Rakyat berkelas 3 disebut *Volkschool* (VS).
- b. Sekolah Rakyat berkelas 4 disebut *Inlandsche Standaard School* (ISS).
- c. *Vervolgschool* (Sekolah Sambungan) berkelas 2, tempat anak-anak tamatan *Volkschool* kelas 3 dan tamatan *Indlandsche Standaard School* kelas 4 melanjutkan pelajarannya di kelas 4 dan 5.
- d. Sekolah Gubernemen kelas II, sekolah yang menyelenggarakan pendidikan anak-anak mulai dari kelas 1 s/d kelas 5 terdapat di Gedung Sekolah yang sama.
- e. *Volk Onderwijzer School* (Sekolah Guru Bantu), tempat mendidik calon-calon guru untuk Sekolah Rakyat 3 tahun Sekolah Rakyat 4 tahun, *Vervolgschool* dan Sekolah Guber-

6) Wawancara dengan Bapak *Tahima* di Gunung Bale, Donggala, tanggal 29 Oktober 1978.

nemen kelas II. Lama pendidikan 2 tahun setelah tamat kelas 5 dari *vervolgschool* atau Sekolah Gubernemen kelas II. sekolah kelas I yang pada tahun 1914 dirobah namanya menjadi HIS (*Hollands Inlandse School*) dengan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, pernah ada di Sulawesi Tengah diselenggarakan oleh organisasi Zending (*Nederlandsche Zending's Genootschap* = NZG) di Poso.

Jadi Sekolah HIS yang dimaksud bukanlah milik pemerintah melainkan milik swasta dan mendapat subsidi dari pemerintah sejak tahun 1930 sampai saat datangnya Jepang tahun 1942 dan pada tahun itu pulalah Sekolah tersebut ditutup.

Untuk membicarakan pendidikan sekolah dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-20; maka sekolah-sekolah milik Zending dapat dimasukkan dalam golongan ini karena kebetulan pimpinan organisasi ini adalah seorang Belanda asli, yaitu Dr. Albertus Christian Kruyt. Tentu saja sekolah-sekolah yang mula-mula didirikannya di Poso waktu itu sesuai dengan apa yang telah diketahui dan dialaminya semasih beliau bersekolah di negeri Belanda.

Selain itu banyak pula sekolah milik Zending (tadinya sebagai sekolah swasta) diubah statusnya menjadi sekolah pemerintah beberapa tahun kemudian. Di samping itu pemerintah Hindia Belanda memberi kepercayaan penuh kepada NZG untuk menyelenggarakan pendidikan sekolah dasar di daerah Poso dan sekitarnya (Resort Tomini Boch) pada waktu itu. Tuan Engelenberg yang menjadi kontrolieur di Poso (1901-1905) dengan wilayah kekuasaannya meliputi bagian selatan Teluk Tomini memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada organisasi Zending menyelenggarakan pendidikan di sekolah-sekolah yang dibangun untuk rakyat di daerah ini seperti tergambar dalam keterangan di bawah ini:

”Yang khusus pada Tuan Engelenberg ialah jalan yang ditempuhnya. Oleh karena ia yakin bahwa suatu kuasa kolonial tidak sanggup membangkitkan kepercayaan dan mempunyai kesabaran yang diperlukan untuk berhasilnya suatu pengajaran di kalangan suatu suku bangsa, yang dalam hatinya tidak menyukainya, maka tujuan Engelenberg ialah untuk mempercayakan seluruh pengajaran rendah di bagian selatan dan barat Teluk Tomini kepada Zending. Itu berarti bukan hanya pengajaran kepada orang Poso, tetapi juga kepada penduduk

pantai yang sangat bercampur dan seluruhnya Islam itu”⁷⁾

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh Zending pada akhir abad ke-19 di Poso terdapat di tiga tempat yaitu masing-masing di Panta (Juli 1894) dengan nama gurunya Kolondan, di Tomasa (Oktober 1894) nama gurunya adalah Kaligis dan di desa Buyumbayau (Bukit Bambu) pada tahun itu juga (1894) nama guru yang mengajar Sekeh, ke-tiga guru tersebut berasal dari Minahasa (Manado).

Pada tahun-tahun awal berdirinya sekolah tersebut belum berjalan dengan lancar, baru pada tahun 1897 dapat berjalan dengan lancar. Mata pelajaran yang diberikan masih sederhana sekali, yaitu membaca, menulis dan berhitung. Jadi tujuan pendidikan dan pengajaran rakyat pada waktu itu merupakan suatu pembedantasan buta huruf saja. Untuk mata pelajaran agama Kristen pada murid diajarkan ceritera-ceritera dalam Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kedua buah Kitab ini oleh Dr. Adriani diterjemahkan ke dalam bahasa Bare'e (Pamona) untuk memudahkan para murid memahami ajaran agama Kristen. Buku Perjanjian Baru selesai diterjemahkan pada tahun 1902 dan Kitab Perjanjian Lama selesai diterjemahkan tahun 1906.⁸⁾

Gedung sekolah waktu itu dwi fungsi, yaitu sebagai tempat belajar juga tempat ibadat (gereja) dan gurunya pun selain guru sekolah juga guru jemaat (guru Injil). Pembiayaan sekolah-sekolah yang dibangun itu mula-mula ditanggung oleh organisasi Zending sendiri. Yang menjadi murid adalah anak-anak yang bertempat tinggal di sekitar kampung-kampung tempat sekolah-sekolah itu didirikan. Guru-guru harus berusaha keras dengan ulet, sabar dan tekun membujuk anak-anak melalui orang tua mereka supaya mau memasuki sekolah yang baru didirikan itu.

Beberapa tahun kemudian setelah melihat hasilnya di masyarakat, rakyat meminta sendiri pada A.C. Kruyt sebagai pimpinan NZG supaya di tempat mereka didirikan pula sekolah-sekolah semacam itu. Dengan banyaknya permintaan masyarakat kepada Zending untuk mendirikan sekolah-sekolah, maka Dr. A.C. Kruyt mengabulkan permintaan itu dengan mengajukan syarat berdikari dalam penyelenggaraan sekolah-sekolah tersebut. Pada setiap pembangunan sebuah sekolah penduduk yang bersangkutan harus berjanji memikul beban-beban yang berikut:

7) Jan Kruyt, *op. cit.*, hal. 145.

8) Jan Kruyt, *op. cit.*, hal. 114.

- a. Cukup jumlah murid yang mengunjungi sekolah dengan teratur (30 – 40 orang perkelas).
- b. Pembangunan dan memelihara gedung sekolah dan rumah kediaman guru.
- c. Sumbangan gaji guru, mula-mula dalam bentuk padi yang ditentukan banyaknya dan kemudian dalam bentuk pembayaran-pembayaran berupa uang.

Orang-orang yang menggunakan suatu sekolah adalah pemilik pemilik sekolah ini dan harus menjamin bahwa sekolah ini ada dan berjalan terus.

Sekolah Rakyat yang didirikan oleh organisasi Zending untuk menyelenggarakan pendidikan rakyat secara umum sesuai dengan keinginan pemerintah Hindia Belanda dibuka tahun 1904 di Pandiri. Setelah itu menyusul pembukaan sekolah-sekolah yang sejenis ini di tempat-tempat lain yang membutuhkan. Tujuan Zending mendirikan sekolah-sekolah untuk menjadi tempat pengajaran rakyat yang murah, praktis dan sungguh-sungguh umum dengan menunjukkan perhatian dan pandangannya kepada persekutuan desa yaitu mengintegrasikan sekolah rakyat itu dalam masyarakat desa. Sebuah sekolah rakyat barulah terpenuhi tujuannya, apabila semua anak di daerah itu mempergunakannya. Sudah seharusnya dan pada tempatnya bila setiap orang dewasa tamat dari sekolah ini.

Untuk menghindari supaya murid-murid tamatan sekolah-sekolah yang didirikan itu tidak mengasingkan diri dari usaha perladangan orang tua karena pemuda-pemuda itu menganggap dirinya terlalu pintar untuk pekerjaan itu, maka pada bulan Mei 1909 Dr.A.C. Kruyt mengeluarkan suatu peraturan menetapkan bahwa sang guru bersama-sama dengan murid-murid sekolahnya mengusahakan sebidang ladang atau sawah selama waktu sekolah pada bulan-bulan waktu tiba saat pengolahan tanah. Hasilnya dibagi sama rata, sang guru mendapatkan tiga kali bagian seorang anak. Peraturan ini pada bulan Agustus 1910 dinyatakan berlaku untuk seluruh sekolah yang didirikan Zending. Setelah banyak pengaduan dan keberatan dari para orang tua murid yang tidak senang dengan peraturan tersebut, maka pada bulan Juni 1920 usaha berladang dan bersawah oleh murid-murid itu dihentikan. Pada umumnya sekolah rakyat yang diselenggarakan oleh Zending di

daerah Poso dan sekitarnya hingga tahun 1941 adalah sekolah rakyat berkelas 4 (empat tahun sekali menamatkan) yang disebut sekolah standar (*Inlandsche Standaard School* = ISS).

Karena peraturan subsidi umum dari pemerintah Belanda tahun 1941 mengatakan bahwa hanya sekolah rakyat yang berkelas 3 saja yang diberi subsidi, maka sekolah-sekolah Zending yang berkelas 4 tadi dijadikan sekolah berkelas 3 (tiga tahun sekali menamatkan). Sebenarnya sejak tahun 1924 sekolah-sekolah Zending yang berkelas 4 telah diakui sepenuhnya oleh pemerintah Belanda dan telah mendapat subsidi dari pemerintah.

Hingga tahun 1920 yang menjadi guru pada sekolah-sekolah Zending di daerah Poso terbanyak mereka yang datang dari Manado (Minahasa) yang sengaja dibawa oleh para utusan penyebar Injil untuk membantu mereka di bidang pengajaran melalui sekolah dalam usaha menyebarkan agama Kristen di daerah ini. Mereka selain sebagai guru sekolah juga sebagai guru *jemaat* (penyebar Injil) karena mereka telah lama memeluk agama Kristen.

Orang-orang Minahasa yang menjadi guru di daerah Sulawesi Tengah pada awal-awal abad ke-20 baik yang mengajar pada sekolah Zending maupun pada sekolah-sekolah pemerintah yang berkelas 3 dan berkelas 4 umumnya tamatan dari Sekolah Rakyat berkelas 5 (tamatan dari *Vervolg-School*).

Zending membuat beberapa ketentuan penting yang harus ditaati oleh setiap guru yang mengajar di Sekolahnya antara lain:

- a. Guru-guru dilarang untuk mengumumkan sesuatu kepada murid atau siapa pun tanpa sepengetahuan penyebar Injil yang ada di tempatnya masing-masing.
- b. Setiap guru harus membuat laporan setiap akhir bulan mengenai pengalaman-pengalamannya pada minggu-minggu sebelumnya dan menyampaikan kepada penyebar Injil yang ada di tempat kerjanya. Kebiasaan ini baik sekali supaya sang guru tetap memperhatikan pekerjaannya dan tidak mudah meninggalkan tugasnya.

Untuk itu para penyebar Injil yang memimpin organisasi Zending tersebut membuat pula ketentuan-ketentuan yang dapat menjamin ketentraman jiwa para guru dalam melakukan tugasnya yaitu:

Setiap guru Minahasa sesudah berdinias lima tahun dengan tak putus-putusnya, mendapat cuti tiga bulan, atas biaya Zending dan dengan memperoleh gaji penuh, untuk mengadakan kunjungan ke Minahasa, hal ini berlaku untuk dia dan keluarganya. Maksud pemberian cuti ini untuk membuat mereka jangan sampai putus hubungan dengan tanah asalnya dan keluarganya.

Peraturan cuti ini dicabut pada tahun 1938 karena semakin banyak pula di antara mereka yang sudah kawin dengan penduduk asli dan tetap tinggal di Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1935 diadakan keputusan untuk menahan 8% dari gaji semua guru untuk simpanan jaminan hari tua sebagai pensiun mereka kelak setelah tak dapat bekerja lagi. Setiap guru mendapat atas namanya masing-masing sebuah buku simpanan dari Bank Tabungan Minahasa. Bank simpanan ini pada waktu Jepang berkuasa dapat mengamankan dananya, sehingga jumlah uang pada rekening simpanan dapat dibayarkan sesudah perang.

Dalam peraturan Poso atas usul para utusan Zending kepada residen Visman di Manado pada waktu membicarakan penyusunan peraturan Poso tersebut dirumuskan dalam pasal 1 bahwa:

"Yang diartikan sebuah sekolah rakyat ialah suatu lembaga pengajaran yang sederhana yang mempunyai tujuan untuk mendidik anak-anak menjadi warga penuh dari masyarakatnya sendiri, dalam hal ini mata pelajaran-mata pelajaran seperti membaca, menulis dan berhitung ataupun latihan-latihan disiplin, ketertiban, pekerjaan dan kebersihan, sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut."⁹⁾

Melihat bunyi pasal 1 peraturan Poso di atas ini maka dapat diketahui kurikulum (mata pelajaran) yang diberikan pada sekolah-sekolah Zending berkelas 4 yaitu:

Membaca
Menulis
Berhitung
Kedisiplinan
Kerajinan
Kebersihan.

Jadi tujuan pendidikan dan pengajaran adalah menyiapkan anak-anak untuk dapat hidup dalam masyarakatnya kelak sebagai

9) Jan Kruyt, *op cit.*, Hal. 229.

seorang manusia selengkapnya. Apa yang diperbuat di sekolah ialah melatih diri untuk mempergunakan alat-alat yang diarahkan kepada pencapaian tujuan itu.

Dengan demikian maka sekolah sebagai tempat melatih diri guna mengantarkan anak-anak dalam perjalanan menuju kedewasaan untuk dapat hidup dalam lingkungannya sendiri. Zending melaksanakan pendidikan dengan tujuan kemanusiaan yang baik berdasarkan buku karangan Langeveld berjudul "*Die Schule als Weg des Kindes*" (Sekolah sebagai Jalan Untuk Anak).¹⁰⁾

Beberapa kesulitan yang dialami oleh organisasi Zending dalam menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah yang didirikannya selama masa kekuasaannya pemerintah kolonial Belanda antara lain:

- a. Pada tahun 1929 sekolah-sekolah Zending berkelas 4 itu dicabut subsidiya oleh Inspeksi Pendidikan dan Pengajaran yang berpusat di Manado. Peraturan subsidi umum (*Algemene subsidie regeling*) pada tahun 1924 menentukan bahwa hanya sekolah rakyat yang berkelas 3 yang diberikan subsidi. Pada musyawarah para utusan Zending bulan Pebruari 1941 diambil suatu keputusan bahwa semua sekolah rakyat Zending yang berkelas 4 (*Inlandsche Standaard School*) dijadikan sekolah rakyat berkelas 3 (*Volksschool*) dan mulai saat itu subsidi yang telah dicabut sejak tahun 1929 diberikan kembali sampai saat datangnya kekuasaan pemerintah Jepang awal tahun 1942.
- b. Dalam laporan Inspeksi pendidikan dan pengajaran bulan Januari 1931 dikatakan bahwa sekolah-sekolah Zending di Poso letaknya terlalu berdekatan satu sama lain seperti terlihat dalam peta sekolah milik Zending pada waktu itu. Peraturan dari Inspeksi pada waktu itu menentukan bahwa sebuah sekolah rakyat boleh didirikan di suatu tempat (desa) yang berpenduduk antara 1000 – 2000 jiwa yang dapat dikunjungi oleh anak-anak yang tinggal di sekitar desa tempat sekolah itu didirikan dengan jarak \pm 3 Km dari sekolah tersebut. Akibatnya beberapa buah sekolah kecil milik Zending tidak lagi mencapai jumlah murid minimum yang ditetapkan dalam peraturan subsidi. Sebagai contoh di distrik Sampalo-

(10) Jan Kruyt, *op. cit.*, Hal. 243-244.

wo (Kecamatan Petasia) berpenduduk belum sampai jumlahnya 6000 orang sudah memiliki 12 buah sekolah rakyat. Pengurus sekolah Zending berkeberatan menggabungkan sekolah-sekolah yang berdekatan itu karena gunanya dalam pengabaran Injil lebih penting bagi mereka.

Untuk dana dari sekolah-sekolah yang didirikan Zending di daerah Poso, dalam konperensi para pimpinan organisasi Zending tahun 1912 diputuskan supaya persekutuan desa membuat perkebunan kopi dan kelapa. Buat setiap sekolah oleh desa yang bersangkutan akandibuat sebidang kebun yang ditanami 1000 pohon kopi dan kebun yang ditanami 300 pohon kelapa. Pada tahun 1908 Dr. A.C. Kruyt telah menyuruh membuat kebun kopi di Kuku.

Setelah menguraikan secara garis besar usaha organisasi Zending menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran rakyat serta wewenang yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda melaksanakan tugas tersebut di daerah Poso dan sekitarnya, marilah kita mencoba membicarakan mengenai sekolah-sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh pemerintah Belanda bersama aparat-aparatnya yang ada di daerah Sulawesi Tengah pada permulaan abad ke-20 hingga datangnya Jepang tahun 1942. Dalam pembicaraan ini termasuk pula di dalamnya sekolah-sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh organisasi swasta lainnya yang mendapat bantuan biaya (subsidi) dari pemerintah selain organisasi Zending yang telah dijelaskan sebelumnya.

a. Sekolah Kelas Dua

Di daerah Sulawesi Tengah pada tahun-tahun pertama pemerintah kolonial Belanda berkuasa, jenis sekolah yang mereka dirikan ada dua macam yaitu sekolah rakyat berkelas 3 (menamatkan muridnya 3 tahun sekali) yang terkenal dengan nama *Volkschool* dan sekolah rakyat berkelas 4 (menamatkan muridnya 4 tahun sekali) yang disebut *Inlandsche Standaard School*.

Pada tahun 1903 sebuah sekolah rakyat berkelas 4 didirikan di Buol (desa Roji) dengan guru yang mengajar pertama bernama M. Biga dari Gorontalo. Sekolah ini disebut Sekolah Gubernemen kelas dua.¹¹⁾ Di daerah Poso Sekolah Rakyat berkelas 4 milik

11) T. Kaawandaud, *op. cit.*, Hal. 65.

Zending disebut sekolah kelas satu atau sekolah standar.¹²⁾

Pada tahun 1905 pemerintah Hindia Belanda mendirikan sekolah rakyat berkelas 3 di Donggala (tempat itu disebut Parapa) antara desa Labuan Bajo dan desa Kota. Pada tahun 1915 sekolah rakyat berkelas 3 itu ditingkatkan menjadi sekolah rakyat berkelas 4 dan disebut Sekolah Gubernemen kelas dua.¹³⁾ Pada tahun 1909 di Banggai dan Lobu didirikan oleh pemerintah Belanda sekolah rakyat berkelas 3 pada ke kedua kota tersebut. Beberapa tahun kemudian sekolah rakyat berkelas 3 di Banggai dijadikan sekolah rakyat berkelas 4 disebut *Inlandsche Standaard School*, dan sekolah rakyat di Lobu tetap sekolah rakyat berkelas 3 disebut *Volkschool*.¹⁴⁾

Sekitar tahun 1920 ke atas sekolah rakyat berkelas 4 pada beberapa kota tersebut di atas dijadikan sekolah rakyat berkelas 5 (menamatkan muridnya 5 tahun sekali) dan namanya tetap disebut sekolah Gubernemen kelas dua. Jadi mulai saat itu ada dua jenis sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah, yaitu sekolah rakyat berkelas 3 yang lebih dikenal dengan nama *Bestuurs Volks-school* (BVS) dan sekolah Gubernemen kelas dua berkelas 5 (*Gouvernement School Tweedeklasse*) sekolah ini memiliki 5 tingkatan kelas yaitu mulai kelas 1 s/d kelas 5 terdapat di sekolah yang sama. Jenis sekolah ini hingga tahun 1930-an terdapat pada beberapa kota penting di daerah Sulawesi Tengah antara lain di Buol, Donggala, Palu, Parigi, Tinombo, Poso, Kolonedale, Banggai, Luwuk dan Pagimana.

Dengan dikeluarkannya peraturan Subsidi Umum (*Algemene Subsidic Regeling*) pada tahun 1942 oleh Inspeksi Pendidikan dan Pengajaran di Manado, maka beberapa sekolah rakyat berkelas 4 milik swasta dijadikan sekolah rakyat berkelas 3 (*Volkschool* = VS). Dalam peraturan Subsidi Umum itu ditetapkan bahwa hanya sekolah swasta yang berkelas 3 saja yang diberikan subsidi oleh pemerintah dan yang berkelas 4 tidak diberikan.

Sekolah-sekolah swasta yang berkelas 3 dan berkelas 5 yang mendapat subsidi dari pemerintah Belanda selama berkuasa di daerah Sulawesi Tengah adalah sekolah-sekolah yang didirikan

12) Jan Kruyt, *op. cit.*, Hal. 239.

13) Wawancara dengan Bapak *Tahima* di Gunung Bale, Donggala, tanggal 29-10-1978.

14) Wawancara dengan Bapak *Haji Sulaeman Amir* di Luwuk, tanggal 26-9-1980.

oleh organisasi *Leger Des Heils* (LDH) yang lebih dikenal dengan nama Bala Keselamatan (BK) dan organisasi Zending di Luwuk yang diurus langsung oleh suatu badan Gereja Protestan Hindia Belanda (*Indische Kerk*) yang berpusat di *Batavia* (Jakarta). Bala Keselamatan mulai mendirikan sekolah pertama di Kulawi dan Raviga (daerah lembah Palu) 1913 dan Organisasi Zending di Luwuk (*Indische Kerk*) mulai mendirikan Sekolah di Eteng, Kecamatan Lamala, pada tahun 1914.

b. Vervolgschool (Sekolah Sambungan)

Sekolah ini adalah sekolah Rakyat yang terdiri dari 2 kelas tepat anak-anak yang telah memperoleh ijazah (Diploma) dari *Volkschool/Bestuur Volksholl* melanjutkan studinya 2 tahun lagi setingkat kelas 4 dan 5 pada sekolah Gubernemen kelas dua. Mata pelajaran yang mereka peroleh di sekolah ini sama dengan mata pelajaran yang diperoleh murid-murid kelas 4 dan 5 di sekolah Gubernemen kelas dua.

Vervolgschool ini didirikan di daerah Sulawesi Tengah sesudah tahun 1925 dan tidak bersamaan waktu pendiriannya pada tiap-tiap daerah. Pada umumnya *Vervolgschool* (Sekolah Sambungan) ini terdapat di ibu kota kerajaan yang mempunyai wilayah cukup luas. Semua anak tamatan kelas 3 dari *Volkschool* yang terdapat dalam wilayah kerajaan bersangkutan boleh melanjutkan studinya di kelas 4 dan 5 pada *Vervolgschool* tersebut dengan menunjukkan ijazah (STTB) dari sekolahnya masing-masing.

Pada tahun 1927 di Tawaeli, Kabupaten Donggala, pemerintah mendirikan sebuah *Vervolgschool*. Sekolah ini menjadi tempat melanjutkan studi bagi anak-anak yang tamat dan memperoleh ijazah dari sekolah rakyat berkelas 3 (*Volkschool*) di Sabang, Sibayu, Mapane, Tambu, Malei, Sirenja, Tompe, Alindau, Toaya, Lero, Wani, Tawaeli dan Mamboro. Mereka belajar selama dua tahun lagi di *Vervolgschool* ini dan apabila lulus pada ujian akhir, mereka diberi ijazah diploma) dari *Vervolgschool* ini.

Di daerah Poso hingga tahun 1940 hanya terdapat 3 buah *Vervolgschool* ini.¹⁵⁾ Karena kesulitan pembiayaan sebagai akibat terjadinya depresi ekonomi (zaman *Malaise*) yang menimpa negara di seluruh dunia pada tahun 1930, maka sekitar tahun 1934 semua

15) Jan Kruyt, *op. cit.*, Hal. 242.

sekolah *Gubernemen* kelas dua yang berkelas 5 dirubah menjadi sekolah sambungan (*Vervolgschool*). Jadi hingga tahun 1941 jenis sekolah yang ada di daerah Sulawesi Tengah ada dua yaitu *Bestuur Volkschool* (BVS) dan *Vervolgschool*.

Sekolah *Gubernemen* kelas dua memiliki tingkatan kelas 1 s/d 5 terdapat di sekolah yang sama dipecah menjadi 2 yaitu *Volkschool* (Sekolah Rakyat berkelas 3) yang menyelenggarakan jenjang pendidikan dari kelas 1 sampai 3 tamat, dari *Vervolgschool* (Sekolah Sambungan) tempat anak-anak tamatan *Volkschool* melanjutkan pelajaran di kelas 4 dan 5, tamat dengan memperoleh ijazah *Vervolgschool* yang ditanda-tangani oleh karena sekolah masing-masing. Pada tahun 1934 sekolah *Gubernemen* kelas dua di Buol dipecah dua menjadi *Bestuur Volkschool* dan *Vervolgschool*.¹⁶⁾ Demikian pula halnya sekolah *Gubernemen* kelas dua di Palu pada tanggal 1 April 1934 dipecah menjadi dua yaitu *Besstuur Volkschool* dan *Vervolgschool*.¹⁷⁾

Sampai saat datangnya Jepang di daerah Sulawesi Tengah awal tahun 1942 *Vervolgschool* ini terdapat pada beberapa kota penting antara lain di Donggala, Palu, Tawaeli, Biromaru, Kulawi, Parigi, Tinombo (Kab. Donggala), di Buol, Toli-Toli (Kab. Buol Toli-Toli), di Poso, Tentena, Kolonedale (Kab. Poso), di Luwuk, Banggai, Pagimana (Kab. Banggai).

Sesuai data yang ada jumlah sekolah rakyat terdapat di Sulawesi Tengah hingga tahun 1941 baik yang berkelas 3 (*Volkschool*) dan *Vervolgschool* (sekolah sambungan) dan termasuk sekolah swasta yang mendapat bantuan dari pemerintah (bersubsidi) adalah:

1. Kabupaten Donggala	:	56 buah.
2. Kabupaten Buol Toli-Toli	:	27 buah.
3. Kabupaten Poso	:	89 buah
4. Kabupaten Banggai	:	63 buah.

Jumlah :; 235 buah.¹⁸⁾

Penyelenggaraan sekolah-sekolah di daerah Sulawesi Tengah baik sekolah rakyat berkelas 3 (*Bestuur Volkschool*) maupun seko-

16) T. Kawandaud, *op. cit.*, Hal. 66.

17) Wawancara dengan Bapak *Tulisi Pantobuo* di Donggala kecil, Palu, tanggal 20-10-1980.

18) Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tengah, *Nomor Statistik TK-SD Propinsi Sulawesi Tengah*, Palu, 1979.

lah rakyat berkelas 4 (*Inlandsche Standaard School*) pada awal didirikannya mengalami berbagai-bagai kesulitan dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1). Kekurangan Tenaga Guru

Guru-guru asal daerah Sulawesi Tengah merupakan keluaran dari sekolah pendidikan guru untuk mengajar di sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah pada waktu itu belum ada.

Untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga guru maka pemerintah berusaha mendatangkan tenaga dari luar daerah terutama dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Maluku. Hingga tahun 1920-an mereka yang menjadi guru mengajar pada sekolah-sekolah di Sulawesi Tengah adalah tamatan kelas 5 dari sekolah Gubernur kelas dua atau *Vervolgschool*. Mereka yang datang mula-mula sekali adalah dari Sulawesi Utara dan Maluku kemudian menyusul dari Sulawesi Selatan.

Sebenarnya sejak tahun 1913 Zending sudah membuka sekolah pendidikan guru di Pendolo dengan murid pertama sebanyak 14 orang yang semuanya laki-laki dan menamatkan muridnya pertama pada tahun 1916. Untuk mengajar pada sekolah-sekolah yang didirikan Zending sendiri di daerah Poso dan sekitarnya tidak mencukupi, apalagi untuk mengajar pada sekolah-sekolah pemerintah. Oleh sebab itu maka terpaksa harus mendatangkan tenaga guru dari luar meskipun mereka bukan tamatan dari sekolah pendidikan guru. Dapat dibayangkan bagaimana mutu pendidikan yang diperoleh anak-anak pada waktu itu.

Kelak setelah tahun 1920-an di mana sekolah rakyat berkelas 4 ditingkatkan menjadi sekolah rakyat berkelas 5 mulailah pemerintah mendatangkan guru-guru keluaran dari sekolah pendidikan guru seperti tamatan *Kweekschool* dan *Normaalschool*.

Ada empat kota tempat mendidik para calon guru di Indonesia bagian Timur pada waktu itu ialah:

- a. *Kweekschool* Zending di Kaluwatu, Sangir-Talaud.
- b. *Kweekschool* pemerintah di Ambon, Maluku.
- c. *Normaalschool* pemerintah di Makassar, Sulawesi Selatan.
- d. *Meisjes Normaalschool* di Sasaran-Tondano, Sulawesi Utara.

Guru-guru tamatan *Kweekschool* atau *Normaalschool* yang didatangkan dari luar daerah Sulawesi Tengah sekitar tahun 1920-

an menjadi Kepala Sekolah pada sekolah Gubernur kelas dua atau kepala sekolah *Vervolgschool*. Yang menjadi guru bantunya adalah murid-murid tamatan kelas 5 sekolah Gubernur kelas dua atau tamatan *Vervolgschool* yang disebut guru magang sebagai guru honorer. Guru magang ini mendapat bimbingan terus menerus dari kepala Sekolah tamatan *Kweekschool* atau *Normaalschool* di sekolah tempatnya mengajar hingga akhirnya bila telah baik caranya mengajar dengan persetujuan Kepala Sekolah yang membimbingnya dapat diangkat menjadi guru bantu.

Untuk meningkatkan mutu guru bantu yang telah diangkat tadi pada Sekolah Gubernur kelas dua berkelas 5 dibuka *Cur-sus Volksonderwijzer* (CVO) petang hari telah pimpinannya adalah Kepala Sekolah Gubernur kelas dua tamatan *Kweekschool/Normaalschool* pada sekolah bersangkutan. Kursus ini berlangsung selama dua tahun dengan mata pelajaran yang diberikan antara lain: Membaca, berhitung, menggambar, ilmu bumi, sejarah, ilmu mendidik dan seni suara (menyanyi).¹⁹⁾ Dalam hal menanggulangi tenaga guru bantu yang masih sangat kurang pada waktu itu, maka VOC ini kemudian menerima pula murid-murid tamatan kelas 5 sekolah rakyat untuk dididik selama dua tahun dan setelah tamat dapat diangkat menjadi guru bantu. Guru-guru tamatan VOC ini dapat pula menjabat sebagai kepala sekolah pada sekolah rakyat berkelas 3 (*Volkschool*) di desa-desa di mana *Volkschool* ini didirikan. Tempat-tempat mendidik para calon guru bantu di mana VOC didirikan yang masih diketahui antara lain:

- a). Di Luwuk, didirikan pada tahun 1921 dan menamatkan muridnya yang pertama tahun 1923. Pimpinannya adalah Piet Reinhaart dari Kupang (Timor) tamatan *Kweekschool* Ambon. Piet Reinhaart ini juga Kepala Sekolah Gubernur kelas dua di Luwuk.
- b). Di Palu, didirikan pada tahun 1923 dan menamatkan muridnya pertama pada tahun 1925. Pimpinannya adalah Menoi dari Manado, tamatan *Kweekschool* Ambon. Selain Pimpinan CVO Menoi juga adaah Kepala Sekolah Gubernur kelas dua di Palu.²⁰⁾

19) wawancara dengan Bapak *Umpang Timang* di Kampung Soho, Luwuk, tanggal, 23-9-1980.

20) T. Kawandaud, *op. cit.*, Hal. 66.

- c). Di Buol, didirikan pada tahun 1927 disebut *Namiddag Cursus*. Pimpinannya adalah O.H. Kandow, Kepala Sekolah Gubernemen kelas dua di Buol. Tanggal 7 Nopember 1927 diadakan ujian untuk *Volksonderwijzer Candidaat*. Ujian ini diikuti oleh 35 orang calon dan berhasil lulus hanya 21 orang.²¹⁾ O.H. Kandow yang menjadi pimpinan *Namiddag Cursus* di Buol ini tamatan dari sekolah mana dari keempat sekolah pendidikan guru yang disebutkan di atas, tidak dijelaskan dalam buku "*Tambo dan Sejarah Buol*" karangan T. Kawandaud.

Bahkan pada waktu sebelum didirikannya CVO pada beberapa tempat di daerah Sulawesi Tengah untuk menanggulangi kekurangan tenaga guru diselenggarakan kursus-kursus.

Kursus ini menerima murid tamatan kelas 3 *Volkschool* atau tamatan kelas 4 *Inlandsche Standaard School* untuk dilatih menjadi calon tenaga guru bantu pada *Volkschool* atau *Inlandsche Standaard School* itu sendiri. Lama kursus tidak ditentukan dan yang menjadi gurunya adalah guru-guru tua yang telah berpengalaman. Bila ada ujian guru bantu sewaktu-waktu semua pengikut kursus tersebut turut ujian itu. Ujian dikirim dari Manado oleh Inspektur Pendidikan yang pada waktu itu dipegang oleh seorang bangsa Belanda dan yang melaksanakannya di daerah adalah penilik sekolah (*Schoolopziener*), seorang petugas bangsa Indonesia.

Mata pelajaran yang diujikan antara lain: berhitung lisan dan tulisan, bahasa Melayu (Bahasa Indonesia) dan Ilmu bumi.²²⁾

2). Kekurangan Murid

Para orang tua merasa takut memasukkan anak-anak mereka bersekolah di sekolah-sekolah yang baru dibuka itu. Alasannya karena bila anak-anak itu kelak telah tamat belajar di sekolah tersebut akan dijadikan serdadu (tentara) dan dibawa ke Aceh untuk bertempur di sana. Alasan ini merupakan kekhawatiran dan ketakutan umum bagi rakyat di daerah Sulawesi Tengah pada waktu itu untuk menyekolahkan anak-anak

21). T. Kawandaud, op.cit., Hal. 66

22). Wawancara dengan Bapak Daud Kutika di Kampung Soho, Luwuk, tanggal 23 - 9 - 1980.

mereka.

Bagi orang tua yang keras memegang agama Islam mereka tidak mau menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah yang didirikan oleh Belanda karena khawatir janaan-janaan anak-anak tersebut dijadikan Kristen. Nanti setelah penguasa (raja) setempat turun tangan mendatangi keluarga-keluarga tertentu dengan memberikan keterangan bagaimana baiknya jika anak-anak disekolahkan dan sesudah melihat hasilnya beberapa tahun kemudian barulah banyak anak-anak masuk bersekolah.

Karena murid masih kurang, maka tidak ada ketentuan umur anak masuk sekolah pertama-tama sekali, sehingga pada waktu itu sudah banyak anak-anak dewasa, masih diterima menjadi murid di sekolah-sekolah yang baru didirikan itu yang penting adalah anak-anak mau bersekolah.

Kemudian ada ketentuan bagi seorang anak yang bisa diterima menjadi murid di sekolah-sekolah yang ada yaitu umur sedikit-dikitnya 6 tahun atau apabila tangan kanan atau tangan kiri dari anak bersangkutan telah mencapai kuping (telinga) di sebelahnya kalau dijangkau bisa melewati kepala.

Jadi yang diterima menjadi murid pada sekolah-sekolah waktu itu tidak ada ketentuan khusus seperti hanya orang-orang berada atau turunan raja (kepala suku saja) yang boleh masuk sekolah tersebut.

Di daerah Sulawesi Tengah tidak dikenal adanya sekolah-sekolah khusus untuk anak-anak turunan Eropah (*Europesche Lagere School* = ELS) atau khusus untuk turunan Cina (*Hollandsch Chinese School* = HCS) dan sebagainya. Sekolah terbuka bagi siapa saja yang ingin pandai membaca, menulis dan berhitung sesuai tujuan dari pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah untuk mendapatkan tenaga murah guna mencapai tujuannya.

Karena raja turun tangan dalam mencarikan murid-murid maka tentu saja keluarga yang terdekat dengan dia yang dapat dipengaruhi lebih dahulu untuk menjadi murid pertama sekali pada sekolah-sekolah yang ada. Di samping kesulitan-kesulitan tadi masih ada beberapa hal yang harus dihadapi pada awal didirikannya sekolah-sekolah di Sulawesi Tengah seperti halnya tentang :

3). Pembiayaan

Biaya pembangunan gedung-gedung sekolah pertama sekali didirikan baik oleh organisasi Zending (NZG) maupun oleh pemerintah Belanda ditanggung oleh masing-masing badan yang mendirikan sekolah-sekolah tersebut.

Yang didirikan oleh Zending dibiayai oleh Zending sendiri dan yang didirikan oleh pemerintah dibiayai oleh pemerintah. Sekolah ini disebut sekolah Gubernemen. Dimana seorang utusan penyebar Injil ditempatkan mula-mula di situlah sekolah Zending didirikan pertama kali sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan di mana pula seorang Controleur Ci-viel Gezaghebber ditempatkan pertama sekali di situlah sekolah gubernemen berkelas 3 (*Volk School*) didirikan.

Lama kelamaan setelah pelaksanaan pemerintahan kolonial Belanda di daerah ini stabil dan berjalan lancar, mulailah Belanda mengangkat raja-raja yang dapat menjadi alat baginya untuk mencapai tujuan kolonialnya. Raja-raja diberi kekuasaan otonom untuk mengatur daerahnya sendiri-sendiri dengan peraturan yang dikeluarkan pada waktu itu (*Zelfbestuur Regeling*). Raja yang diangkat oleh pemerintah Belanda sekitar tahun 1920-an kebanyakan sudah tamatan *Volkschool* atau *Inlandsche Standaard School*.

Pegawai-pegawainya pun banyak menggunakan anak-anak tamatan sekolah tersebut di atas. Melihat kebaikan-kebaikan yang diperoleh kemudian dari hasil pendidikan di sekolah seperti di atas seperti banyak anak daerah sendiri menjadi pegawai kantor dan guru-guru di sekolah, rakyat pun mulai terbuka matanya dan berlumba-lumba mau menyekolahkan anak-anak mereka.

Murid-murid makin banyak tetapi gedung sekolah dan ruangan belajar sangat terbatas. Untuk menambah gedung sekolah baru maka pemerintah Belanda menyerahkan sepenuhnya kepada raja-raja yang berkuasa di daerah Sulawesi tengah untuk mendirikan sekolah-sekolah berkelas 3 (*Volk School*) di kampung-kampung yang dianggap perlu. Biaya pembangunannya diserahkan kepada raja dengan menggunakan keuangan yang ada dalam kas kerajaan (*kas landschap*).

Sekolah-sekolah yang didirikan dengan menggunakan biaya keuangan dari kas kerajaan ini disebut sekolah *Landschap*.

Dengan demikian maka selama kekuasaan pemerintah ko-

lonial Belanda di daerah Sulawesi Tengah terdapat tiga jenis sekolah rakyat, baik sekolah rakyat berkelas 3 maupun sekolah rakyat berkelas 5 yaitu:

- a). Sekolah Zending yang diurus oleh *Beheeder* (Pendeta) utusan penyebar Injil. Baik sekolah-sekolah yang didirikan oleh NZG di Poso, *Indische Kerk* di Luwuk mau pun *Leger Des Heil* (LDH) yang lebih dikenal dengan nama Bala Keselamatan (BK) di Lembah Palu dan sekitarnya (*Subsidie*).
- b). Sekolah Gubernemen yang diurus langsung oleh pemerintah Belanda dengan pembiayaan dari kas Gubernemen (pemerintah).
- c). Sekolah *Landschap* diurus oleh pemerintah kerajaan dengan menggunakan biaya dari kas kerajaan (*kas Landschap*) secara subsidi. Alat-alat perlengkapan di sekolah dari ketiga jenis sekolah tersebut di atas masing-masing ditanggung oleh badan yang mendirikannya.

4). Gaji Guru-guru

Untuk sekolah-sekolah yang didirikan oleh Zending para guru yang mengajar di sekolah-sekolah tersebut mendapat gaji dari keuangan organisasi Zending sendiri. Kecuali sekolah Zending yang ada di daerah Luwuk, yang diawasi langsung oleh *Indische Kerk* (Gereja Protestan Hindia Belanda) yang berpusat di Batavia (Jakarta), para pendeta yang menjadi guru di sekolah-sekolah itu adalah pegawai pemerintah Hindia Belanda karena gajinya dibayar langsung dari kas Gubernemen (Pemerintah).

Guru-guru sekolah Gubernemen menerima gaji dari keuangan yang ada pada kas kerajaan (*kas landschap*). Mereka ini dapat disamakan sebagai pegawai negeri daerah pada saat sekarang ini.

5). Kurikulum

Mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid di sekolah-sekolah rakyat berkelas 3 baik yang didirikan oleh Zending, pemerintah Belanda maupun oleh raja-raja setempat adalah sama.

Bagi sekolah-sekolah milik Zending yang khusus meneri-

ma murid-murid dari keluarga yang beragama Kristen diberikan mata pelajaran agama Kristen yang bahan-bahannya diambil dari Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru.

Mata pelajaran yang pertama-tama diberikan:

- a). Membaca
- b). Menulis
- c). Berhitung
- d). Menyanyi
- e). Menggambar^{2 3})

Sekitar tahun 1930-an mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid sekolah rakyat berkelas 3 (*Volkschool*) dari kelas 1 s/d kelas 3 berdasarkan buku pegangan sebagai berikut:

- a). Membaca : *Empat Serangkai I, II, III, IV; Rampai-Rampai I, II*, oleh R.E. Lucas.
- b). bercakap-cakap : *Contoh percakapan Bahasa Melayu I, II, III*, oleh J. Kats.
- c). Menulis Indah : *Pengajaran Menulis Huruf Belanda Sekolah Rendah*, oleh J.D. Winnen.
- d). Berhitung ; *Majulah I, II, III, IV*, oleh W. Meyer.
- e). Membaca dan Menulis Huruf Arab Melayu: *Dua Sebaya I, II*
- f). Menggambar : *Kitab Gambar I, II, III, IV*, oleh G.J.F. Biegman.
- g). Menyanyi : *Biduan Kecil I, II, III*, oleh Tupamahu.
- h). Dikte (Imla) : Bahan diambil dari semua buku bacaan dan buku berhitung yang telah diberikan.
- i). Pekerjaan Tangan : Membuat alat-alat pelajaran sendiri, membuat penghapus, keranjang, bakul, topi, sapu, ketupat, berkebun dan sebagainya.
- j). Sport (Gymnastiek): *Pemimpin Pengajaran Pergerakan Badan Untuk Sekolah-sekolah Rendah*, oleh T.H.A. Claessen.^{2 4})

Mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid sekolah rakyat berkelas 4 (*Inlandsche Standaard School*) kebanyakan tidak

-
- 23). Wawancara dengan Bapak A. Kaloke di Kampung Dongkalan Luwuk, tanggal 27-9-1980.
 - 24). Wawancara dengan bapak *Tulisi Pantobuo* di Donggala Kecil, Palu, tanggal 20-10-1980.

teringat lagi oleh para informan yang diwawancarai.

mereka mengatakan sama dengan mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid sekolah rakyat kelas 3 (*Volkschool*).

Untuk mengetahui secara jelas dapat dilihat pada kurikulum sekolah Zending 4 tahun di Poso yang telah diuraikan sebelumnya.

Mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid dari kelas 1 s/d 5 pada sekolah gubernemen kelas dua maupun pada *Vervolgschool* sama jenis dan jumlahnya.

Kepada mereka ditambah lagi mata pelajaran sebagai berikut

- a). Ilmu Bumi (Hindia Belanda dan Negeri Belanda).
- b). Sejarah (orang-orang Belanda yang memerintah dan terkenal).
- c). Ilmu Alam (Benda padat, cair dan gas).
- d). Ilmu Hayat (Manusia, hewan, tumbuhan dan kesehatan).

Jadi dengan demikian dapat diketahui jumlah dan jenis mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid sekolah rakyat berkelas 5, dari kelas 1 s/d kelas 5 yaitu sebagai berikut

- a). Membaca
- b). Bercakap-cakap
- c). Menulis Indah
- d). Berhitung
- e). Membaca dan Menulis Huruf Arab Melayu
- f). Ilmu Bumi
- g). Sejarah
- h). Ilmu Alam
- i). Ilmu Hayat
- j). Dikte (Imla)
- k). Menggambar
- l). Menyanyi
- m). Pekerjaan Tangan
- n). Sport (*Gymnastiek*)²⁵)

Secara terperinci di bawah ini dijelaskan jumlah dan jenis mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid sekolah rakyat baik yang berkelas 3 (*Volkschool*) maupun yang berkelas 5 (Sekolah Gubernemen kelas dua/*Vervolg School*) di daerah Sulawesi Tengah sebelum pecah perang dunia ke 2 di Asia pada tahun 1941:

25). Wawancara dengan Bapak *Jansen Memondol* di kampung Maesa, Palu, tanggal 21-10-1980.

- a). Membaca : (1) Membaca bahasa (*taal lezen*)
(2) Membaca diam (*stil lezen*)
(3) Membaca nyaring (*luid lezen*)
- b). Menulis Indah
- c). Dikte (Imla)
- d). Berhitung : (1) Berhitung cakap
(2) Berhitung tulisan
(3) Berhitung hapalan
(4) Berhitung angka
- e). Bercakap-cakap; k). Menyanyi
- f). Ilmu Bumi l). Membaca dan Menulis Huruf Arab Melayu
- g). Sejarah m). Mengarang
- h). Ilmu Alam n). Pekerjaan Tangan
- i). Ilmu Hayat o). Sport (*Gymnastiek*)²⁶)
- j). Menggambar

Beberapa buku pegangan mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid kelas 4 dan kelas 5 baik pada sekolah gubernemen kelas dua maupun pada *Vervolgschool* yang masih diingat oleh para informan yang diwawancarai selain apa yang telah disebutkan sebelumnya dalam kurikulum *Volksschool* di atas, juga dipakai buku-buku pegangan sebagai berikut:

- a). Membaca Huruf Latin:
 - (1). *Matahari Terbit* IV, V, oleh J. Lameyn.
 - (2). *Embun* I, II, oleh G. Lavell Frolich dan Mohamad Taib gelar Sutan Pamuncak.
 - (3). *Lain Dahulu, Lain Sekarang*, oleh G. Lavell Prolich dan Mohammad Taib gelar Sutan Pamuncak
- b). Membaca Huruf Arab-Melayu: *Suar* di kelas IV dan *Pelita* di kelas V.
- c). Berhitung : (1). *Kitab Hitungan*, oleh P. de Nes. Jilid IV untuk guru, Jilid IVa untuk murid kelas IV.
(2). Jilid V untuk guru, Jilid Va untuk murid kelas V.

26). Wawancara dengan Bapak *Djeng Djahumang* di kampung Soho, Luwuk, tanggal 29-9-1980.

- d). Ilmu Bumi : (1). *Pimpinan Pengajaran Ilmu Bumi*, oleh D.J. Winnen dan Ismail gelar Sutan Mahudun.
 (2). *Kitab Ilmu Bumi Hindia Nderland*, oleh Ch. F.H. Dunant.
- e). Ilmu Alam : *Ilmu Alam*, oleh Chr. F.W. Syper.
- f). Ilmu Hayat : (1). *Ilmu Keadaan Tubuh Orang dan Menjaganya*, oleh D.H. Ooms.
 (2). *Penjaga Diri* (Kesehatan), oleh W. Keizer.
 (3). *Ilmu Hewan*, oleh J.H. Klein.
- g). Pekerjaan Tangan: *Ikhtisar pendek tentang pengajaran pekerjaan tangan pada pengajaran rendah untuk pendidikan umum di Hindia Belanda*, oleh R. Adolf.

5). Bahasa Pengantar

Melihat kenyataan yang berlaku bahwa guru yang mengajar mula-mula pada sekolah sekolah yang ada, berasal dari luar daerah (Manado, Sangir, Ambon dan Makassar) maka bahasa pengantar yang dipakai adalah bahasa Melayu.

Sesudah tahun 1930-an pemerintah Belanda berusaha menterjemahkan beberapa buku pegangan yang ditulis dalam bahasa Melayu ke dalam bahasa daerah setempat di mana sekolah-sekolah tersebut didirikan. Penterjemahan buku-buku pegangan itu tidak terikat pada isi buku yang telah dicetak dalam bahasa Melayu itu. Unsur ceritera daerah dapat pula dimasukkan di dalamnya.

Usaha ini terutama dilakukan oleh organisasi zending di Sulawesi Tengah setelah mendapat surat edaran dari Direktur Pengajaran dan Ibadat Dr. A.D.A. de Kat Angelino tertanggal 3 Juni 1935 yang isinya antara lain:

"Bahwa supaya pengajaran, yakni pengajaran dasar, berfungsi dengan tepat haruslah dipergunakan bahasa daerah. Seluruh pengajaran rakyat kita adalah berdasarkan gagasan, bahwa sekolah itu tidak boleh merupakan suatu unsur asing di tengah-tengah penduduk dari mana ia menarik murid-muridnya. Ini berarti bahwa apabila orang mau mencapai bahwa para murid dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari pengetahuan

dan pengertian yang diperoleh di sekolah, maka haruslah pengetahuan dan pengertian-pengertian itu disesuaikan dengan keadaan-keadaan, hubungan dan pengertian-pengertian yang ditemukan dalam masyarakat pribumi itu. Tujuan yang dilukiskan di atas ini hanya dapat dicapai jika para murid itu mendapat pengajaran dalam bahasa ibunya. Jika hal ini tidak terjadi, dan bahasa daerah tidak diikuti-sertakan dalam proses peragian dan pembaharuan yang dibawa oleh sekolah itu, maka tidak mungkin sekolah itu menjadi suatu keseluruhan yang organik dengan masyarakat yang di sekelilingnya".²⁷⁾

Dalam usaha menterjemahkan buku-buku pelajaran di sekolah rakyat ke dalam bahasa daerah setempat di Sulawesi Tengah pemerintah Hindia Belanda mengirim seorang ahli bahasa juga seorang pendeta bangsa Jerman ke daerah ini bernama Dr. S.J. Esser, Dr. S.J. Esser ini datang di beberapa tempat di daerah Sulawesi Tengah mencari beberapa orang guru yang bisa membantu usahanya menterjemahkan/menulis buku-buku pelajaran ke dalam bahasa daerah setempat.

Sebelum Pecah Perang Dunia ke-II di Asia tahun 1941 berhasil diterjemahkan beberapa buah buku pelajaran untuk menjadi bacaan murid-murid kelas 1 s/d kelas 3 sekolah rakyat sebagai berikut:

Di Poso buku-buku bacaan/pelajaran yang ditulis dalam bahasa Bare'e (Pamona) adalah:

- a). *Se'imo Surandapebasa*, oleh Dr. N. Adriani
- b). Terjemahan dari buku Perumpamaan bahasa Melayu oleh H. Kolondam.
- c). Terjemahan dari buku *Robinson Croesoe* oleh Dr. A.C. Kruyt.
- d). *Suara Mporeke* III (buku hitungan) oleh Dr. N. Adriani.
- e). *Suara Sei Kalau jaya mpompau mengaya-ngayaanun Dayuka*, jilid I dan II oleh Dr. N. Adriani.
- f). *Pamporewuto* Korata (buku kesehatan) oleh P. Schuyt.

Selain buku-buku tersebut di atas ini sudah ada pula buku-buku bacaan yang diterjemahkan ke dalam bahasa Bare'e dan bahasa Mori, yaitu Kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru serta

27). Jan Kruijt, *op. cit.*, Halaman 302.

Injil Lucas.

Buku-buku yang ditulis dalam bahasa Bada:

- a). *Pinatuwo'te maila*
- b). Laluta mPatura, jilid I, II
- c). Laluta To mopalaia.²⁸⁾

Di Palu buku-buku bacaan/pelajaran yang diterjemahkan ke bahasa Kaili Ledo adalah:

- a). Sese Talu nJese (Tiga Serangkai) I, II, III, oleh Tulisi Pantobuo.
- b). *Bula Mebongga* (Matahari Terbit), oleh Tulisi Pantobuo. Buku ke 2 ini belum sempat diterbitkan oleh Balai Pustaka, pecahlah Perang Dunia II di Asia tahun 1941.
- c). Kareba Belo (Kabar Baik, terjemahan Injil Lucas), oleh Tulisi Pantobuo dan dr. S.J. Esser. Buku ini adalah buku bacaan agama Kristen bagi murid-murid sekolah rakyat Bala Keselamatan di Lembah Palu dan sekitarnya.²⁹⁾ Buku-buku tersebut di atas sempat beredar di sekolah-sekolah rakyat berkelas 3 sebagai buku bacaan bagi murid-murid hingga saat datangnya kekuasaan militer Jepang awal tahun 1942, kecuali buku *Bula Mebongga*.

Buku-buku pelajaran yang menjadi pegangan guru mengajar murid-murid kelas 4 dan 5 di *Vervolgschool* tetapi menggunakan bahasa Melayu karena alat-alat pelajaran yang digunakan dengan tambahan mata pelajaran seperti Ilmu Bumi, Sejarah, Ilmu Alam dan Ilmu Hayat sulit mendapatkan istilah-istilahnya dalam bahasa daerah setempat. Selain itu murid-murid pada sekolah *Vervolgschool* dipersiapkan untuk dapat mengadakan hubungan dengan dunia luar yang lebih luas. Yang dimaksud dengan dunia luar di sini ialah daerah di luar lingkungan desanya sendiri. Melalui mata-mata pelajaran yang diberikan kepada murid-murid di kelas 4 dan 5 *Vervolgschool* anak-anak diperkenalkan dengan Wilayah Nusantara (Hindia Belanda) dengan belajar Ilmu Bumi

28). *Catalogus des boeken ma, verkrijgbaar bij het depot van leermiddelen, te Weltevreden, afdeling I, Lees en leerboeken voor het Inlandsch Onderwijs*, halaman 24.

29). Wawancara dengan Bapak Tulisi Pantobuo di Donggala Kecil, Palu, tanggal 20-10-1980.

dan Sejarah, diperkenalkan dengan jenis-jenis benda yang ada di alam ini dengan mempelajari Ilmu Alam dan mengenal dirinya sendiri dan memelihara kesehatannya serta mengenal hewan dan tumbuh-bumbuhan serta manfaatnya bagi kehidupan di dunia melalui pelajaran Ilmu Hayat dan lain-lain sebagainya.

Hanya di daerah-daerah di mana Zending melakukan kegiatannya, disitulah mereka berusaha menterjemahkan buku-buku pelajaran ke dalam bahasa daerah untuk mempermudah keberhasilan usahanya menyebar-luaskan agama Kristen. Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh usaha organisasi tersebut seperti daerah Buol dan Toli-Toli tak terdengar adanya usaha menterjemahkan buku-buku pelajaran sekolah rakyat ke dalam bahasa Buol atau bahasa Toli-Toli.

Di Luwuk meskipun kegiatan Zending terdapat pula di daerah ini tidak ada buku pelajaran diterjemahkan atau ditulis dalam bahasa Banggai, bahasa Balantak atau bahasa Saluan untuk menjadi bacaan anak-anak dari kelas 1 S/d kelas 3 *Volkschool*. Tetapi para pendeta dalam melakukan tugasnya banyak menggunakan bahasa daerah setempat sebagai bahasa pengantar dalam penyiaran agama Kristen kepada penduduk.

C. *Hollandsch Inlandsche School (HIS)*

Selama pemerintah kolonial Belanda berkuasa di daerah Sulawesi Tengah tak satu pun sekolah HIS milik pemerintah terdapat di daerah ini. Yang ada hanyalah HIS didirikan oleh organisasi swasta seperti Zending, partai politik PSII, Muhammadiyah dan ada pula hanya inisiatif beberapa orang guru atas permintaan dari keluarga-keluarga tertentu saja yang menginginkan supaya anak-anak mereka bisa berbahasa Belanda.

Bahasa Belanda pada waktu itu merupakan bahasa pergaulan bagi keluarga-keluarga terpelajar dan terkemuka dalam masyarakat. Siapa yang pandai berbahasa Belanda maka dia termasuk keluarga terpandang dan dihormati di dalam masyarakat. Penghormatan orang kepada mereka sama dengan penghormatan terhadap bangsa Belanda.

1). *HIS Zending di Poso*

Pada tahun 1917 orang-orang Minahasa, Tionghoa dan beberapa keluarga Islam terkemuka meminta kepada Zending membuka sebuah HIS, suatu pendidikan sekolah dasar yang

mempersiapkan anak-anak untuk sekolah lanjutan Belanda. Zending mengabulkan permintaan ini dan pada waktu itu sekolah pun mulai berjalan. Pada waktu dibuka tahun 1917 hingga tahun 1925 pemerintah Belanda belum memberi subsidi (bantuan) kepada sekolah ini, sehingga mutu pendidikannya tidak memuaskan. Akhirnya pada tahun 1925 Zending menarik diri dari penyelenggaraan sekolah tersebut dan selanjutnya penyelenggaraannya diteruskan oleh para orang tua murid. Karena HIS ini merupakan sebuah lembaga pendidikan mahal dan bahasa pengantar harus bahasa Belanda, guru-gurunya pun harus tamatan dari sekolah lanjutan Belanda, maka selama di tangan para orang tua murid mutu pendidikannya pun sama dengan hasil pendidikan sebelumnya, tidak memuaskan.

Pada tahun 1930 pemerintah Belanda memberikan wewenang kepada Zending membuka lagi HIS di Poso dengan menerima bantuan (subsidi— dari pemerintah. Untuk menjadi pimpinan HIS bersubsidi ini diangkatlah Hoefman, bekas pendeta penyebar Injil di Kasigunea. Pada akhir tahun 1932 dari jumlah murid seluruhnya sebanyak 167 orang, 21 orang di antaranya adalah murid asli orang-orang Poso.

Pada tahun ajaran 1936/1937 Hoefman digantikan oleh H. Silalahi hingga saat sekolah itu ditutup pada waktu Jepang datang awal tahun 1942.³⁰⁾

2). HIS PSII di Bunta

Atas inisiatip para tokoh pimpinan Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) di Bunta pada tahun 1923 didirikan sebuah HIS (sekolah berbahasa Belanda) di kota ini. Sekolah ini merupakan Cabang dari HIS Reksosuryo (Kependekan dari Reksosumitro—Suryokusuma) di Gorontalo.

Yang menjadi pimpinan/kepala sekolah di waktu itu adalah Thayeb Dunggio, salah seorang anak didik dari HOS Tjokroaminoto. Pembantu-pembantunya antara lain Ishak Sulaeman dan Tuk Khatihi. Ketiga orang guru tersebut ini berasal dari Gorontalo. Yang dijadikan gedung sekolah adalah bekas kantor sekretariat PSII Bunta dan tanahnya merupakan wakaf dari para petani kelapa di sekitar itu.

30). Jan Kruyt, *op. cit.*, Halaman 285.

3). HIS Netral di Donggala

Sekolah ini didirikan tahun 1928 atas permintaan masyarakat kepada beberapa orang guru yang mengajar pada sekolah gubernemen kelas dua pada waktu itu. *Tamalawe* (Sangir) yang menjadi pimpinan sekolah sambungan (*Vervolgschool*) di Donggala waktu itu juga menjadi pimpinan HIS tersebut. Beliau dibantu oleh istrinya sendiri yang juga fasih berbahasa Belanda.

HIS Netral ini berlangsung petang hari dan menggunakan gedung *Vervolgschool* Donggala. Karena berstatus swasta maka murid-muridnya bila menempuh ujian akhir mereka dikirim ke Manado.

4). HIS Muhammadiyah di Luwuk

Pada tahun 1933 di Luwuk didirikan HIS Muhammadiyah atas inisiatif para pimpinan organisasi sosial ini. Sekolah ini pembukaannya diresmikan oleh Bapak Tom Olli dari Gorontalo, yang pada waktu itu selaku Konsul Muhammadiyah untuk Sulawesi Utara berkedudukan di Gorontalo. Yang menjadi guru sementara pada sekolah tersebut adalah Sirajuddin Datuk Adam, Otoluwa, Oe.H. Baluati, Ngadimin, Satibi dan lain-lain.

Pada tahun 1939 di Luwuk didirikan lagi dua buah sekolah HIS masing-masing *HIS Taman Putera* yang dipimpin oleh R'M. Kusnodhanupoyo dan HIS-NOS (*Neutraal Onderwijs Stichting*) dipimpin oleh A.D. nooduto dari Gorontalo. Pada tahun 1941 kedua sekolah yang tersebut terakhir ini, ditutup.³¹⁾

Pada umumnya HIS swasta yang sama sekali tidak mendapat subsidi dari pemerintah Belanda dan hanya mengandalkan kemauan semata-mata dan modal dari masyarakat pendukungnya tidak berlangsung lama. Jadi dapat dimaklumi bahwa semua sekolah swasta yang disebutkan di atas ini selain HIS Zending di Poso yang bersubsidi, tidak terdengar lagi dalam masyarakat menjelang datangnya Jepang. Lebih-lebih HIS yang didirikan oleh organisasi Islam seperti PSII dan Muhammadiyah tak sempat menamatkan muridnya sampai kelas 6 lalu ditutup karena dicurigai oleh pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu.

3. Pendidikan menengah Umum

Sejak waktu kekuasaan pemerintah kolonial Belanda ber-

31) Wawancara dengan Bapak Djeng *Djalumang*, di Kampung Soho, Luwuk, tanggal 29-9-1980.

sambung dengan kekuasaan pemerintahan militer Jepang hingga saat diproklamasikannya kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, di daerah Sulawesi Tengah tak satu pun Sekolah Menengah Umum yang ada baik yang didirikan oleh pemerintah maupun oleh organisasi swasta.

Sekolah Menengah Umum (SMU) yang berlangsung hanya dua tahun sesudah tamat kelas 5 SD baru ada di daerah ini pada tahun 1948 yang pada saat itu daerah Sulawesi Tengah termasuk Wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) dengan ibu kotanya Makassar. Pada tahun 1948 itu tiga buah Sekolah Menengah Umum didirikan di tiga tempat di Sulawesi Tengah yaitu di Poso, Palu dan Luwuk. Guru-guru yang mengajar pada ketiga buah Sekolah Menengah Umum tersebut di atas yang masih diketahui adalah:

- a. SMU Poso : 1). Ch.R. Branger (orang Belanda), Kepala Sekolah.
2). Nona De Bruin (Belanda), guru bantu.
3). Onstenk (Belanda), guru bantu.
4). De Ny (Belanda), guru bantu.
5). Ny. Pakasi (Indonesia), guru bantu.
- b. SMU Palu : 1). Rumbayan (Indonesia), Kepala Sekolah.
2). Tairas (Indonesia), guru bantu.
3). Pakasi (Indonesia), guru bantu.
- c. SMU Luwuk : 1). P. Brower (orang Belanda), Kepala Sekolah.
2). Hasan Husa (Indonesia), guru bantu.
3). Ahmad Masa (Indonesia), guru bantu.
4). Ahmad Baga (Indonesia), guru bantu.
5). Usman Makmur (Indonesia), guru bantu.

Setelah selesai mengikuti pelajaran selama dua tahun kelas 2 dari SMU ini, bila akan melanjutkan ke kelas 3 dan 4 pada sekolah sejenis, maka murid-murid harus pergi ke Manado, Gorontalo atau Makassar.

4. Pendidikan Kejuruan

- a. Latar Belakang Berdirinya

Permintaan masyarakat kepada organisasi Zending (NZG) untuk mendirikan sekolah pada dekade pertama organisasi tersebut melakukan kegiatannya di daerah Poso makin hari makin meningkat. Bertambahnya jumlah sekolah didirikan sesudah menetapnya kekuasaan pemerintah Hindia Belanda di Sulawesi Tengah mengambil konsekuensi bertambahnya pula tenaga guru yang diperlukan untuk mengajar di sekolah-sekolah yang baru dibangun itu. Guru-guru yang didatangkan dari Sulawesi Utara (Minahasa, Gorontalo dan Sangir-Talaud) yang menjadi guru pertama pada sekolah-sekolah di daerah Sulawesi Tengah kesemuanya adalah tamatan Sekolah Rakyat berkelas 5. Mereka bukanlah tamatan dari Sekolah Pendidikan Guru, jadi mutu pendidikannya boleh dikatakan rendah.

Pada tahun 1908 seorang inspektur pengajaran bumiputera datang berkunjung di Poso melakukan inspeksi pada beberapa sekolah mengatakan bahwa mutu para guru adalah sangat rendah, karena mereka bukan dari tamatan sekolah guru. Mereka hanyalah tamatan kelas 5 sekolah rakyat.

Penilaian sang inspektur itu merupakan alasan yang baik bagi Dr. A.C. Kruyt dan Hofman untuk mendesak kepada pengurus Zending supaya dapat segera didirikan sekolah guru di Poso. Dalam surat bersama yang dibuat oleh kedua utusan Zending tersebut di atas pada bulan Juni 1908 mereka meminta pada NZG di negeri Belanda memberi persetujuannya agar segera didirikan sekolah guru dengan maksud:

- 1). Untuk meningkatkan dan mempertahankan taraf kemajuan dan ketrampilan para guru yang mengajar di sekolah-sekolah.

- 2). Mendidik calon guru pribumi sebanyak-banyaknya untuk menggantikan jabatan guru yang kebanyakan dijabat oleh orang-orang dari Minahasa untuk mencegah dominasi pengaruh norma-norma dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di jemaat-jemaat dan persekutuan Minahasa atau orang-orang Poso pada masa peralihan ini.

- 3). Menyerahkan pimpinan sekolah dan pimpinan jemaat ke dalam tangan pribumi untuk mempercepat tercapainya tujuan Zending di daerah ini.

- 4). Untuk segera merealisasi maksud-maksud tersebut di atas ini maka Zending perlu memiliki sekolah pendidikan guru kepunyaan sendiri.

b. Berdirinya Sekolah Pendidikan Guru di Poso

Sebelum usaha mendirikan sekolah ini dilaksanakan maka yang menjadi masalah pertama-tama adalah tenaga para guru yang kelak akan mengajar di sekolah pendidikan guru tersebut dan pimpinan dari sekolah itu sendiri.

Dr. A.C. Kruyt selaku pimpinan Zending di daerah Poso waktu itu dalam suatu konperensi bulan Juli 1909 mengatakan sebagai berikut:

"Seorang guru-pendidikan para calon guru haruslah dahulu bekerja praktis sebagai utusan Injil sekurang-kurangnya dua tahun, sebelum ia mulai mendidik para calon guru."³²⁾

Dan yang akan menjadi pimpinan dari sekolah pendidikan guru yang akan dibuka itu nanti, beliau (A.C. Kruyt) mengirim surat kepada ayahnya di negeri Belanda supaya ayahnya mencari seseorang yang betul-betul dapat diharapkan keberhasilan usahanya memimpin sekolah ini sesuai dengan tujuan utama Zending (NZG) yaitu menyebarkan agama Kristen di daerah Sulawesi Tengah.

Dalam surat yang dikirimkan kepada ayahnya tertanggal 22 Juni 1909 yang sebahagian isinya dapat dikutip dalam tulisan ini mengatakan:

"Kami menghendaki seorang yang berjiwa utusan Injil dengan bakat-bakat pedagogis,"³³⁾ Yang dimaksudkan ia dapat menjadi pemimpin sekolah guru di Poso.

Pengurus Zending di negeri Belanda sulit sekali menemukan seorang tenaga guru yang akan menjadi pimpinan sekolah pendidikan guru di Poso menurut syarat-syarat yang diajukan oleh para utusan Zending yang ada di Poso. Salah satu syarat yang memberatkan tersebut yaitu pemimpin yang dikehendaki adalah pemimpin tersebut mempunyai pengertian yang mendalam tentang kontak yang hidup dengan perkembangan-perkembangan dalam jemaat-jemaat dan kebutuhan-kebutuhan yang sedang tumbuh buat masyarakat pribumi.³⁴⁾ Mengingat sulitnya mendapatkan seorang pimpinan yang memenuhi syarat yang dimaksud atas persetujuan para utusan penyebar Injil ditunjuklah Dr. A.C.

32). Jan Kruyt, *op. cit.*, Halaman 264.

33). Jan Kruyt, *Ibid.*,

34). Jan Kruyt, *op. cit.*, Halaman 264.

Kruyt menjadi pimpinan sekolah pendidikan guru itu yang dicetuskan dalam konperensi para pimpinan Zending di Poso pada tahun 1910.

Pada bulan Januari 1913 mulailah didirikan sekolah pendidikan guru di Pendolo (Pamona Selatan) dengan pimpinan sekolah Dr. A. C. Kruyt sendiri, yang pada waktu itu selaku pimpinan *Nederlandsch Zending's Genootschap* (NZG) di Poso juga mengawasi suatu Resort kecil yang terdiri dari 12 desa.

Sekolah pendidikan guru yang baru dibuka ini dimulai dengan 14 orang murid kesemuanya adalah laki-laki. Dr. A.C. Kruyt memimpin sekolah ini hingga tahun 1929 dan kemudian digantikan oleh puteranya sendiri bernama Jan Kruyt sampai saat Jepang masuk di Sulawesi Tengah tahun 1942. Yang menjadi guru bantunya adalah para pimpinan Zending dan guru-guru yang telah berpengalaman dari Minahasa di mana mereka ini selain sebagai guru bantu adalah juga pendeta penyebar Injil dan kepala sekolah rakyat Zending di daerah itu.

Tamatan pertama murid dari sekolah pendidikan guru ini mulai dipekerjakan pada sekolah-sekolah Zending yang ada sesudah bulan Agustus 1916. Ternyata mereka sangat cocok dengan pekerjaan guru di daerahnya kalau dibandingkan dengan rekan-rekan mereka dari Minahasa. Sekolah pendidikan guru Zending di Pendolo ini setelah penamatan pertama tahun 1916 itu terhenti sementara untuk beberapa bulan lamanya karena pimpinannya Dr. A.C. Kruyt mengadakan perjalanan yang memakan waktu agak lama ke beberapa bagian wilayah kepulauan Nusantara (Indonesia).

Pada tahun 1917 sekolah pendidikan guru di Poso mendapat subsidi dari Pemerintah Hindia Belanda. Guru-guru yang dididik di sekolah ini betul-betul sesuai dengan harapan dan tujuan dari kegiatan Zending di daerah ini, yaitu mereka jika telah tamat belajar dan sudah di pekerjakan, mereka selain sebagai guru mengajar di sekolah-sekolah juga sebagai pendeta penyebar Injil di gereja-gereja.

1). Kurikulum

Mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid di sekolah pendidikan guru di Poso ini disesuaikan dengan mata pelajaran yang diberikan pada sekolah-sekolah pemerintah dan ditambah dengan pelajaran teori agama Kristen (teologia). Dengan adanya

sebuah asrama tempat tinggal para pelajar selama menuntut ilmu di daerah ini, maka teori dan praktek pelajaran agama Kristen (teologia) dilanjutkan pendalamannya di asrama di luar jadwal pelajaran sekolah.

Untuk melaksanakan mata pelajaran praktek mengajar ditetapkan bahwa sekolah rakyat yang ada di Pendolo dan Pandayora dijadikan sekolah latihan praktek mengajar bagi murid-murid kelas terakhir.

2). Murid-murid

Telah disebutkan pada uraian sebelumnya bahwa jumlah murid pertama sekolah pendidikan guru ini sebanyak 14 orang dan semuanya terdiri dari anak laki-laki saja. Mereka yang diterima menjadi murid pertama-tama yang disebutkan di atas itu adalah anak-anak lelaki yang sebelumnya telah lama tinggal di rumah-rumah para pimpinan Zending di daerah Poso. Mereka telah banyak memperoleh latihan keagamaan, bekerja dengan disiplin menurut waktu-waktu kerja yang telah ditentukan oleh para pendeta yang diikutinya. Mereka yang tinggal pada keluarga para utusan Zending, melakukan tugas-tugas kerumah-tangga ini disebut anak piara. Jika mereka telah benar-benar dapat melaksanakan semuanya apa yang telah ditugaskan kepada mereka menurut jadwal waktu yang ditentukan, oleh para utusan penyebar Injil yang mereka tempati menyuruh mereka masuk sekolah pendidikan guru. Mereka akan segera dapat menyesuaikan diri dengan kegiatan-kegiatan di sekolah mengikuti pelajaran-pelajaran dengan disiplin menurut jadwal waktu yang telah ditentukan.

Setelah para anak lelaki tadi pergi memasuki sekolah pendidikan guru dan selama mengikuti pelajaran mereka tinggal di asrama, maka istri-istri para pendeta pimpinan Zending tersebut mengambil pula anak-anak perempuan yang dapat membantu pekerjaan wanita di rumah seperti memasak, menjahit, mencuci dan menyeterika pakaian dan sebagainya. Para anak wanita ini pun dilatih bekerja secara teratur dan berdisiplin sama halnya dengan latihan-latihan yang diberikan kepada anak-anak lelaki sebelumnya. Mereka ini juga disebut anak piara dan dipersiapkan untuk menjadi calon istri para sang guru yang akan tamat dari sekolah pendidikan guru tersebut. Kelak setelah mereka kawin maka wanita yang menjadi istri dari sang guru tadi

disebutnya nyora.

Kadang-kadang dalam waktu yang bersamaan para anak lelaki dan perempuan tadi tinggal serumah dengan para pendeta utusan penyebar Injil dan masing-masing melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Mereka melakukan tugas sebagai pembantu rumah tangga dalam hubungan kekeluargaan sedemikian rupa sehingga betah tinggal di rumah tuannya sambil menunggu diperjodohkan dengan para calon guru laki-laki setelah tamat nanti.

Demikianlah hal ini berlangsung beberapa waktu lamanya hingga sampai saat diadakannya ketentuan bahwa yang dapat diterima menjadi murid sekolah pendidikan guru itu hanyalah mereka tamatan sekolah rakyat kelas 3 atau kelas 4 yang telah lulus mengikuti ujian saringan masuk sekolah pendidikan guru.

Perlu juga diketahui bahwa anak piara yang menjadi murid pertama sekolah pendidikan guru Zending di Poso yang dibuka pada tahun 1913 di Pendolo itu juga sebelumnya sudah melalui pendidikan sekolah rakyat 3 tahun dan kepada mereka tidak diadakan ujian saringan (test masuk).

Ketentuan terakhir setelah sekolah rakyat berkelas 5 banyak menamatkan murid-muridnya menetapkan bahwa yang boleh diterima masuk menjadi murid pada sekolah pendidikan guru ini hanyalah mereka yang telah tamat dan berijazah serta lulus pula mengikuti ujian saringan (test masuk) pada sekolah bersangkutan yang diadakan setiap awal tahun ajaran. Ketentuan ini berlangsung hingga tiba saatnya Jepang berkuasa di Sulawesi Tengah awal tahun 1942. Dan murid-murid pun tidak terbatas hanya anak laki-laki saja, melainkan terbuka pula jalan bagi anak-anak perempuan untuk masuk sekolah pendidikan guru itu. yang penting ialah mereka tamat, berijazah kelas 5 sekolah rakyat dan lulus ujian saringan masuk (test masuk).

Tujuan utama NZG mendirikan sekolah pendidikan guru di Poso ini adalah: "Sekolah pendidikan guru itu didirikan dan dimaksudkan sebagai suatu penyediaan akan guru pribumi yang terdidik buat daerah Zending NZG di Sulawesi Tengah saja."³⁵)

Dr. A.C. Kruyt juga banyak melakukan perjalanan ke beberapa daerah yang ada di Sulawesi antara lain ke Sulawesi Utara (Bo-

35). Jan Kruyt, *op. cit.*, Halaman 268.

laang Mangondow, Sangir Talaud) dan Sulawesi Tenggara (Kolaka, Kendari). Untuk Wilayah daerah Sulawesi Tengah lainnya beliau juga mengadakan kunjungan ke daerah Lembah Palu, tempat *Leger Des Heils* (Bala Keselamatan) melakukan kegiatannya dan ke daerah Luwuk, tempat *Indische Kerk* (Gereja Protestan di Hindia Belanda) mengadakan kegiatan menyebarkan ajaran agama Kristen Protestan di daerah ini yang sekarang disebut GKLB (Gereja Kristen Luwuk Banggai). Tentu saja maksud perjalanan yang dilakukan ke daerah-daerah tersebut di atas ialah untuk mengadakan kerja sama yang baik dalam mensukseskan usaha menyebarkan agama Kristen Protestan sebagai tugas suci mereka kepada penduduk pribumi di tempat-tempat itu. Akibatnya sekolah pendidikan guru Zending yang ada di Poso tidak hanya menerima murid-murid tamatan kelas 5 Sekolah Rakyat yang ada di daerah Poso dan sekitarnya tetapi murid-murid dari luar pun mulai berdatangan memasuki sekolah pendidikan guru itu.

Mulai tahun 1925 sampai sekolah tersebut ditutup waktu Jepang berkuasa di daerah ini, setiap tahun murid-murid tamatan kelas 5 sekolah rakyat Bala Keselamatan di Palu datang menuntut ilmu di sekolah pendidikan guru Zending di Poso. Demikian pula murid-murid tamatan kelas 5 sekolah rakyat Zending di Luwuk (Sulteng), Kendari dan Kolaka (Sulawesi Tenggara) mulai tahun 1928 setiap tahun secara bergilir datang belajar di sekolah pendidikan guru ini.

Mulai tahun 1939 banyak pula berdatangan murid-murid tamatan kelas 5 sekolah rakyat dari Bolaang Mangondow dan Sangir Talaud (Sulawesi Utara) datang menuntut ilmu pengetahuan di sekolah pendidikan guru Zending tersebut.

Bila mereka telah menyelesaikan studinya, mereka akan kembali ke daerah masing-masing untuk menjadi guru pada sekolah-sekolah yang ada, dan yang diutamakan adalah sekolah-sekolah Zending yang ada di daerah bersangkutan.

Sebagian dari mereka ada pula yang diangkat menjadi guru pada sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda sendiri maupun oleh pemerintah kerajaan yang berstatus daerah otonom menurut peraturan yang dibuat oleh Belanda sendiri pada daerah kerajaan waktu itu (*Zelfbestuur Regeling*). Data-data yang tepat mengenai jumlah murid dari tahun ke tahun sekarang tidak dapat lagi diperoleh.

Yang masih dapat diketahui berdasarkan catatan yang ada bahwa dari bulan Januari 1913 sampai pada bulan April 1935 terdaftar pada sekolah pendidikan guru Zending di Poso itu 154 orang murid. Dari jumlah 154 orang murid itu, 120 orang tamat dan memperoleh ijazah dan 34 orang tidak.

Dari mereka yang 34 orang tidak mendapatkan ijazah itu tiga orang dicoret namanya dari daftar peserta ujian karena dua orang di antaranya sakit dan seorang lagi meninggal dunia. Murid sebanyak 31 orang tidak mendapatkan ijazah itu, 21 orang terus meninggalkan sekolah dan mencari pekerjaan sendiri dan 10 orang masih tinggal bekerja beberapa waktu lamanya pada organisasi Zending sebagai tenaga bantuan.

3). Lama Pendidikan

Sejak didirikan bulan Januari 1913 di Pendolo sampai pada tahun 1937 lama pendidikan pada sekolah Zending di Poso itu *mengalami tingkat-tingkat perkembangan*.

Mula-mula pendidikan para calon guru memakan waktu dua tahun lamanya. Setelah menamatkan muridnya dua tahun pertama, kemudian diadakan lagi penerimaan murid baru gelombang kedua untuk mengikuti pelajaran pada sekolah pendidikan guru itu selama dua tahun berikutnya. Jadi dalam hal ini sekolah tersebut menamatkan muridnya sekali dalam dua tahun dan dalam tempo dua tahun pula baru ada lagi tenaga guru muda yang baru tersedia bagi sekolah-sekolah yang memerlukannya.

Pada tahun 1934 di mana persyaratan penerimaan murid baru ditetapkan bahwa untuk menjadi murid sekolah pendidikan guru itu harus tamatan sekolah rakyat kelas 5 (*Vervolgschool*). maka lama pendidikan di sekolah pendidikan guru Zending Poso itu dijadikan tiga tahun. Jadi sekolah ini menamatkan muridnya 3 tahun sekali. Setelah tahun ajaran menjadi 3 tahun lamanya maka penerimaan murid pun waktunya berubah, bukan tiga tahun sekali, melainkan penerimaan murid baru untuk sekolah pendidikan guru ini dilakukan setiap tahun.

Dalam sidang konperensi para pimpinan Zending di Poso pada bulan Pebruari 1937 diambil suatu keputusan bahwa sekolah pendidikan guru di Pendolo itu supaya segera dipindahkan ke Tentena (Pamona Utara) karena tempat ini dianggap strategis sekali bagi Zending untuk mengembangkan usahanya.

Dalam sidang konperensi itu pula disetujui bahwa sekolah pendidikan guru yang berlangsung selama tiga tahun tadi diubah menjadi sekolah pendidikan guru 4 tahun dan untuk menjadi tenaga pengajar teologia pada sekolah pendidikan guru 4 tahun itu diangkat seorang di antara para utusan Zending yang bernama H. Perdok.

Bulan Desember 1938 sekolah pendidikan guru Zending berkedudukan di Pendolo dipindahkan ke Tentena (Pamona Utara). Pada tanggal 13 Pebruari 1939 secara resmi dibukalah Tentena sebagai tempat sekolah pendidikan guru Zending 4 tahun dengan suatu perayaan/pesta menurut adat istiadat suku Pamona. Pada waktu itu pulalah diadakan penyerahan pemakaian tanah di Pamona (Tentena) kepada Jema'at Kristen Protestan (NZG) yang dilakukan oleh kepala daerah otonom Poso (raja Poso) Talasa.

Dari Tentena inilah semua kegiatan organisasi Zending (NZG) dilaksanakan dalam menyebarkan agama Kristen Protestan di daerah Sulawesi Tengah hingga tercapai tujuannya menggabungkan semua gereja organisasi Zending di Sulawesi Tengah dalam suatu wadah yang disebut Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST). Pada hari sabtu tanggal 18 Oktober 1947 GKST dinyatakan berdiri sendiri lepas dari pengawasan NZG yang berpusat di negeri Belanda.

4). Pembiayaan

Pembiayaan sekolah pendidikan guru Zending di Poso itu pada waktu permulaan didirikan bulan Januari 1913 hingga tahun 1917 seluruhnya ditanggung oleh organisasi Zending itu sendiri. Pada tahun 1917 Pemerintah Hindia Belanda memberikan bantuan keuangan (subsidi) pada sekolah itu hingga saat sekolah itu ditutup selama kekuasaan pemerintah Jepang di daerah Sulawesi Tengah.

Pada tahun 1932 subsidi pemerintah pada sekolah tersebut dikurangi jumlahnya oleh pemerintah Belanda. Untuk menutupi kekurangan biaya dalam penyelenggaraan sekolah pendidikan guru itu orang-orang Poso yang berbahasa Bare'e memberi sumbangan suka rela berupa beras yang banyaknya tidak ditentukan menurut kemampuan masing-masing.

Murid-murid yang belajar di sekolah pendidikan guru ini hingga tahun 1934 dididik secara cuma-cuma, dan mereka tidak di-

pungut biaya sama sekali. Pada penerimaan murid baru tahun 1934 kepada murid dipungut biaya dengan membuat perjanjian tertulis pada waktu mulai masuk sekolah bahwa mereka akan membayar F 100,— (seratus gulden) kepada kas sekolah pendidikan guru itu bila mereka telah selesai mengikuti pendidikan. Mereka dapat membayar secara mencicil sekurang-kurangnya (dua puluh lima gulden) setahun. Mulai pada tahun 1938 semua guru yang telah menikmati pendidikan di Pendolo ikut memikul beban pembiayaan penyelenggaraan sekolah pendidikan guru itu dengan menyerahkan 1% dari gaji mereka masing-masing setiap bulan.

Pada tahun 1939 sekolah pendidikan guru dipindahkan dari Pendolo ke Tentena. Uang yang diperlukan untuk membangun gedung-gedung baru, oleh Lembaga Zending NZG dipinjam dari uang simpanan jema'at-jema'at, dengan bunga yang besarnya sama dengan yang berlaku pada bank simpanan lainnya di mana uang itu disimpan.

Oleh sebab itu sesudah peresmian Gereja yang berdiri sendiri pada tanggal 18 Oktober 1947 maka semua gedung di Tentena (Pamona Utara) seperti asrama dan gedung sekolah adalah milik gereja.

C. Usaha Zending Meningkatkan Mutu Para Guru di Sekolah Pendidikan Guru di Tentena (Poso)

Dalam pembicaraan mengenai kurikulum telah dijelaskan bahwa jenis dan jumlah mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid sekolah pendidikan guru Zending di Poso itu sama dengan mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid sekolah pendidikan guru yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kecuali pendidikan agama Kristen (Teologia) yang merupakan mata pelajaran khusus bagi murid-murid Zending yang pada murid-murid sekolah pemerintah tidak diberikan. Yang mungkin dapat membedakan mengapa mutu pendidikan guru Zending lebih tinggi daripada mutu pendidikan guru pemerintah pada waktu itu ialah karena intensitas pelajaran yang diberikan dengan disiplin ketat dan kualifikasi para guru yang mengajar pada sekolah pendidikan guru Zending itu sendiri.

Saat menjelang pecahnya Perang Dunia II di Eropa dan Asia, para guru yang mengajar pada sekolah pendidikan guru Zending di Tentena itu kebanyakan orang Belanda yang pada

waktu itu menjadi pimpinan Zending (NZG) yang mengepalai sektor-sektor tertentu mengawasi beberapa buah desa tempatnya melakukan kegiatan-kegiatan menyebar-luaskan agama Kristen Protestan. Mereka adalah tamatan sekolah guru (*Hoofdacte*) dari negeri Belanda juga sebagai pendeta penyebar Injil. Guru-guru asal Minahasa (Manado) tidak banyak lagi mereka gunakan mengajar pada sekolah pendidikan guru itu. Kebanyakan mereka ditempatkan sebagai kepala Sekolah Rakyat berkelas 5 (*Vervolgschool*) milik Zending.

Selama para murid mengikuti pendidikan pada sekolah pendidikan guru Zending di Poso itu mereka selalu mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan tertentu juga mendapatkan latihan-latihan keterampilan khusus melengkapi diri mereka, sebelumnya mereka melakukan tugas sebagai guru di tempat mengajar masing-masing di kemudian hari.

Pemantapan pembinaan pribadi selama mengikuti pendidikan dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang itu tidak hanya secara pribadi memiliki perlengkapan tertentu berupa pengetahuan dan ketrampilan, tetapi dia juga harus mampu mengalihkan pengetahuan dan ketrampilan ini kepada murid-muridnya.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk pembinaan pribadi para calon guru selama mengikuti pendidikan antara lain:

- 1) Mengenai mata pelajaran didaktik, untuk setiap mata pelajaran dibicarakan suatu metode atau satu cara tertentu dalam menanganinya, sejelas dan setepat mungkin. Banyak sekali perhatian dan waktu diberikan kepada pelajaran praktek di sekolah desa yang telah ditentukan. Murid-murid sekolah pendidikan guru yang mendapat giliran praktek memberikan semua mata pelajaran sebulan terus menerus setiap hari, dalam suatu kelas yang dipercayakan kepada mereka di bawah pengawasan guru kelas. Jadi mereka bertanggung jawab sepenuhnya atas pelajaran-pelajaran yang diberikan dan seolah-olah mereka sudah menjadi guru tetap. Selama latihan praktek mengajar dilakukan dalam satu bulan itu secara bergilir. Kepala sekolah pendidikan guru, Jan Kruyt setiap hari menunggu seorang guru berpraktek di sekolah desa yang ditentukan dari jam pertama hingga jam terakhir. Hal ini dilakukan oleh Jan Kruyt setiap hari kerja hingga semua calon berpraktek menyelesaikan gilirannya. Setelah itu kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh masing-masing diperbaiki lagi setelah murid-murid kembali belajar di dalam kelas.

Hal ini dilakukan supaya kesalahan-kesalahan tersebut tidak terulang lagi kalau mereka sudah menjadi guru nanti setelah menamatkan pendidikannya. Dengan tinggal di asrama selama mengikuti pendidikan di sekolah pendidikan guru itu para murid baik pria maupun wanita memperoleh latihan-latihan keterampilan bekerja. Latihan-latihan tersebut antara lain:

- a). Memasak dan menghidangkan makanan.
- b). Menjaga kebersihan gedung dan memelihara pekarangan dan jalan yang menuju ke kompleks desa persekolahan itu.
- c). Membuat dan memelihara kebun sayur-sayuran (berkebun).
- d). Belajar menjahit pakaian sendiri dengan mesin jahit yang telah disediakan. Para murid lima kali setahun mendapat sepotong kain untuk dibuat pakaian sederhana sejenis piama, melobang dan memasang kancing sendiri. Menjahit pakaian orang lain tidak diperbolehkan sama sekali.
- e). Mencuci dan menyeterika pakaian sendiri yang kesemuanya disediakan oleh sekolah. Pakaian yang diperoleh tersebut sama sekali tidak diperbolehkan diberikan kepada orang lain meskipun keluarga sendiri.

3). Kebiasaan menggunakan buku-buku dalam perpustakaan untuk menambah sendiri ilmu pengetahuan melalui aktivitas membaca sendiri buku-buku yang ada. Buku-buku pegangan untuk semua mata pelajaran diberikan dan dipergunakan oleh para murid selama mereka masih menjadi murid dari sekolah pendidikan guru itu.

4). Mata pelajaran ilmu pendidikan diberikan empat jam seminggu pada setiap kelas dalam dua tahun terakhir.

5). Melihat mutu para guru yang dihasilkan lebih baik dibandingkan dengan para guru sekolah pemerintah tamatan CVO, maka pada tahun 1938 sekolah pendidikan guru ini diberi kepercayaan oleh pemerintah Belanda mengadakan ujian sendiri dan tidak menunggu lagi bahan ujian tertulis yang dikirim dari Batavia untuk seluruh wilayah Hindia Belanda pada waktu itu.

Pengalaman menunjukkan bahwa suatu ujian adalah sama dengan ulangan umum dari apa yang orang telah pelajari dari buku-buku yang dipergunakan. Orang tidak dapat mengetahui apa yang dia sendiri tidak mempelajarinya.

Tidak ada seorang pun yang dapat mengatakan atau melakukan

sesuatu apabila ia belum pernah mempelajarinya (pelajaran pedagogik).

6). Untuk menggantikan guru-guru Minahasa yang menjadi kepala *Vervolgschool* yang ada, diusahakan pengiriman beberapa orang anak-anak asli Poso tamatan sekolah pendidikan guru itu ke *Normaal School Zending* di Kuranga, Manado. Mereka yang dikirim ke Kuranga ini menamatkan sekolahnya pertama kali pada tahun 1934. Seorang di antara mereka yang tamat pertama dari *Normaal School* Kuranga di Manado itu adalah ayah dari saudara Ropolembah Manganti. Saudara Ropolembah Manganti ini sekarang adalah seorang Asisten Dosen pada FKSS—IKIP Ujung Pandang Cabang Palu. Setelah *Normaal School* Kuranga ditutup, tiga orang kemudian dikirim untuk belajar pada *Normaal School* Pemerintahan di Makassar. Mereka tamat dan kembali ke daerah Sulawesi Tengah (Poso) setelah Perang Dunia II selesai.

Melihat usaha-usaha Zending seperti tersebut di atas membina pendidikan dengan biaya cukup serta didukung oleh sarana dan prasarana ditambah dengan peralatan lengkap, tidaklah heran kita jika mutu pendidikan yang diperoleh para murid lebih baik daripada apa yang diperoleh murid-murid dari sekolah pemerintah atau sekolah *Landschap* pada waktu itu.

B. PENDIDIKAN PERGERAKAN NASIONAL

Dalam mengungkapkan sejarah pendidikan pergerakan nasional di daerah Sulawesi Tengah tidak dapat dipisahkan dengan sejarah masuknya organisasi/partai yang bernafaskan pergerakan menuju kemerdekaan bangsa dan tanah air dari penjajahan bangsa asing di daerah ini. Partai pergerakan yang pertama sekali masuk di daerah Sulawesi Tengah adalah Serikat Islam (SI) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Serikat Islam Indonesia (PSII) dibawa langsung oleh tokoh-tokoh pendirinya, yaitu H.O.S. Tjokroaminoto dan Sosrokardono. PSII masuk daerah Sulawesi Tengah bagian barat (Kabupaten Donggala dan Kabupaten Buol Toli-Toli) pada tahun 1916 dan daerah Sulawesi Tengah bagian timur (Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso) pada tahun 1917. Partai politik ini dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia menganut asas non koperasi. Oleh sebab itu segala gerak-gerik dan tindakannya selalu diawasi dengan ketat oleh pemerintah. Kadang-kadang sering terjadi

tindakan-tindakan yang sangat menjengkelkan bagi pemerintah Belanda yang berkuasa pada waktu itu.

Terkenal sekali pemberontakan/peristiwa yang dilakukan oleh para tokoh PSII di Sulawesi Tengah, yaitu pemberontakan Salumpaga tahun 1919 (Kabupaten Buol Toli-Toli), peristiwa Idil Adha oleh Komite Umat Islam yang terdiri dari warta PSII, Muhammadiyah, Nahdatussyafiilah dan *Yong Islamieten Bond* di Pagimana tahun 1933 (Kabupaten Banggai) dan pemberontakan Dolago di Parigi tahun 1936 (Kabupaten Donggala).

Sesudah PSII pada tahun 1928 menyusul Partai Nasional Indonesia (PNI) kemudian masuk pula di daerah Sulawesi Tengah berturut-turut organisasi sosial Muhammadiyah tahun 1931 dan organisasi Nahdatussyafiilah yang kemudian berubah nama menjadi Nahdatul Ulama (NU) pada tahun 1933.

Untuk mendidik kader-kader generasi muda pelanjut cita-cita untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara dari kekuasaan penjajah Belanda para tokoh organisasi/partai tersebut di atas berusaha mendirikan sekolah-sekolah dengan mendatangkan guru-guru dari luar daerah Sulawesi Tengah terutama dari Jawa, Sumatera, Sulawesi Utara (Gorontalo) dan Sulawesi Selatan (Makassar), karena daerah-daerah tersebut telah banyak memiliki kader-kader yang terdidik dengan baik.

1. Motivasi Agama

Yang menjadi pendorong didirikannya sekolah-sekolah oleh organisasi Islam seperti PSII, Muhammadiyah dan Nahdatussyafiyyah ialah bahwa semua sekolah yang ada di daerah Sulawesi Tengah adalah sekolah pemerintah dan sekolah Zending (agama Kristen). Tak satu pun sekolah yang ada mengajarkan agama Islam di dalamnya, sedangkan penduduk di Sulawesi Tengah terutama mereka yang mendiami daerah-daerah pantai hampir seluruhnya beragama Islam. Guru-guru sekolah pemerintah itu pun sebagian besar Kristen.

Para tokoh baik pimpinan maupun anggota dari organisasi-organisasi Islam tersebut merasa prihatin melihat keadaan umat Islam di daerah ini yang masih banyak buta huruf Latin sehingga belum dapat membaca dan menulis. Untuk membaca huruf Arab sudah banyak yang tahu, sehingga bila ada bacaan yang ditulis dalam huruf Arab—Melayu mereka dapat membacanya dan juga mengerti isinya sedikit-sedikit dan terbatas pada orang-

orang tua saja.

Berdasarkan ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Besar Muhammad saw dalam salah satu hadits beliau yang berarti: "Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim pria maupun wanita", para pimpinan dan anggota organisasi Islam yang berada di daerah Sulawesi Tengah pada waktu itu merasa berkewajiban untuk mendirikan sekolah-sekolah bagi umat Islam yang ingin menambah ilmu pengetahuan. Hadits aslinya disebutkan:

1. *Thalabul 'ilmi faridhatun 'ala kulli muslimin wa muslimaat.*
2. *Hubbul wathaan minal imaan.*

Pada dasarnya sekolah-sekolah yang didirikan itu sama dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah, baik jumlah dan jenis mata pelajaran umum yang diberikan pada tiap-tiap tingkatan kelas yang ada, jumlah murid tiap kelas dan lamanya waktu belajar, semuanya sama. Kelebihannya hanyalah pada sekolah-sekolah tersebut selain mata pelajaran umum diberikan juga mata pelajaran pokok agama Islam seperti ilmu tauhid, ilmu fiqih, tafsir Al Qur'an, al Hadis dan bahasa Arab.

Perasaan cinta kepada bangsa dan tanah air supaya setiap umat Islam merasa terpanggil untuk berjuang dan membelanya dari penjajahan bangsa asing ditanamkan benar-benar dalam diri setiap murid bahwa dalam Islam mati karena membela bangsa dan tanah air itu adalah mati syahid. Juga Nabi Muhammad saw dalam salah satu hadisnya mengatakan yang artinya:

"Cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman".

Untuk membentuk kader-kader generasi muda umat Islam yang cakap dan cerdas baik dalam ilmu pengetahuan umum maupun ilmu agama Islam dan bertanggung-jawab atas kemajuan bangsa dan negara Indonesia umumnya dan daerah Sulawesi Tengah khususnya oleh organisasi Islam yang ada mulailah mendirikan gedung-gedung sekolah untuk tempat belajar bagi anak-anak mereka.

Selain PSII, Muhammadiyah dan Nahdatussyafiiyah ada lagi sebuah organisasi Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu Perguruan Islam Alkhairaat.

Organisasi yang disebut terakhir ini sejak tahun 1930 telah membuka sekolah pertama di kota Palu yang mula-mula mengajarkan

khusus ilmu-ilmu pengetahuan agama Islam kepada murid-muridnya yang dewasa ini memegang peranan penting dalam bidang pendidikan agama Islam di Sulawesi Tengah.

Untuk mengetahui secara singkat pertumbuhan dan perkembangan Perguruan Islam Alkhairaat dari awal hingga sekarang dapat diikuti pada uraian berikutnya dalam tulisan ini.

Jadi yang menjadi pendorong utama berdirinya sekolah-sekolah Islam pada zaman pergerakan nasional di daerah Sulawesi Tengah adalah faham nasionalisme berdasarkan agama Islam.

2. Motivasi faham nasional

Oleh tokoh-tokoh Parindra, Partindo dan PNI yang ada di daerah Sulawesi Tengah juga mendirikan sekolah-sekolah di zaman pergerakan nasional berdasarkan faham nasionalisme (kebangsaan). Guru-gurunya didatangkan dari Jawa dan Sulawesi Utara (Tondano dan Gorontalo).

Kepada murid-murid diajarkan kesadaran berbangsa serta berani berjuang dan merebut kembali kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia tercinta ini yang dulu pernah kita miliki dari tangan penjajah Belanda pada waktu itu.

Setiap orang dapat diterima menjadi murid di sekolah tersebut, baik dia beragama Islam ataupun dia yang beragama Kristen. Berlainan dengan sekolah-sekolah yang didirikan oleh organisasi-organisasi Islam yang khusus menerima anak-anak keluarga Islam saja.

3. Kelembagaan

a. Sekolah-sekolah PSII

Sekolah yang didirikan oleh PSII yang pertama di daerah Sulawesi Tengah adalah HIS – PSII di Bunta tahun 1923 sebagai cabang dari sekolah Reksosuryo di Gorontalo.

Guru-gurunya: Kepala Sekolah : Thayeb Dunggio dari Gorontalo, anak didik HOS Tjokroaminoto.

Guru bantu : – Ishak Sulaeman.
– Tuk Khatibi.

Gedung sekolah: Kantor Sekretariat PSII Bunta yang tanahnya adalah wakaf dari para petani kelapa yang ada di sekitarnya.

Sekolah ini berjalan tidak lama kemudian ditutup.

Sesudah tahun 1930-an PSII mendirikan sekolah-sekolah setingkat sekolah rakyat berkelas 3 (tiga tahun sekali menamatkan muridnya) pada beberapa tempat di daerah Sulawesi Tengah. Sekolah itu dinamai Sekolah Islam (*Islamiyah School*) yang terdapat di kota-kota antara lain:

- 1). Toli-Toli, didirikan tahun 1931.
- 2). Buol, didirikan tahun 1933.
- 3). Donggala, didirikan tahun 1933.
- 4). Bunta, didirikan tahun 1933. (Cabang Perguruan Walfajri di Yogyakarta).
- 5). Pagimana, didirikan tahun 1933.
- 6). Balantak, didirikan tahun 1939.

Adapun guru-guru yang mengajar pada sekolah-sekolah tersebut di atas yang masih diingat oleh para informan pada waktu diwawancarai adalah:

- Di Buol : Haji Muhammad Arif dari Padang, Sumatera.
Donggala : Jamaluddin Datuk Tumenggung dan Baharuddin keduanya berasal dari Sumatera.
Bunta : Su'dan Kirdiat dan Abu Hasan, keduanya tamatan dari Perguruan Walfajri di Yogyakarta asuhan A.D. Hani, Abdul Djabbar dan Haji Djaher.
Pagimana : Haga Monoarfa dan Yusuf Monoarfa, keduanya berasal dari Gorontalo.
Balantak : Muchlis Driwarsito dari Jawa (Cilacap).

Murid-murid tamatan dari *Islamiyah School* tersebut di atas bila akan melanjutkan studi, mereka pada umumnya ke Jawa.

Tamatan *Islamiyah School* (Sekolah Islam) di Bunta yang melanjutkan studi pada Perguruan Walfajri di Yogyakarta sekitar tahun 1936 adalah:

- 1). Muhammad Alhadad.
- 2). Ambotang Latjeno.
- 3). Atjo Latjeno.
- 4). Abdul Hafid Mangantjo.
- 5). Nawi Rasyid.
- 6). Djadil Abdullah.
- 7). Suleman Masulili.
- 8). Abdullah Latjeno.
- 9). Torik.
- 10). Ibrahim Mallo.
- 11). Muhsin Arrifai.
- 12). Abbas Alhabsyi.³⁶⁾

36). Informasi tertulis dari Bapak A.R. Lanasir di Luwuk.

Dua di antara murid tersebut di atas sekarang ini tinggal di Jakarta, yaitu Djadil Abdullah anggota DPR –MPR Republik Indonesia mewakili daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Su-leman Masulili, pegawai pada Departemen Dalam Negeri.

b. Sekolah-sekolah Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah masuk daerah Sulawesi Tengah pada tahun 1931 di Pagimana, Luwuk dan tahun 1932 di Donggala. Organisasi ini juga mendirikan banyak sekolah setingkat Sekolah Rakyat berkelas 3 (menamatkan muridnya 3 tahun sekali) pada beberapa tempat di Sulawesi Tengah.

Sekolah yang didirikan Muhammadiyah ini disebut *Diniyah School* (Sekolah Agama) yang mengajarkan selain mata pelajaran umum juga mengajarkan ilmu agama Islam dan Kemuhammadiyah.

Pada tahun 1933 Muhammadiyah mendirikan sekolah:

1). *HIS Muhammadiyah* di Luwuk.

- Guru-gurunya :
- a). Siradjuddin Datuk Adam
 - b). Otoluwa
 - c). Oe. H. Baluati
 - d). Ngadimin
 - e). Satibi

2). *Diniyah School* di Donggala.

- Guru-gurunya :
- a). Saleh Dunga (dari Gorontalo)
 - b). Abdul Jalil (dari Sumatera)
 - c). Dehan (dari Makassar).^{3 7)}

Pada tahun 1934 Muhammadiyah mendirikan sekolah:

3). *Diniyah School* di Pagimana.

- Guru-gurunya :
- a). Basir Ma'sum
 - b). Abdullah Siraj
 - c). Raden Himam
 - d). Muzamil
 - e). K. Dunga
 - f). Harun Dahlan

Kesemuanya adalah tamatan Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta.

4). *Diniyah School* di Bualemo di bawah pimpinan Soekardi,

37). Wawancara dengan Bapak *Tahima* di Gunung Bale, Donggala, tanggal 29 Oktober 1978.

tamatan Muallimin Muhammadiyah di Yogyakarta.

- 5). *Diniyah School* di Lobu dipimpin oleh Hadi Adaba dari Jawa. Pada tahun 1935 Muhammadiyah mendirikan sekolah:
- 6). *Diniyah School* di Luwuk, dipimpin oleh Ngadimin.
- 7). *Diniyah School* di Balantak, dipimpin oleh Soetoharjo.
- 8). *Diniyah School* di Tangeban, dipimpin oleh Baihaqi.

Sesudah itu Muhammadiyah mendirikan pula sekolah-sekolah di Wani, Parigi dan Ampanan.

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar sekolah organisasi PSII dan Muhammadiyah melakukan latihan-latihan kependuan guna melatih fisik dan mental bagi para murid baik pria maupun wanita. Maksudnya ialah untuk mempersiapkan para generasi Muda Islam untuk sewaktu-waktu bila diperlukan kelak berjuang secara fisik menentang kekuasaan Belanda di daerah ini.

Hal ini terbukti bahwa pada peristiwa pertama penaikan bendera Merah Putih di daerah Sulawesi Tengah yaitu tanggal: 1 Pebruari 1942 di depan Kantor PSII di Toli-Toli, 12 Pebruari 1942 di depan Kantor *Civiel Gezaghebber* di Luwuk. 20 Pebruari 1942 di depan Kantor Swapraja Tojo di Ampana, yang menjadi penggerak dan pelopor perebutan kekuasaan dari tangan Belanda sesaat sebelum Jepang datang, adalah para tokoh dan pemuda asuhan dari PSII dan Muhammadiyah.

Pandu yang berada dalam asuhan PSII disebut SIAP (*Serikat Islam Afdeling Pandu*) dan oleh Muhammadiyah namanya HW (*Hizbul Wathan*).

c. Sekolah-sekolah Nahdatussyafiiyah

Organisasi Nahdatussyafiiyah kurang lebih 1938 mendirikan Sekolah Rakyat berkelas 3 masing-masing di:

- 1). Abason, Sambuit, dipimpin oleh Hasan Mille.
- 2). Luwuk, dipimpin oleh Ahmad Mille.
- 3). Balantak, dipimpinnya tidak teringat lagi.

Sekolah-sekolah yang tersebut di atas ini merupakan Cabang dari sekolah Nahdatussyafiiyah yang ada di Gorontalo pada waktu itu.³⁸⁾

Organisasi Nadhatussyafiiyah ini kemudian berubah nama

38). Berdasarkan hasil penelitian lapangan tahun ke-3 IDKD (1979/1980).

menjadi Nahdatul Ulama (NU).

d. Sekolah-sekolah PNI

Sekolah-sekolah yang didirikan oleh para tokoh dan anggota PNI, Parindra dan Partindo di daerah Sulawesi Tengah adalah terdapat di kota Palu dan Luwuk.

Di Palu didirikan sebuah sekolah yang diberi nama *Particulier Hollands Inlandse School* (PHIS) dipimpin oleh Gautama (dari Jawa) pada kurang lebih 1936–1937. Pembantunya adalah Nelwan, yang berasal dari Manado. Kemudian daripada itu sekolah ini berganti nama dan disebut *HIS Taman Perguruan*. Gautama pernah mengajarkan kepada murid-muridnya Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

Setelah Gautama, yang menjadi pimpinan sekolah tersebut adalah Ismail Pulukadang (Jawa Tondano) berasal dari Manado dibantu oleh Nona Supit juga berasal dari Manado. Pada masa kepemimpinan Ismail Pulukadang hingga saat datangnya Jepang di Palu pada bulan Maret 1942, nama sekolah tersebut berganti pula menjadi *HIS Taman Putera*.

Pada tahun 1938 sekolah yang sama berdiri pula di Luwuk dengan nama *HIS Taman Putera* dipimpin oleh R.M. Kusnodhanupoyo. R.M. Kusnodhanupoyo ini pernah menjabat sebagai Residen Koordinator daerah Sulawesi Tengah dalam mempersiapkan daerah ini untuk menjadi daerah otonom yang berdiri sendiri lepas dari wilayah administratif Sulawesi Utara Tengah di Manado pada tanggal 13 April 1964.

Semua sekolah yang disebutkan di atas baik yang diselenggarakan oleh organisasi Islam (PSII, Muhammadiyah, Nadhatussyafiiyah) maupun oleh partai yang berasaskan nasionalisme (PNI, Parindra, Partindo) pada saat Jepang telah berkuasa di daerah Sulawesi Tengah ditutup dan tidak diperkenankan dibuka kembali hingga tiba masa diproklamasikannya kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

e. Perguruan Al–Chairaat

Perguruan Al–Chairaat didirikan pertama kali di Palu pada tanggal 30 Juni 1930 atau 14 Muharram 1349 Hijriah oleh seorang tokoh yang bernama S. Idrus bin Salim Al–Jufri.

Perguruan ini bergerak dalam bidang pendidikan agama dan da'wah.

Adapun nama Al-Chairaat ini adalah bentuk jamak dari kata *Chair* yang berarti "kebajikan-kebajikan". Jadi nama ini dimaksudkan oleh tokoh pendirinya sebagai: kebajikan dunia dan akhirat.

1). Perkembangan dari Masa ke Masa

Pada mulanya yang menjadi guru dan pemimpin Perguruan ini hanya S. Idrus bin Salim Al-Jufri sendiri.

Setelah menamatkan murid-muridnya barulah menambah tenaga pengajarnya dan tokoh pendirinya lalu dijadikan sebagai guru utama atau guru besarnya. Selama beliau masih hidup maka pimpinan perguruan ini tetap berada di tangannya. Setelah wafat hingga saat ini pimpinan perguruan ini berpindah ke tangan putera beliau yang bernama H.S. Saggaf Muhammad bin Idrus Al-Jufri M.A.

Pada waktu mula didirikannya bentuk sistem dan cara pendidikannya berbentuk pondok. Di situlah murid-murid datang minta diajar dan memilih sendiri mempelajari mata pelajaran yang diinginkannya. Pada umumnya bertujuan untuk memperdalam pengetahuannya di bidang agama dan bahasa Arab.

Pengaturan waktu belajarnya adalah sebagai berikut:

- a). Selesai shalat subuh sampai jam 07.00 pagi belajar khusus *qiraah* langsung dijelaskan dan dibuka tanya-jawab.
- b). Jam 07.00 pagi sampai waktu Dhohor diberikan pelajaran dasar bahasa Arab yang dititik-beratkan pada pengetahuan dasar seperti *Nahwu* dan *Shorof* ditambah pelajaran *Tauhid* dan *Fiqhi*.
- c). Waktu Magrib sampai Isya' diberikan pelajaran mengaji dengan Tajwid.
- d). Sesudah Isya' diadakan tanya-jawab.

Mula-mula muridnya sekitar 60 orang dan mereka belajar tanpa dipungut bayaran. Tempat belajarnya masih belum menentu tapi berpindah-pindah kadang-kadang di mesjid kadang-kadang pula diadakan bergiliran dari rumah satu ke rumah lainnya. Bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Arab.

Setelah berlangsung tiga tahun maka atas inisiatif dari pendiri perguruan ini dibangunlah suatu tempat khusus untuk belajar. Tahun 1933 gedung pertamanya dibangun yang biayanya sebahagian besar ditanggung sendiri oleh S. Idrus bin Salim Al-

Jufri. gedung tersebut dapat menampung 200 orang murid.

Pada tahun 1934 perguruan ini sudah menghasilkan tamatan pertama sebanyak dua orang, itu H.M. Qasim Maragau dan Syech Abd. Rahman Al-Jufri.

Tahun 1935 penamatan kedua kalinya sebanyak 12 orang guru agama. Tamatan I dan II merupakan kader-kader pertama yang diberi kepercayaan menjadi guru, karena telah dibekali ilmu pengetahuan sebagai pegangan untuk menjadi muballigh maupun guru.

Di samping itu dihasilkan pula ratusan tamatan yang dibekali dengan jiwa keinsyafan dan kesadaran terhadap agama dan tanah air *Hubulwatan Minal Iman* (Cinta Tanah Air adalah sebahagian daripada Iman).

Di antara tamatannya tersebut ada yang menjabat Pegawai Syara' (Pamong Desa), ada yang terjun dalam Pergerakan Nasional, di antaranya ada yang gugur sebagai pahlawan bangsa dalam perjuangan pada tahun 1942 yaitu ketika timbul gerakan Merah Putih (Merebut kekuasaan dari pemerintah Belanda menjelang tibanya Jepang di wilayah Ampaña – Tojo, Poso).

Antara lain yang gugur tersebut dan mayatnya dibuang ke luar oleh Angkatan Bersenjata Belanda adalah Al Ustaz Abdussamad (Kepala Madrasah Al-Chairaat Cabang Dondo Ampaña) bersama lima orang kawannya.

Al Chairaat lalu berkembang dengan pesat, di mana-mana muncul pendirian cabang-cabang oleh para alumninya.

Sampai tahun 1942 cabang-cabang Al Chairaat tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah malah telah menyeberang ke Kalimantan Timur seperti Bulungan di Tarakan. Tercatat kurang lebih ada 40 cabangnya pada waktu itu. Tetapi ketika penjajahan Jepang tiba maka perguruan ini dilarang, bahkan gedungnya dijadikan gudang *Nantako*. Terpaksa Al Chairaat dinyatakan libur untuk masa yang tidak ditentukan oleh pimpinannya (dinyatakan dalam keadaan uzur).

Barulah dinyatakan dibuka kembali pada tanggal 17 Desember 1945 setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan dan tentara Jepang penyerah pada Sekutu. Madrasah Al Chairaat Pusat di Palu dibuka kembali oleh pimpinannya dengan satu sajak yang berbunyi:

”Berkibarlah Sang Saka Merah Putih Dengan Megahmu Diangkasa

Bumimu Indonesia untuk selama-lamanya.”

Pada waktu itu muridnya 250 orang dan gurunya enam orang di pusat Al Chairaat, Palu.

Pada tahun 1946, seluruh Cabang Madrasah dibuka kembali karena para ustaz (gurunya) tetap di tempatnya masing-masing. Di samping itu berdiri pula beberapa Cabang Baru di daerah Sulawesi Utara (Minahasa, Taruna, dan Bolaang Mongondow/Kotamobagu). Antara tahun 1945 sampai dengan 1950 Pusat Madrasah di Palu rata-rata tiap tahun menghasilkan 10–15 Ustaz muda.

Tahun 1948 sistem pendidikannya mulai meningkat karena diadakannya kelas-kelas sesuai dengan tingkat kecerdasan murid. Pada tahun 1951 sistem pendidikan dan pengajarannya mulai disesuaikan dengan sekolah negeri, maka didirikanlah *Madrasah Muallimin* khusus untuk mencetak guru-guru yang akan ditempatkan pada cabang-cabang Al Chairaat yang membutuhkannya. Mata pelajaran yang diberikan selain mata pelajaran agama juga mata pelajaran umum dan lama belajarnya 3 tahun. Pada tahun 1952 dengan pengalihan siswa kelas tertinggi dari sistem Sanawiyah yang lamanya satu tahun ditambah dua tahun maka dihasilkanlah lulusan ustaz-ustaz muda antara 20–25 orang. Hal ini berlangsung sampai tahun 1955.

Pada tahun 1956 didirikan lagi *Madrasah Lanjutan Pertama* sederajat dengan SMP Negeri. Pada bulan September didirikan lagi *Madrasah Pendidikan Guru Agama* sederajat dengan PGA Negeri. Selain itu rata-rata tiap kecamatan dalam empat kabupaten wilayah Sulawesi Tengah didirikan cabang-cabang perguruan tersebut dengan bantuan dana dari swadaya masyarakat setempat. Karena perkembangannya yang sudah begitu banyak cabang dan murid-muridnya, maka tokoh pendiri perguruan ini mulai memikirkan perlunya diusahakan mengadakan pertemuan untuk menggalang dan mengkoordinasikan perguruan ini agar terdapat jalinan kerja sama dan program yang teratur antara induk Al Chairaat di Palu dengan cabang-cabangnya. Hal ini terutama dirasakan perlu setelah pimpinannya mengadakan perjalanan keliling melihat dari dekat perkembangan cabang-cabangnya di luar palu.

Pada usianya yang ke-25 diadakanlah Mu'tamar I di Palu berlangsung dari 21 – 25 Agustus 1956. Sebagai hasil Mu'tamar

adalah tersusunnya Anggaran Dasar al Chairaat dan dengan demikian perguruan ini dijadikan sebagai satu organisasi bidang pendidikan yang lebih teratur administrasi dan pengelolaannya.

Utusan-utusan dari cabang bersama dengan pengurus induknya di Palu lalu memusyawarahkan program-program pengembangannya. Dalam Anggaran Dasar bab III pasal 4 hasil Mu'tamar tercantum tujuan Al Chairaat sebagai berikut:

- a). Perhimpunan ini bermaksud membentuk manusia susila yang bertaqwa kepada Allah swt, cakap, demokratis dan bertanggung-jawab terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara.
- b). Mengembang-luaskan tempat-tempat pendidikan agama.
- c). Perhimpunan ini bertujuan membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Pada tahun 1957 diusahakan oleh guru Besar Al Chairaat suatu Kulliah Hukum-Hukum Islam/Bahasa Arab (Al Qur'an) tingkat akademi sebagai persiapan *Universitas Islam Al Chairaat Sulawesi Tengah*. Murid-muridnya adalah mereka para Ustaz tamatan Muallimien yang telah mengikuti Kulliyah Pesantren 100% agama Islam selama setahun.

Pada tahun 1958 berdirilah Yayasan Pendidikan Al Chairaat dan untuk mengurus aktenya dikuasakan pada Z.A. Betalembah selaku Ketua I dan M. Nawawian Abdullah selaku Sekretaris Umum oleh S. Idrus bin Salim Al Jufri.

Demikianlah dengan Akte Fd. Notaris-Bupati Bidin/Kepala Daerah Donggala di Palu, pada tanggal 21 Agustus 1959 No. 20 dan didaftar dengan nomor Pengadilan Negeri Donggala di Palu, No. 8/1959 maka Al Chairaat sudah menjadi badan hukum. Dengan demikian maka madrasah-madrasah Al Chairaat telah mempunyai badan hukum dan ini mendorongnya kepada suatu perkembangan guna peningkatan yang lebih luas.

Pada tahun 1961, oleh Inspeksi Pendidikan Agama Dati II Donggala dilaksanakanlah suatu ujian negara/ujian guru agama untuk mendapatkan tenaga-tenaga tetap guru agama di SD - SD negeri. Dalam ujian ini telah lulus 26 orang berasal dari Tsamawiyah/Muallimin Al Chairaat dan tiga orang di antaranya suka rela menerima penempatan di Irian Barat. Selain itu sejak tahun ajaran 1958/1959 tiap tahun Al Chairaat mengikutsertakan siswanya mengikuti ujian akhir PGAN dan SMP Negeri dan

yang lulus mengikuti pelajaran ke SMA/SMEA Negeri. Bahkan sudah banyak alumninya yang diterima/melanjutkan ke IAIN Yogyakarta setelah lulus test. Sampai tahun 1962 cabang Madrasah sudah mencapai kurang lebih 100 buah dengan pelajarannya kurang lebih 12.000 orang dan para Ustaznya kurang lebih 200 orang. Ditambah dengan pusatnya dengan siswa kurang lebih 1000 orang dan Ustaznya kurang lebih 20 orang.

Pada 10 – 15 Agustus 1963 bertepatan tanggal 20 – 25 Rabiul Awal 1383 H diadakan Mukhtamar II di Ampana (Poso). Menyusul Mukhtamar ke III diadakan di Palu dari tanggal 1 s/d 6 Agustus 1970 bertepatan dengan diadakannya peringatan 40 tahun Al Chairaat.

Demikianlah dari Mukhtamar I sampai ke III Al Chairaat telah disempurnakan organisasi dan program pengelolaannya meliputi segi kegiatan pendidikan dan segi usaha da'wah. Adapun organisasi Al Chairaat disusun secara vertikal dari tingkat Pusat yang disebut Pengurus Besar, Tingkat Wilayah disebut Komisaris Wilayah, tingkat Kabupaten disebut Komisaris Daerah serta Pengurus Cabang.

Satu hal yang tidak ternilai harganya dalam perkembangan Al Chairaat adalah adanya pengaruh ajaran Islam yang telah merupakan pula salah satu ciri dan jiwa pondok, yaitu jiwa keikhlasan dan pengabdian dari pengasuh dan murid-muridnya yang telah tersebar di cabang-cabang Al Chairaat yang ada. Para tamatan sekolah ini banyak yang menduduki posisi penting baik dalam bidang pendidikan maupun di bidang pemerintahan terutama di Instansi-Instansi Departemen Agama di tingkat I, II dan Kecamatan, menjadi anggota DPRD, serta tokoh-tokoh dan Pemuka masyarakat.

2). Jenis dan Jumlah Sekolah Yang Dibinanya.

Al Chairaat sebagai salah satu lembaga yang berdasarkan Islam dalam kegiatannya berusaha keras serta memberikan perhatian khusus pada bidang pendidikan terutama menanamkan kepada anak didiknya dengan pendidikan agama, sehingga di mana-mana diusahakan membuka madrasah-madrasah, bahkan berdirinya suatu Cabang Al Chairaat dimulai dengan pembukaan madrasah.

Di bidang pendidikan ini Al Chairaat meletakkan suatu

tujuan: "... membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah swt, cakap, demokratis dan bertanggung jawab terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara".

Untuk mencapai tujuan ini maka Al Chairaat telah berusaha membuka sekolah-sekolah (madrasah-madrasah dari tingkat *Busthanul Athafal* (Taman kanak-kanak) sampai tingkat Perguruan Tinggi.

Mula-mula Al Chairaat mendirikan sebuah madrasah Al Islamiyah di kota Palu pada tanggal 30 Juni 1930 dengan muridnya sekitar 60 orang kemudian menyusul didirikan pula sekolah-sekolah madrasah di tempat-tempat lainnya di Sulawesi Tengah yang merupakan cabang-cabang dari madrasah induknya yang ada di Palu. Sehingga pada tahun 1977 rata-rata di tiap-tiap ~~kampung~~ kampung dalam kecamatan-kecamatan yang ada di empat kabupaten dalam wilayah Sulawesi Tengah terdapat madrasah-madrasah tingkat Ibtidaiyah.

Menurut data-data tahun 1977 dari kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu, Al Chairaat telah memiliki sekolah-sekolah seperti yang tercantum di bawah ini. Dalam hal ini jenis-jenis sekolah itu dikelompokkan dalam TK, SD, SLTP, SLTA walaupun dalam kenyataannya untuk tingkat SLTP dan SLTA ada bermacam-macam namanya.

Jenis Sekolah	Jumlahnya di tiap kabupaten			
	Donggala	Poso	Luwuk	Toli-Toli
1. Busthanul Athfal (Taman Kanak-kanak),	1	—	—	—
2. Ibtidaiyah (Sekolah Dasar Islam)	118 Memiliki kelas dari 2 s.d. 6 kebanyakan berkelas 3—4	80 Memiliki kelas dari 1 s.d. 6 terbanyak berkelas 3—4	14 Memiliki kelas 3—4	12 Memiliki kelas 2 s.d. 4 kebanyakan berkelas 2—3

3. Tsanawiyah (SLTP)	10 Memiliki kelas 1 s.d. 3	3 Memiliki kelas 3– 4	–	1 Memiliki 3 kelas
4. Aliyah (SLTA)	3 Memiliki kelas 2 s.d. 3	1 Memiliki 3 kelas	–	1 Memiliki 3 kelas
5. Universitas Is- lam Al Chairaat (Fakultas Syari' ah)	1	–	–	

Adapun jenis-jenis sekolah yang didirikan oleh Al Chairaat adalah sebagai berikut (menurut tulisan Dahlia Suaib dalam skripsinya "Al Chairaat dalam Perkembangan Islam di Kabupaten Donggala").

- a). Busthanul Athfal Al–Chairaat.
- b). Sekolah Dasar Islam Al–Chairaat. Usaha mendirikan ini adalah untuk:
 - (1) Membendung pengaruh Sekolah Dasar Injil yang mempengaruhi wali murid yang beragama Islam.
 - (2) Untuk menyadarkan sekurang-kurangnya mengurangi keinginan putera-putera Islam ke sekolah-sekolah Dasar yang diasuh oleh guru-guru yang tidak seagama dengan murid-murid yang diajar.
 - (3) Akibat pendidikan dari seorang guru yang beragama Islam akan membawa kesan pada hidup seseorang murid waktu ia telah dewasa.
- c). Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al Chairaat. Maksud mendirikan sekolah ini adalah menampung keinginan dari mereka yang menginginkan anaknya menjurus ke arah pendidikan umum yang berjiwa agama.
- d). Madrasah Ibtidaiyah Al Chairaat.
- e). Muallimin I 4 tahun Al Chairaat.

- f). Muallimin Uliyah 2 tahun Al Chairaat.
- g). Pendidikan Guru Agama Al Chairaat 4 tahun.
- h). Pendidikan Guru Agama Al Chairaat 6 tahun.
- i). Madrasah Diniyah Awwaliyah 4 tahun.
- j). Universitas Islam Al Chairaat (Universitas Al Chairaat).

Khusus Universitas Islam Al Chairaat yang terdapat di Palu, Ibukota Propinsi Sulawesi Tengah dan Ibukota kabupaten Donggala, didirikan pada tahun 1964 dengan membuka tiga Fakultas yaitu: Fakultas Tarbiyah, Fakultas Syari'ah dan Fakultas Ad'ab. Perguruan Tinggi ini beberapa tahun terpaksa terhenti dan baru aktif lagi pada tahun 1969 dengan satu Fakultas saja yaitu Fakultas Syari'ah dengan jumlah mahasiswa 121 orang dengan perincian Tingkat I: 59 orang, tingkat II: 35 orang dan tingkat III: 27 orang. Jumlah tenaga pengajarnya/dosen sebanyak 17 orang yang berasal dari tamatan berbagai Perguruan Tinggi.

Dekannya adalah H.S. Saggaf Al Jufri M.A. Alumnus Universitas Al-Azhar Cairo. Untuk meningkatkan mutu pendidikan Al Chairaat, maka dikirim pula kader-kadernya ke beberapa perguruan tinggi baik di Ujung Pandang maupun ke Yogyakarta.

Pada tahun 1973 telah diperoleh pula bantuan bea siswa dari raja Faisal dari Saudi Arabia sebanyak dua orang dan sejak Nopember 1973 telah berada di Saudi Arabia dua orang utusan Al Chairaat untuk belajar di mana masing-masing Salim Al Jufri dan M. Rais T. Rambua.

3). Murid-muridnya

Murid-murid perguruan Al Chairaat khususnya di pusat perguruan ini adalah berasal dari seluruh pelosok wilayah Propinsi Sulawesi Tengah. Mereka yang berasal dari luar kota Palu ditampung di asrama Al Chairaat sebanyak daya tampung asrama sedangkan yang lainnya mondok di rumah-rumah penduduk tanpa dipungut uang pemondokan. Murid-murid di cabang-cabang tidak disediakan asrama karena mereka tinggal di rumah masing-masing.

Oleh karena beberapa madrasah di cabang-cabang kebanyakan hanya melaksanakan pendidikan sampai kelas 4 atau 3, maka bagi yang berminat menamatkan pelajarannya sampai kelas terakhir harus melanjutkan ke Palu. Kegiatan para murid ini selain tekun belajar juga aktif berorganisasi di dalam wadah Persatuan

Pelajar Islam Al Chairaat dan wanita-wanitanya aktif dalam organisasi wanita Al Chairaat. Organisasi-organisasi ini selain ada di Pusat Al Chairaat Palu, juga dibentuk pada tiap Cabang dan melalui organisasi inilah para murid dapat belajar hidup bermasyarakat dan berorganisasi. Pada tahun 1959 berdasarkan Surat Kementerian Agama tanggal 30 Agustus 1958 No.A/VN/10986 berikut lampirannya, maka Sulawesi Tengah diberi jatah dua orang untuk melanjutkan ke Universitas Al Azhar Cairo. Kesempatan ini dipergunakan Al Chairaat mengirimkan utusannya masing-masing: Saggaf Bin Muhammad Al Jufri dan A. Hamid Mahmadi. Sampai sekarang sudah banyak mahasiswa Al Chairaat yang dikirim ke Universitas Al Azhar atau ke Universitas Medina.

Menurut data-data yang ada di kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu, tahun 1977 banyaknya murid-murid Al Chairaat seperti di bawah ini.

Data tahun 1977

Jenis Sekolah	Banyaknya murid di tiap kabupaten.			
	Donggala	Poso	Luwuk	Toli-Toli
1. Ibtidaiyah (SD Islam).	9052	5875	766	699
2. Tsanawiyah	466	359	—	46
3. Aliyah	135	79	—	38

4). Kurikulumnya

Sejak dibukanya Perguruan Al Chairaat sampai tahun 1967 mata pelajaran yang diberikan adalah semata-mata pelajaran agama dan bahasa Arab. Sejak tahun 1951 sistem pendidikan dan pengajarannya mulai disesuaikan dengan sekolah negeri. Mata pelajaran yang diberikan mata pelajaran umum dan waktu belajar tingkat Ibtidaiyah (SD) dijadikan 6 tahun.

Adapun kurikulum yang dipakai pada madrasah-madrasah adalah sebagai berikut:

- a). Bustanul Athfal Al Chairaat, disesuaikan dengan kurikulum TK Negeri.
 - b). Madrasah Ibtidaiyah Al Chairaat, Pendidikan Guru Agama, 4 tahun dan 6 tahun disesuaikan dengan kurikulum Pendidikan Agama dari Departemen Agama Republik Indonesia yaitu: Madrasah Ibtidaiyah diberikan 40% pelajaran agama dan 60% pelajaran umum. Sedang PGA 50% agama dan 50% umum.
 - c). Muallimin diberikan mata pelajaran agama 60% dan umum 40%, yang terdiri atas Muallimin pertama 4 tahun dan Muallimin Tingkat Atas 2 tahun.
 - d). Madrasah Diniyah Awwaliyah diberikan mata pelajaran agama 100% dengan lama belajar 4 tahun diadakan pada sore hari.
 - e). Sekolah Menengah Pertama dan Tingkat Atas diberi pelajaran agama 20% dan umum 80% dengan lama belajar masing-masing 3 tahun.
 - f). Universitas Islam Al Chairaat disesuaikan dengan kurikulum Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
- 5). Tenaga Pengajar

Pada awal didirikannya maka tenaga Pengajarnya hanya seorang, yaitu pimpinannya sendiri S. Idrus bin Salim Al Jufri. Setelah tamatannya barulah tamatan angkatan I dan II dijadikan tenaga pengajar bantuan baik di Pusat Al Chairaat maupun di cabang-cabangnya yang sudah didirikan pada waktu itu. Dapat dikatakan bahagian terbesar tenaga-tenaga pengajar di cabang-cabang adalah alumni dari Al Chairaat Pusat Palu.

Dengan dibukanya Madrasah Muallimin 3 tahun pada tahun 1951 maka tamatan madrasah inilah yang dipersiapkan untuk menjadi guru pengajar dan ditempatkan di cabang-cabang yang membutuhkannya. Kemudian setelah adanya tamatan-tamatan PGA Al Chairaat maka alumni-alumni PGA ini ikut memperkuat staf Pengajar di Al Chairaat. Sehingga dapat dikatakan bahwa tenaga pengajar pada perguruan Al Chairaat sebagian besar adalah tamatan PGA Negeri, PGA 6 tahun Al Chairaat dan Muallimin Aliyah. Mereka-mereka ini merupakan guru tetap berbeslit Ya-

yanan di samping itu juga ada guru tetap bantuan pemerintah baik yang berbeslit Departemen Agama maupun dari Departemen P dan K, dan juga ada guru sukarela yang mendapat honomarium sekedarnya dari Yayasan.

Dari kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah di Palu diperoleh data-data tenaga guru pada sekolah-sekolah Al Chairaat di seluruh Sulawesi Tengah pada tahun 1977 sebagai berikut:

jenis Sekolah	Banyaknya guru pada tiap kabupaten							
	Donggala		Poso		Luwuk		Toli-Toli	
	Swasta (AlChairaat	Ne ge ri	Al Cha iraat	Ne ge ri	Al Cha iraat	Ne ge ri	AlCha iraat	Ne ge ri
1. Ibtidaiyah	181	4	142	—	40	—	22	1
2. Tsanawiyah	24	2	16	1	—	—	10	1
3. Aliyah	11	3	10	—	—	—	10	—

6). Pembiayaan

Pada mulanya sebagian besar pembiayaan perguruan Al Chairaat waktu didirikannya berasal dari sumbangan masyarakat dan dari S. Idrus bin Al Jufri sendiri bersama keluarga isterinya. setelah mengadakan Mukhtar I tahun 1956 yang menghasilkan Anggaran Dasar Al Chairaat, maka pada Bab IV Anggaran Dasar tersebut adalah mengenai Penghasilan dan kekayaan. Pada Pasal 10 tertera:

Penghasilan dan kekayaan dari perhimpunan ini diperoleh dari uang pangkal, iuran, derma, shodaqoh dan waqaf serta usaha-usaha yang halal lainnya.

Secara terperinci dalam Anggaran Rumah Tangga bab VIII Pasal 17 berbunyi: uang Pangkal.

1. Tiap madrasah tingkat rendah membayar kepada Pengurus Besar Al Chairaat sebesar Rp. 1000,—
2. Tiap madrasah tingkat menengah membayar kepada Pengurus Besar Al Chairaat sebesar Rp. 2000,—
3. Tiap madrasah tingkat Atas membayar kepada Pengurus Besar Al Chairaat sebesar Rp. 2500,—
4. Tiap anggota membayar kepada Pengurus Besar Al Chairaat sebesar Rp. 50,—

Pasal 18: Iuran.

1. Tiap Madrasah tingkat rendah membayar kepada Pengurus Besar Al Chairaat sebesar Rp. 100,— per-bulan.
2. Tiap Madrasah tingkat Menengah membayar kepada Pengurus Besar Al chairaat sebesar Rp. 200,— tiap bulan.
3. Tiap Madrasah tingkat Atas membayar kepada Pengurus Besar Al Chairaat sebesar Rp. 250,— tiap bulan.
4. Tiap anggota membayar sebesar Rp. 10,—

Di samping sumber keuangan di atas, Al Chairaat juga menerima bantuan insidental dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

Jadi sumber dana pembiayaan Perguruan ini dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a). Sumbangan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat berupa material dan tenaga pengajar.
- b). Hasil dari pembayaran para siswa.
- c). Hasil dari waqaf baik berbentuk tanah, pohon kelapa ataupun sawah ladang.
- d). Hasil zakat dan derma dari masyarakat Islam.
- e). hasil dari celengan yang diedarkan pada setiap perayaan Hari Besar Islam atau Ulang Tahun Al Chairaat yang diadakan oleh Al Chairaat.
- f). Sumbangan-sumbangan insidental.
- g). Sumbangan-sumbangan dari Donatur-donatur Al Chairaat.

Untuk pembangunan kampus Pondok Al Chairaat, Presiden Suharto telah memberikan bantuan sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan telah diresmikan penggunaannya oleh Menteri Agama Republik Indonesia pada waktu itu, Prof. Dr. Mukti Ali atas nama Presiden.

- 7). Tokoh dan Pemikiran

a). Riwayat Hidup

Pendiri dari perguruan Al Chairaat ini bernama S. Idrus bin Salim Al Jufri berasal dari Hadramaut Arab Selatan. Beliau dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Sya'ban 1309 Hijriah atau tahun 1889 Masehi di kota Terim Hadramaut. Menurut garis silsilahnya beliau masih turunan dari Khalifah ke IV (Ali bin Abu Thalib).³⁹).

Beliau adalah putera ke-empat dari enam bersaudara. Ayahnya adalah Mufti Hadramaut yang bernama Salim Bin 'Alawi Al-Jufri. Sebagai Mufti maka ayahnya ini termasuk ulama kenamaan pada masanya di Hadramaut. Sedangkan ibunya bernama Syarifah Nur yang hubungan keluarganya erat dengan Aru Matoa Wajo Sengkang, Sulawesi Selatan.

Jadi dari pihak ibunya beliau berdarah bangsawan Bugis.

b) Pendidikan dan Perjuangannya

Selain mendapat pendidikan dan asuhan dari orang tuanya sendiri yang menjadi Mufti Hadramaut pada waktu itu, ia disekolahkan sampai menduduki Perguruan Tinggi Ar-Rabithatul Alawiyah di Taris Hadramaut. Beliau memiliki otak yang cerdas dan tekun menerima setiap pelajaran yang diperolehnya, sehingga dikagumi oleh rekan-rekannya. Dalam kesempatan menunaikan rukun Islam yang ke - 5 naik haji bersama ayahnya, disempatkannya mengikuti kuliah pada ulama besar dan kenamaan di Mekkah selama ± 6 bulan baru kembali ke negerinya.

Ketika pulang dari menunaikan rukun Haji tersebut beliau baru berusia 18 tahun, tapi pada saat itu pulalah jabatan Mufti yang semula dipegang oleh ayahnya lalu diserahkan ke tangannya. Di samping jabatannya selaku Mufti Hadramaut beliau melanjutkan pula usaha ayahnya mengembangkan ilmu pengetahuan dan pendidikan dengan memimpin lembaga Pendidikan Al Chairaat di Taris Hadramaut.

Pada waktu itu Hadramaut menjadi wilayah yang dikuasai oleh penjajah Inggris hingga usaha pendidikannya ini selalu mendapat tekanan dari penjajah Inggris. Akibat tekanan penjajah Inggris atas bangsa dan tanah airnya ini pulalah, maka S. Idrus

39) K.H.Z.A Betalembah, *Al-Chairaat Dalam Lintasan Sejarah*, Ketua Umum Panitia Mukhtar ke III dan Peringatan 40 tahun Al Chairaat, Pidato pada Mukhtar Al Chairaat ke III, tanggal 1 Agustus 1970 di Palu, Sulawesi Tengah.

bin Salim Al Jufri melakukan gerakan di bawah tanah guna membebaskan bangsa dan tanah airnya dari kekuasaan Inggris. Dalam perjuangannya ini ia bekerja sama dengan rekannya seorang ulama bernama S. Abd. Rahman Ubaidillah. Pada tahun 1925 mereka berdua bermaksud mengadakan perjalanan keliling ke negara tetangganya seperti Yaman, Mesir dan sebagainya untuk mendapatkan bantuan dan kerja sama menghadapi penjajah Inggris ketika itu.

Akan tetapi usahanya ini gagal, karena setibanya di kota pelabuhan Aden yang merupakan salah satu basis pertahanan militer Inggris di Timur Tengah, surat-suratnya disita oleh aparat pemerintah Inggris, tapi masih untung karena beliau tak ditahan hanya diberi pilihan alternatif kembali ke Hadramaut atau mengubah tujuannya ke Asia Tenggara. Yang jelas dia dilarang melanjutkan rencana perjalanannya yang semula.

Dipilihnya ke Asia Tenggara dengan maksud untuk melanjutkan usahanya mendirikan suatu lembaga perguruan Al Chairaat melanjutkan usahanya ketika masih di Hadramaut, di samping akan mengunjungi keluarganya di Indonesia (Waktu itu *Nederlandsch Indie*).

Kunjungannya ke Indonesia ketika itu merupakan kunjungan ke dua kalinya, karena yang pertama kali dilakukannya adalah ketika masih kecil bersama ayahnya menengok keluarganya di Jawa dan Sulawesi. Setibanya di Jawa beliau terus aktif dalam bidang pendidikan dan da'wah. Mula-mula memimpin madrasah *Al-Rabithatul Alawiyah* di Jakarta, kemudian dipindah ke Solo memimpin Madrasah Ar-Rabithatul Alawiyah Solo. Setelah itu beliau pindah ke Jombang lalu kembali ke Pekalongan. Akhirnya pada tahun 1928 tiba di Palu Sulawesi Tengah dalam perjalannya menuju ke Manado untuk menziarahi kuburan saudara kandungnya yang bernama Syech bin Salim Al Jufri.

Situasi di Indonesia yang ditemuinya pada waktu itu adalah sama dengan apa yang ditinggalkannya di Hadramaut, yaitu mulai tumbuh dan berkembangnya jiwa nasionalisme pemuda-pemuda Indonesia bersama tokoh-tokoh nasionalnya, memperjuangkan bebasnya bangsa dan tanah air Indonesia dari penjajahan Belanda, dengan berdirinya beberapa partai pergerakan nasional.

Sebagai tokoh yang memiliki cita-cita luhur ingin meman-

faatkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya membimbing bangsa dan umat seagamanya menuju pada kebebasan dari kebodohan dan penindasan penjajah, maka semangat nasionalisme yang dimilikinya disemaikannya pula pada anak didiknya melalui pendidikan.

Ketika itu keadaan masyarakat Sulawesi Tengah pada umumnya sedang berada dalam situasi tidak tenteram akibat penindasan penjajah Belanda. Oleh sebab itu kedatangannya di Palu mendapat sambutan hangat dari tokoh-tokoh pergerakan bahkan dari Magau (bangsawan setempat) yang berjiwa nasional, sehingga akhirnya tidak jadi ke Manado tapi lalu menetap di Palu dan kemudian menikah dengan adik perempuan dari Daeng Pawindu. Daeng Pawindu adalah seorang tokoh pergerakan nasional yang pernah dipenjarakan di Sukamiskin Bandung oleh Belanda karena kegiatannya sebagai pimpinan PSII di Palu.

Pada waktu mula tiba di Sulawesi Tengah beliau menemui golongan Arab yang lebih dahulu bermukim di tempat ini untuk merencanakan bersama membuka lembaga pendidikan di samping menjalankan da'wah agama akan tetapi mendapat tantangan karena golongan Arab khawatir status sosialnya akan mengalami kemunduran, karena pada waktu itu berkembang anggapan masyarakat, bahwa bangsa Arab memiliki status sosial yang istimewa karena mereka dari tanah Arab tempat asal dari ajaran Islam.

Tetapi berkat ketabahan dan pengertian yang dikemukakan beliau akhirnya golongan Arab tersebut menyetujui rencana usaha pendidikannya malah ada di antaranya yang ikut pula menuntut pengetahuan yang diberikan oleh beliau. Mereka-mereka inilah bersama dengan anak Daerah Sulawesi Tengah bekas murid asuhannya yang kelak menjadi tokoh-tokoh pelanjut pengembangan usahanya setelah beliau wafat.

Sesuai cara pendidikan agama yang berlaku pada waktu itu yaitu pendidikan dengan sistem tiap murid yang ingin belajar mohon kepada kiyai agar diajarkan pelajaran sesuai dengan keinginan masing-masing sehingga para santri menerima pelajaran yang tak sama. Jadi bentuk mengajarnya masih sistem individual, tempat belajar tidak menentu kadang di rumah kadang pula di mesjid.

Mula-mula beliau mengajar dengan meminjam sepetak toko dan berlangsung ± empat bulan dilanjutkan kemudian di ru-

mah keluarga Daeng Maroca dan dalam mengajar itu memakai bahasa Arab karena belum begitu menguasai bahasa Daerah atau Bahasa Melayu (Indonesia), sehingga diajarkan tukar menukar bahasa dengan menggunakan alat peraga.

Setelah ada di antara muridnya yang dianggap mampu lalu diangkat menjadi pembantu⁴⁰). Keadaan ini berlangsung sampai 14 Muharram 1349 H atau 30 Juni 1930 saat mulai diresmikan pembukaan sebuah lembaga pendidikan yang disebut Perguruan Al Chairaat oleh beliau, di mana beliau menjadi pemimpin dan guru tunggalnya.

Yang mula-mula menyambut baik gagasan S. Idrus bin Salim Al Jufri adalah tokoh golongan Arab bernama Mahmud Rifai di Wani yang bertempat tinggal di kecamatan Tawaili ± 20 km dari Palu. Tokoh tersebut sudah menyiapkan ruang belajar dengan alat pendidikannya beserta murid-murid yang sudah siap untuk belajar. Mendengar ini maka tokoh Arab di Palu bernama Nasir bin Chamis Al Amiri dan S. Abd. Rahman bin Husen Al-Jufri segera ke Wani meminta pada beliau agar pembukaan madrasah dialihkan ke Palu.

Demikianlah lembaga pendidikan Al Chairaat ini beliau bina dengan tekun dan semakin berkembang walaupun menghadapi tantangan yang cukup berat antara lain dari segi pembiayaan. Tapi dengan usaha beliau ditambah sumbangan dari masyarakat setempat terutama bantuan material dan moril dari keluarga kakak iparnya (Daeng Pawindu) yang hartawan maka pada tahun 1933 berhasillah dibangun sebuah gedung pertama Al Chairaat dengan kapasitas daya tampung 200 orang murid. Dari pusatnya di Palu akhirnya menyebar usaha pendidikan Al Chairaat ini ke seluruh pelosok daerah Sulawesi Tengah, Maluku, Kalimantan, Sulawesi Utara dan Irian Jaya yang dilaksanakan oleh para alumnusnya.

Sebagai lembaga pendidikan swasta yang berjiwa agama dan nasional, maka Al Chairaat tak lepas dari pengawasan dan kecurigaan pemerintah Belanda. Pada tahun 1939 gedung madrasah milik Al Chairaat ini hendak disita oleh pemerintah Belanda dengan alasan yang dibuat-buat, bahwa tidak membayar pajak

40). Dahlia Suaeb, *Al Chairaat dalam perkembangan Islam di Kabupaten Donggala*, Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana dalam Ilmu Ushuluddin pada IAIN Sunan-kalijaga Yogyakarta, tahun 1975, hal. 35 - 36.

tanah, tetapi usaha penyitaan ini dapat digagalkan atas bantuan perlindungan dari Magau (Raja) Palu Caco Ijazah. Alasan kecurigaan Belanda sebenarnya adalah karena Lembaga Pendidikan Al Chairaat ini menanamkan pada muridnya "Cinta tanah air itu sebahagian dari pada iman". Juga karena S. Idrus bin Salim Al Jufri menggunakan literatur *Idhatan Nasyihin* karangan Mustafa Al Ghayalani Beirut, yang berisi tentang jihad dan perjuangan. Hal ini menyebabkan inspektur Belanda dari Manado datang menginspeksi Madrasah tersebut.

Dengan tibanya kekuasaan Jepang pada awal 1942, maka penjajah Jepang mencurigai pula lembaga pendidikan ini. *Toketai* dan *Kempetai* mengeluarkan larangan keras atas aktivitas Al Chairaat baik di Pusat maupun cabang-cabangnya yang sudah ada. Akibat larangan ini maka terpaksa pimpinan Al Cahiraat. S. Idrus bin Salim Al Jufri meliburkan Madrasahny sampai batas waktu yang tak ditentukan (keadaan uzur), karena gedungnya dijadikan gudang *Nantako*, maka terpaksa beliau sekeluarga bersama murid-muridnya pindah menyingkir ke Pewunu ke kampung kakak iparnya (Daeng Pawindu). Di sanalah secara sembunyi-sembunyi dilanjutkan pendidikan pada murid-murid yang menyertainya menyingkir sebanyak ± 70 orang.

Pada tahun 1945 setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, maka setelah mendengar berita gembira itu beliau kemudian berdoa dengan khusuk sebagai berikut:

"Semoga Allah Yang maha Kuasa senantiasa memberkati kemenangan yang sukses kepada rakyat Indonesia untuk memper-tahankan kemerdekaan Tanah Airnya.⁴¹⁾

Dengan menyerahnya Jepang kepada Sekutu maka pada 17 Desember 1945 Perguruan Al Chairaat dinyatakan resmi dibuka kembali oleh beliau dengan membaca sajak:

*Rayatal 'Izzi Rafri fi Zamani arduha Wajibaluha
chadran.*

Kullu uummatin laha ramzu 'Izzin.

Wa ramzu izzina alharau Wal baidhau.

artinya: Wahai bendera kebangsaan berkibarlah di angkasa
di atas bumi di gunung nan hijau.

tiap bangsa punya lambang kemuliaan dan lambang

41) K.H.A.Z. Abidin Betalembah, *Al Chairaat Dalam Lintasan Sejarah*.

kemuliaan kita adalah merah putih.^{4 2}).

Sejak berdirinya Al Chairaat tahun 1930 pimpinan dipegang terus oleh S. Idrus bin Salim Al Jufri sampai wafatnya pada 22 Desember 1969.

Adapun pemikiran tokoh Al Chairaat ini tentang pendidikan dapat dikemukakan sebagai berikut.

Beliau adalah seorang yang memiliki rasa tak puas apa bila Ilmu yang dimilikinya tak diamalkannya untuk mengangkat derajat orang lain atau bangsa seagamanya dari kebodohan dan ketaktahuan.

Dengan kata lain semboyan beliau adalah Ilmu yang kita miliki harus kita teruskan kepada orang lain agar orang lain dapat pula ikut memiliki dan mengamalkannya. Karena itu perlu dilaksanakan pengoperan itu melalui sistem yang teratur dan terencana yaitu sekolah. Hal yang mendorongnya pula untuk menggiatkan pendidikan khususnya pendidikan agama adalah karena melalui pendidikan, da'wah agama akan lebih lancar dilaksanakan dan jiwa perjuangan dapat ditanamkan kepada anak didik. Pada masa itu walaupun di Sulawesi Tengah agama Islam sudah berkembang dan mulai banyak pengikutnya, akan tetapi kepercayaan lama masyarakat yang animisme dan politeisme masih tetap merajalela.

Ditambah pula situasi kristenisasi yang dibantu pemerintah Belanda pada saat itu berlangsung kegiatannya sampai di pasar-pasar bahkan mereka sampai memasuki mesjid Pesaku Palu.^{4 3})

Karena perkembangannya yang semakin pesat di mana cabang-cabangnya makin bertambah, maka pada usia ke 25 dari lembaga pendidikan ini pendirinya sudah menganggap perlu dibentuk suatu organisasi yang akan mengelolanya lebih lanjut. Diadakanlah Muktamar I Al Chairaat dari 21 - 26 Agustus 1956 bertempat di Palu dihadiri utusan dan cabang-cabangnya sudah ada.

Hasil Muktamar tersebut adalah tersusunnya organisasi Perguruan Al Chairaat dan berhasilnya disusun Anggaran Dasarnya

42). *Loc. cit.*

43). Dahlia Suaeb, *Al Chairaat dalam perkembangan Islam di kabupaten Donggala*, Skripsi untuk mencapai gelar Sarjana. Dalam Ilmu Ushuluddin pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1975.

serta program kerjanya.

Dalam Anggaran Dasarnya Bab II pasal 3 tercantum: Asas Al Chairaat: Perhimpunan ini berdasar Islam berhaluan *Ahlu Sunah Wal Jama'ah* dengan ketentuan:

- (1) Aqidah Asyariah.
- (2) mazhab: Syafi'i.

Tujuan Al Chairaat tercantum dalam Anggaran Dasar Bab III pasal 4 berbunyi:

- (1) Perhimpunan ini bermaksud membentuk manusia susila yang bertaqwa kepada Allah swt, cakap, demokratis dan bertanggung-jawab terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara.
- (2) Mengembang luaskan tempat-tempat pendidikan agama.
- (3) Perhimpunan ini bertujuan membantu mewujudkan masyarakat yang adil makmur yang diridhai oleh Allah swt.

Jadi dalam bidang pendidikan Al Chairaat meletakkan suatu tujuan yaitu: ". . . membentuk manusia yang bertaqwa kepada Allah swt, cakap, demokratis dan bertanggung-jawab terhadap pembangunan agama, bangsa dan negara."

Usaha beliau dalam membina lembaga pendidikannya di Palu diiringi pula dengan menambah bangunan sarana fisik seperti membangun gedung madrasah dua tingkat, membangun mesjid Chairaat serta asrama pelajar. Semuanya terdapat di suatu lokasi, yaitu di atas areal tanah kampus Al Chairaat di kampung Kamonji Palu, dengan sumbangan dana secara gotong royong dari masyarakat Islam Sulawesi Tengah.

Kemudian setelah beliau wafat, dibangunlah kampus Pondok Pesantren Al Chairaat di samping bangunan lama yang sudah ada. Biaya pembangunannya diperoleh dari bantuan Presiden Soeharto sebesar 50.000.000, rupiah.

4. Tokoh-tokoh dan Pemikirannya

Untuk membicarakan para tokoh dan riwayat hidup serta pandangan mereka tentang pendidikan di daerah Sulawesi Tengah agak sulit sekali untuk mengungkapkannya satu-per satu karena yang mendirikan sekolah-sekolah pada zaman pergerakan nasio-

nal itu adalah organisasi-organisasi yang telah jelas landasan dan tujuan perjuangannya masing-masing dalam usaha memperjuangkan nasib buruk bangsa dan tanah air di tangan penjajah bangsa Belanda waktu itu.

Baik organisasi-organisasi yang berdasarkan agama Islam maupun organisasi-organisasi berdasarkan paham nasionalisme sama-sama berusaha dan berjuang mendidik para generasi muda untuk menjadi cerdas, berkesadaran hidup berbangsa dan bertanah air yang tinggi serta mempunyai harga diri sama dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia ini.

Untuk itu maka perlu mendirikan sekolah-sekolah yang dapat memberikan pelajaran-pelajaran untuk menanamkan rasa harga diri, percaya pada diri sendiri dalam usaha memperjuangkan dan membebaskan diri dari kungkungan penjajah yang serakah kepada murid-murid pada sekolah-sekolah yang ada.

Tokoh-tokoh para pendiri sekolah pergerakan nasional seperti yang telah disebutkan di atas pada masa-masa revolusi fisik banyak sekali di antara mereka ditangkap dan mendapat siksaan luar biasa selama dalam tahanan sesudah kembalinya kekuasaan Belanda (NICA) di daerah Sulawesi Tengah setelah proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945.

Salah seorang di antaranya adalah Su' dan Kirdiat, bekas pimpinan *Islamiyah School* di Bunta yang meninggal dunia di kamp penjara militer Layang, Ujung Pandang, sebelum pengakuan kedaulatan tanggal 27 Desember 1949, karena lidahnya ditusuk-tusuk dengan jarum. Su' dan Kirdiat adalah kepala Bagian Penerangan dari komite 12 pada perebutan kekuasaan oleh pemuda Gerakan Merah Putih di Luwuk dari tangan pemerintah Belanda pada tanggal 12 Pebruari 1942 sesaat sebelum Jepang datang.

BAB V

PENDIDIKAN ZAMAN JEPANG

A. PENDIDIKAN PEMERINTAH

1. Pendidikan Dasar

Selama masa pemerintahan militer Jepang di daerah Sulawesi Tengah jenis sekolah yang melaksanakan pendidikan dasar bagi masyarakat di daerah ini ada dua:

- a. Sekolah Rakyat berkelas 3 (menamatkan murid 3 tahun sekali) terdapat di kampung-kampung yang telah cukup banyak penduduknya sesuai dengan peraturan persyaratan dapat didirikannya sebuah sekolah di tempat tersebut (1000 - 2000 orang). Sekolah Rakyat berkelas 3 ini dalam bahasa Jepang disebut *Kogakko*.
- b. Sekolah Rakyat berkelas 6 (menamatkan murid 6 tahun sekali) terdapat pada kota-kota tempat didirikannya *Vervolgschool* (Sekolah Sambungan) yang berkelas 5 pada Zaman penjajahan Belanda dahulu. Semua sekolah rakyat berkelas 5 (*Vervolgschool*) di Zaman Belanda, pada masa pemerintahan militer Jepang dijadikan sekolah berkelas 6. Dalam bahasa Jepang sekolah ini disebut Futsu Yogyo Kogakko. 1)

Selama Jepang berkuasa pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak di sekolah-sekolah tidak berjalan dengan baik sebagaimana mestinya, jika dibandingkan dengan masa sebelumnya. Lebih-lebih pada masa setahun terakhir pendudukan pemerintahan militer Jepang di Sulawesi Tengah, menjelang pertengahan tahun 1944 - 1945.

Pada Zaman Jepang itu pendidikan kecerdasan/pengembangan intelektual para murid kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Yang diutamakan adalah mata pelajaran pendidikan jasmani guna melatih fisik dan mental para murid supaya kuat dan berani melawan jika ada serangan musuh sewaktu-waktu.

Bagi murid-murid mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 tiap

1). Informasi hasil wawancara dengan Bapak Lakuning di Kampung Bungin, Luwuk, Tanggal 23 September 1980.

pagi sebelum masuk sekolah untuk belajar, diadakan upacara penghormatan terhadap bendera Jepang (*Hinomaru*) dan kepada kaisar Jepang, *Tenno Heika* dengan menundukkan badan dan kepala menghadap ke timur. Sesudah itu diadakan gerak badan masal yang dipimpin oleh salah seorang guru atau murid yang telah mendapatkan latihan sebelumnya dari seorang militer Jepang. Pemimpin gerak badan masal ini berdiri di suatu tempat yang tinggi sejenis panggung agar dapat dilihat oleh murid-murid yang berdiri di bagian paling belakang.

Gerak badan masal (*taiso*) ini dilakukan sambil diiringi dengan lagu (nyanyian) bersemangat yang dinyanyikan bersama-sama oleh semua murid yang mengikuti gerak badan tersebut.

Kepada murid-murid kelas 5 dan 6 kadang-kadang setelah gerak badan masal selesai, mereka belum langsung masuk kelas untuk belajar tetapi masih diberikan mereka latihan khusus perang-perangan, menyerang dan mencoba merebut senjata dari lawan dan berusaha membela diri jika ada serangan musuh datang dan lain-lain. Setelah itu baru masuk ke ruangan kelas untuk belajar, dan tentu saja tidak semua mata pelajaran pada hari itu dapat diikuti jam pelajaran sudah selesai.

Pada masa itu kegiatan belajar anak-anak lebih banyak dikerahkan kepada kerja bakti (*kinrohosi*) di luar sekolah seperti membantu pekerjaan di kebun, sawah, memperbaiki dan membersihkan jalan, parit (got), menanam pohon jarak dan yute untuk dibuat karung (goni) dan sebagainya.

Kegiatan murid-murid membantu pekerjaan di kebun, sawah, membersihkan jalan, parit, menanam pohon jarak dan yute seperti tersebut di atas dilakukan terbanyak di luar jam sekolah atau sesudah jam pelajaran selesai. Pukul 14.00 sore anak-anak mulai lagi berkumpul di sekolah untuk melakukan kerja bakti di tempat-tempat yang telah ditentukan.

Di Toli-Toli pada waktu sore hari anak-anak sekolah di suruh pergi ke sungai mengambil batu, kerikil untuk dibuat benteng pertahanan Jepang, atau ke sawah untuk membersihkan rumput dan menangkap membunuh walangsangit di bawah pimpinan guru-guru yang ditugaskan untuk mengawasinya. Jadi pada waktu itu sekolah otomatis berlangsung dua kali sehari yaitu pagi dan sore. Malam harinya giliran para guru dan pegawai masuk sekolah untuk belajar bahasa Jepang (menulis dan membaca huruf Jepang) yang diberikan oleh seorang guru bang-

sa Jepang. 2)

Latihan fisik dan mental serta disiplin kerja yang sangat ketat benar-benar dilaksanakan secara konsekuen dalam semua kegiatan murid-murid, baik kegiatan di dalam kelas pagi hari maupun kegiatan kerja bakti (*kinrohosi*) diluar jam pelajaran sekolah sore hari. Siapa datang terlambat dari jam kerja yang telah ditentukan pasti akan mendapat pukulan dan siksaan fisik luar biasa. Dengan demikian benar-benar anak-anak menjadi terlatih melakukan pekerjaan dengan disiplin ala militer Jepang. Selama pemerintahan Jepang di daerah Sulawesi Tengah benar-benar berlaku proses Japanisasi dalam pendidikan, yaitu membuat anak-anak Indonesia menjadikannya sebagai bangsa Jepang.

Yang paling menyedihkan pada masa itu ialah ditiadaknya pendidikan moral (budi pekerti) bagi murid-murid di sekolah-sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Lebih-lebih lagi sekolah swasta yang lebih banyak mengajarkan mata pelajaran agama kepada murid-muridnya daripada mata pelajaran umum, baik yang diselenggarakan oleh organisasi Islam maupun oleh organisasi Kristen dilarang dibuka dan diperintahkan supaya ditutup.

Hanya sekolah-sekolah swasta yang mengajarkan mata pelajaran umum kepada murid-muridnya saja boleh berjalan terus tetapi mendapat pengawasan ketat dari pemerintahan Jepang. Mata pelajaran agama hanya boleh diberikan kepada anak-anak umur 16 tahun ke atas dan hanya boleh dilaksanakan di tempat-tempat ibadah seperti mesjid-mesjid atau gereja-gereja. Oleh sebab itu menjadi kenyataan dalam masyarakat kemudian setelah selesai perang kebanyakan anak-anak yang mendapat pelajaran di sekolah selama pendudukan Jepang tidak tahu etiket dan kurang menghargai kepada wibawa orang tuanya.

Pendidikan Menengah Umum pada masa pemerintahan militer Jepang tidak terdapat di daerah Sulawesi Tengah.

2. Pendidikan Kejuruan

a. Pendidikan guru 2 tahun disebut *Kyoin Roseinso* terdapat pada kota-kota bekas tempat didirikannya CVO (*Cur-*

2). Informasi hasil wawancara dengan Bapak Salim Abdul Kasim Batalipu di Kampung Baru, Toli-Toli, tanggal 16 Nopember 1979.

sus Volks Onderwijzer) atau *Namiddag Cursus* (kursus Petang) seperti di Luwuk, Palu dan Toli-Toli.

Sekolah Pendidikan Guru Zending di Poso selama pendudukan Jepang ditutup, tetapi oleh pemerintah Jepang didirikan sekolah pendidikan guru 2 tahun *Kyoin Roseinso* di tempat itu, dipimpin oleh seorang bangsa Jepang.

- b. Sekolah kejuruan lainnya yang didirikan oleh Jepang pada waktu itu ialah Sekolah Pertanian yang berlangsung enam bulan lamanya. Sekolah ini menamatkan murid-muridnya selama enam bulan sekali yang dalam bahasa Jepang disebut *Nomindojo*. Sekolah Pertanian atau *Nomindojo* ini terdapat di Kabupaten Donggala (Kalawara) dan di Kabupaten Poso (Tentena).

Selama enam bulan mengikuti pelajaran di *Nomindojo* ini para murid (pemuda) benar-benar dilatih fisik dan mental mereka untuk menjadi orang kuat dan tabah menghadapi segala macam kesulitan.

Pelajaran yang diberikan oleh guru dalam ruangan kelas sedikit sekali, tetapi latihan fisik berolah raga dan bekerja di kebun lebih banyak, dimulai dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore diselingi waktu istirahat makan siang satu jam (60 menit) termasuk di dalamnya waktu memasak dan makan.

Siapa terlambat masuk untuk bekerja kembali maka yang bersangkutan dipukul atau ditempeleng oleh orang Jepang pimpinan sekolah tersebut. Sering-sering banyak di antara mereka memakan makanan mentah (tidak dimasak) seperti memakan ubi jalar, ubi kayu dan jagung yang tidak dimasak lagi sampai banyak menderita penyakit menceret. Alasan menceret inilah yang menjadi sebab sehingga sebagian di antara mereka tidak lagi meneruskan pelajaran di sekolah tersebut lalu pulang ke kampung. Sekolah *Nomindojo* yang ada di Kalawara (Palu) hanya berjalan menamatkan muridnya dua kali angkatan. Angkatan ke dua pesertanya 30 orang, tetapi terpilih 6 orang akan dikirim ke Makassar untuk menjadi *Heiho*.

Mata pelajaran yang diberikan kepada murid selain mata pelajaran pertanian juga baris-berbaris dan *taiso* (senam massal). Guru-gurunya orang Jepang yaitu Oki mengajarkan mata pelajaran pertanian, Kono memberikan pelajaran kemiliteran dibantu oleh guru-guru bangsa Indonesia sendiri antara lain Lengkong

memberikan pelajaran kesehatan, K. Ponulele dan S. Pata memberikan pelajaran tentang pertanian.

Siapa yang dapat mengikuti pelajaran di sekolah ini sejak awal sampai akhir dengan baik dapat dicalonkan untuk dikirim mengikuti latihan militer (*Heiho*) di Manado atau Makassar, karena hanya di dua kota ini saja latihan untuk itu diadakan.

Mereka yang mengikuti pendidikan di *Nomindojo*, Kalawara, di Palu yang telah dipersiapkan dikirim ke Makassar di antaranya Pasturu Sobe sendiri, tidak jadi diberangkatkan karena Jepang telah menyerah pada Sekutu. 3)

Jenis pendidikan lainnya selain apa yang disebutkan di atas tidak terdapat di daerah Sulawesi Tengah.

3. Kurikulum

Jenis dan jumlah mata pelajaran yang diberikan kepada murid-murid di sekolah serta buku pegangan murid dan guru boleh dikatakan sama dengan apa yang diberikan dan digunakan pada sekolah-sekolah di masa pemerintahan Belanda dahulu. Kecuali buku-buku pelajaran yang ditulis/dicetak dalam bahasa Belanda dan buku yang bersemangat jiwa Belanda dilarang digunakan, sampai-sampai ada yang disuruh bakar oleh Jepang.

Tambahan mata pelajaran wajib dan paling diutamakan ialah bahasa Jepang (membaca dan menulis huruf Jepang) dan pendidikan jasmani (gerak badan) serta nyanyian-nyanyian Jepang yang bersemangat.

Bagi murid-murid Sekolah Rakyat berkelas 3 (*Kogakko*) diberikan mata pelajaran bahasa Jepang dengan menggunakan huruf *Katakana*, juga kepada murid-murid *Futsu Yogyo Kogakko* sampai kelas 3. Bagi murid-murid *Futsu Yogyo Kogakko* kelas 4 sampai kelas 6 selain diberikan bahasa Jepang menggunakan huruf *Katakana* juga huruf Jepang *Hiragana*.

Kepada murid-murid sekolah guru 2 tahun (*Kyoin Roseinso*) pelajaran bahasa Jepang selain diberikan dengan menggunakan huruf *Katakana* dan *Hiragana* juga diperkenalkan huruf *Kanji* (*Honji*). Tetapi yang diutamakan supaya dikuasai dengan sebaik-baiknya adalah huruf *Katakana* dan huruf *Hiragana*, ka-

3). Infomasi hasil wawancara dengan Bapak Pasturu Sobe di desa Pevunu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Donggala, tanggal 16 September 1979.

rena mereka dipersiapkan untuk mengajar murid-murid *Kogakko* dan *Futsu Yogyo Kogakko*.

Pemberian pelajaran bahasa Jepang agak intensif sedikit hanya pada murid-murid *Kogakko* dan *Futsu Yogyo Kogakko* yang ada pada kota-kota besar tempat kedudukan *Ken Daurikan*, *Bunken Kaurikan* dan para *Suco* (raja/magau). Sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung terpencil tempat kedudukan seorang *Sonco* (kepala kampung) para murid tidak mendapatkan pelajaran bahasa Jepang dengan baik karena ketiadaan guru untuk mata pelajaran tersebut. Kepada murid-murid sekolah pertanian (*Nomindojo*) bahasa Jepang diberikan dengan menggunakan huruf Jepang *Katakana* dan *Hiragana* karena umumnya mereka telah mengikuti pelajaran dari *Kogakko* atau *Futsu Yogyo Kogakko*.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pendidikan tidak berjalan dengan semestinya, maka selama itu tak pernah tercapai target setiap mata pelajaran menurut kurikulum yang telah ditentukan. Kegiatan belajar anak-anak lebih banyak ditujukan pada pembinaan fisik dan mental daripada pengembangan kecerdasan/intelektual para murid.

4. Guru-guru

Guru-guru yang mengajar pada murid-murid *Kogakko* dan *Futsu Yogyo Kogakko* baik kepala sekolah maupun para guru bantunya adalah bangsa Indonesia yang pada umumnya bekas guru-guru pada *Volkschool* dan *Vervolgschool* di zaman Belanda.

Hanya saja mereka telah mendapatkan latihan-latihan dan mata pelajaran bahasa Jepang di malam hari oleh guru bangsa Jepang yang ditugaskan untuk itu selama waktu yang telah ditentukan.

Untuk guru-guru Sekolah Guru 2 tahun (*Kyoin Roseinso*) dan sekolah Pertanian (*Nomindojo*) kepala sekolahnya adalah bangsa Jepang dan para guru bantunya adalah bangsa Indonesia yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing.

5. Keadaan pada Tahun Terakhir/Medio (1944 - 1945)

Pada saat ini Jepang telah banyak mengalami kekalahan pada beberapa tempat dalam Perang Asia Timur Raya di dae-

rah Pasifik. Daerah-daerah yang tadinya telah diduduki Jepang satu per satu telah jatuh ke tangan Sekutu. Serangan Sekutu makin hebat, daerah Sulawesi Tengah pun tidak luput dari serangan-serangan tersebut dengan menjatuhkan bom dan tembakan mitraliur dari atas pesawat kepada kota-kota penting dan kota-kota pelabuhan serta kota-kota tempat pertahanan tentara Jepang yang menyebabkan banyak rakyat menjadi korban.

Rakyat yang berada di kota-kota tersebut mengungsi ke luar kota, membuat kebun di tempat persembunyian baru itu dan menggali lubang-lubang tempat berlindung dari tembakan mitraliur. Kota-kota menjadi sepi dan lengang di siang hari, orang-orang tak berani diam di kota lagi.

Para murid mengikuti orang tuanya mengungsi ke luar kota, guru-guru pun demikian pula adanya sehingga sekolah terpaksa ditutup sampai waktu yang tidak dapat ditentukan lamanya. Sekolah-sekolah dapat dibuka kembali setelah Jepang kalah dan menyerah kepada Sekutu dan para penduduk yang mengungsi tadi telah kembali ke kota masing-masing.

Pada beberapa buah sekolah di kampung-kampung di daerah Toli-Toli selama pendudukan Jepang tersebut anak-anak tidak dapat bersekolah, karena ketiadaan pakaian. Baik anak-anak maupun orang tua waktu itu hanya memakai pakaian dari karung atau goni. Alat tulis menulis tidak ada, anak-anak sering menulis di daun pisang dengan menggunakan alat tulis dari lidi. 4)

Banyaknya gedung sekolah yang terdapat di daerah Sulawesi Tengah milik pemerintah selama pendudukan Jepang adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah gedung sekolah rakyat berkelas 3 (*kogakko*) dan Sekolah Rakyat berkelas 6 (*Futsu Yogyo Kogakko*)

Kabupaten Donggala	: 47 buah
Kabupaten Poso	: 90 buah
Kabupaten Buol Toli-Toli	: 33 buah
Kabupaten Banggai	: 60 buah

Jumlah : 230 buah

4). Informasi hasil wawancara dengan Bapak Haji Mahmud Radjaili di kampung Panasakan, Toli-Toli, tanggal 18 Nopember 1979.

b. Sekolah guru 2 tahun (*Kyoin Roseinso*)

Kabupaten Donggala	: 1 buah
Kabupaten Poso	: 1 buah
Kabupaten Buol Toli-Toli	: 1 buah
Kabupaten Banggai	: 1 buah

Jumlah : 4 buah

c. Sekolah pertanian 6 bulan (*Nomindojo*)

Kabupaten Donggala	: 1 buah
Kabupaten Poso	: 1 buah
Kabupaten Buol Toli-Toli	: —
Kabupaten Banggai	: —

Jumlah : 2 buah 5)

B. PENDIDIKAN SWASTA

Selama pendudukan pemerintah militer Jepang di Sulawesi Tengah sekolah swasta yang boleh dibuka adalah sekolah swasta yang memberikan mata pelajaran umum semata-mata kepada murid-muridnya dengan mendapat pengawasan ketat dari pemerintah Jepang. Sekolah-sekolah yang memberikan mata pelajaran agama kepada murid-muridnya di samping mata pelajaran umum baik yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi Islam maupun oleh organisasi Kristen (Protestan ataupun Katolik) dilarang dan diperintahkan supaya ditutup. Terutama sekolah-sekolah Islam yang didirikan oleh para tokoh organisasi-organisasi seperti PSII, Muhammadiyah dan Nahdatussyafiiyah yang banyak melakukan gerakan-gerakan menentang kekuasaan Belanda sebelumnya.

Sekolah-sekolah Kristen yang memberikan mata pelajaran umum semata-mata kepada murid-muridnya dan bersifat netral diperkenankan berjalan terus, yang pimpinan dan para guru bantunya adalah bangsa Indonesia sendiri yang kebanyakan di antara mereka saudara-saudara yang berasal dari Minahasa, Sangir Talaud dan Ambon.

Sekolah swasta yang diselenggarakan oleh organisasi Kristen tersebut di atas ini terdiri dari Sekolah Rakyat berkelas 3 (*Kogakko*) dan Sekolah Rakyat berkelas 6 (*Futsu Yogyo Kogakko*). Sekolah ini menerima murid-muridnya dari semua la-

pisan masyarakat setempat di mana sekolah tersebut berada tanpa membedakan golongan menurut agama maupun kedudukan/status orang tua dalam masyarakat. Siapa saja yang ingin menuntut ilmu di sekolah-sekolah tersebut dapat diterima asal sanggup memenuhi persyaratan yang berlaku yang telah menjadi ketentuan harus dipatuhi oleh setiap murid seperti membayar uang sekolah, mematuhi disiplin belajar dalam kelas serta melakukan kerja bakti seperti yang telah dilakukan oleh murid-murid sekolah pemerintah pada waktu itu. Kegiatan para murid baik yang dilakukan di sekolah-sekolah pagi hari maupun kegiatan-kegiatan sore harinya sama dengan apa yang dilakukan oleh murid-murid sekolah negeri/pemerintah setiap harinya dan guru-gurunya pun demikian pula mendapatkan latihan-latihan dari bangsa Jepang.

Keadaan gedung sekolah swasta adalah sebagai berikut:

Kabupaten Donggala	: 11 buah
Kabupaten Poso	: 16 buah
Kabupaten Banggai	: 18 buah
Kabupaten Buol Toli-Toli	: --
Jumlah	: 45 buah

Kegiatan para pemuda di luar sekolah adalah latihan-latihan fisik dan mental yang diberikan oleh anggota militer Jepang yang ditugaskan di tiap-tiap kampung dikordinasi oleh kepala kampung bersangkutan. Kelompok-kelompok anak muda yang dilatih di kampung-kampung itu disebut *Seinendan* dan ada pula yang disebut *Keibodan*.

Maksud Jepang untuk melatih para pemuda itu guna dijadikan partner tentara Jepang untuk menjadi barisan pertahanan belakang bila ada serangan musuh. Keuntungan yang dipetik oleh para pemuda di daerah ini dari latihan-latihan tersebut ialah pada masa revolusi fisik menentang masuknya kembali Belanda (NICA) berkuasa di daerah Sulawesi Tengah sesudah Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 para pemuda telah memiliki keberanian dan dapat menggunakan senjata api untuk melawan tentara NICA.

Penyelenggaraan administrasi pendidikan di sekolah-sekolah selama pendudukan Jepang di Sulawesi Tengah kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pengiriman laporan-

laporan mengenai jalannya pendidikan di sekolah kepada badan-badan yang mengawasi pendidikan dan pengajaran pada sekolah-sekolah boleh dikatakan tidak ada. Demikian pula para petugas yang sering-sering datang menginspeksi/memeriksa keadaan sekolah, melihat dari dekat cara guru mengajar dan kegiatan belajar para murid pun tidak dilaksanakan dengan baik sebagaimana sebelumnya yang dilakukan oleh para penilik sekolah (*Schoolopziener*) pada zaman Belanda.

Meskipun daerah Sulawesi Tengah termasuk bagian dari wilayah *Syu* di Manado, laporan-laporan mengenai pendidikan di daerah ini kepada badan yang lebih tinggi lagi daripada petugas yang ada di daerah tidak dilaksanakan. Pendidikan di sekolah-sekolah nampaknya berjalan sendiri-sendiri sesuai kondisi dan situasi daerah dimana sekolah itu berada.

Gaji para guru yang mengajar dibayar oleh kas pemerintah setempat dengan menggunakan mata uang Jepang.

Uang gaji yang diperoleh para guru tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya untuk membeli bahan-bahan keperluan hidup sehari-hari seperti pakaian atau barang-barang lainnya seperti sabun cuci, sabun mandi, gula pasir dan lain-lain karena barang-barang tersebut tidak ada dijual, semuanya harus dibuat sendiri. Sabun dibuat dari abu pelepah kelapa yang dibakar dicampur dengan garam yang dibuat sendiri oleh rakyat dimasak dari air laut. Gula dibuat sendiri oleh rakyat dari air tuak enau atau pohon kelapa dan sering juga dari air tebu.

Makanan seperti padi, jagung, ubi, sagu, sayur-sayuran dan lauk-pauk tidak perlu dibeli karena masing-masing berusaha menanamnya dan mencari sendiri ikan di sungai atau di laut bagi mereka yang hidup di tepi pantai dan di dekat sungai-sungai. Perdagangan jual-beli barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari tidak ada dan sepi sama sekali.

BAB VI

PENDIDIKAN PADA ZAMAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Dalam mengungkapkan perkembangan pendidikan di daerah Sulawesi Tengah sesudah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 hingga sekarang ini, dapat diuraikan dalam dua tahap periode waktu sesuai dengan keadaan penyelenggaraan administrasi pemerintah di daerah Sulawesi Tengah yang berlaku sejak waktu itu.

Pertama, periode waktu dari tahun 1945 (sesudah Proklamasi Kemerdekaan) hingga tanggal 17 Agustus 1950 (saat berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia), keadaan pendidikan di daerah ini mempunyai corak tersendiri di bandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Kedua, periode waktu dari tahun 1950 (sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia) hingga sekarang dimana semua rencana dan program pelaksanaan dan pengembangan pendidikan dalam segala jenis tingkatan mulai dari angkatan pendidikan Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi semuanya telah diatur dan ditentukan dari Pusat, Jakarta, oleh badan/aparat pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk dilaksanakan di daerah-daerah termasuk di dalamnya daerah Sulawesi Tengah.

Mulai saat itu semua daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia melaksanakan rencana dan program pendidikan yang sama seperti apa yang telah digariskan oleh Pemerintah Pusat c.q. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.

Setiap ada perubahan rencana dan program pendidikan yang baru sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir dengan secepat mungkin telah disebar-luaskan ke daerah-daerah supaya rencana dan program itu dapat dilaksanakan di daerah dengan sebaik-baiknya agar dapat dicapai tujuan pendidikan nasional dengan mutu pendidikan sama di seluruh Indonesia.

Tentu saja pelaksanaan rencana dan program pendidikan tersebut di daerah-daerah, ada yang dapat melaksanakannya dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya dan ada pula daerah belum dapat melaksanakannya sebaik-baiknya mengingat situasi dan kondisi, fasilitas sarana dan prasarana pendi-

dikan yang ada di daerah masing-masing. Oleh sebab itu maka kemajuan perkembangan pendidikan di daerah-daerah meskipun sudah melaksanakan rencana dan program yang telah dibakukan sama di seluruh Indonesia, tetapi hasil yang dicapai tidak sama (berbeda-beda) baik kualitas maupun kuantitasnya disebabkan karena situasi dan kondisi daerah yang memiliki fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang berbeda-beda pula.

A. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DARI TAHUN 1945 1950

Sesudah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 keadaan pendidikan di daerah Sulawesi Tengah tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pada bulan September 1945 tentara Belanda yang membonceng pada tentara Sekutu (NICA) memasuki daerah ini mulai dari kota Luwuk, Poso, Parigi, Palu dan kemudian ke Toli-Toli. Pada bulan September 1945 itu seluruh wilayah Sulawesi Tengah telah diduduki oleh tentara Belanda (NICA), dibawa oleh bekas kontroliur Parigi bernama L. Barraw. Pada saat itu keadaan di daerah tidak aman. Rakyat di daerah ini terbagi menjadi dua golongan, pertama mereka yang pro dan menyambut baik datangnya kembali Belanda berkuasa di daerah ini dan yang kedua mereka mati-matian menentang kedatangan Belanda tersebut dan bertekad akan mempertahankan kemerdekaan bangsa dan tanah air Indonesia yang telah diproklamasikan oleh Soekarno - Hatta tanggal 17 Agustus 1945 itu dengan segala kekuatan yang ada pada mereka. Jumlah mereka dari golongan kedua ini tidak begitu banyak dibandingkan mereka yang termasuk golongan pertama. Timbullah pergolakan di daerah antara kedua golongan tersebut di atas menyebabkan keadaan tidak aman dan masyarakat pun menjadi kacau balau karena sebagian besar mereka tidak mengetahui adanya proklamasi, lebih-lebih rakyat yang hidup di desa-desa terpencil.

Akibat dari pergolakan tersebut di atas ini maka penyelenggaraan pendidikan tidak mendapat perhatian sama sekali dari pemerintah yang berkuasa, karena mereka yang memegang kekuasaan pemerintahan pun juga terbagi dua golongan. Sekolah-sekolah berjalan semauanya sendiri, tergantung pada kehendak pimpinan dan guru yang mengajar di sekolah masing-

masing. Jam belajar di sekolah tidak teratur pembayaran gaji-gaji para guru pun tidak teratur.

Keadaan pendidikan di sekolah-sekolah seperti tersebut di atas ini berlangsung satu tahun lebih, yaitu bulan September 1945 sampai tanggal 24 Desember 1946 setelah Konferensi Denpasar di mana pada waktu itu secara resmi berdirilah negara boneka Belanda NIT (Negara Indonesia Timur) dengan ibu kotanya Makassar (Ujung Pandang).

Pada tanggal 24 Desember 1946 presiden NIT, Tjokorde Gde Rake Soekawati dilantik dan pada tanggal 10 Januari 1947 kabinet NIT pertama diumumkan dengan Perdana Menteri I merangkap Menteri Perekonomian Nadjamuddin Daeng Malewa dan Menteri Pendidikan dan Pengajaran E. Katoppo (bekas Inspektur Sekolah Rakyat di Manado). 6).

Setelah NIT berdiri maka mulailah pendidikan di sekolah-sekolah berjalan dengan baik kembali karena keadaan di daerah sudah mulai aman sedikit karena para tokoh dan anggota pergerakan Merah Putih (Golongan Republikein) sudah banyak ditangkap dan dipenjarakan oleh pemerintah Belanda yang berkuasa kembali waktu itu.

Daerah Sulawesi Tengah sebagai salah satu wilayah dari NIT melaksanakan rencana dan program pendidikan yang telah ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran NIT yang diatur dari ibukota Makassar. Selama daerah Sulawesi Tengah menjadi wilayah dari NIT, pemerintahan yang berlaku sama dengan sistem dan organisasi administrasi pemerintahan di zaman Belanda dahulu, yaitu berlakunya kembali pemerintahan Kontrolieur yang kemudian berubah menjadi KPN (Kepala Pemerintahan Negeri) yang membawahi daerah-daerah kerajaan dan distrik-distrik yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala distrik. Jabatan Asisten Residen yang dulunya berkedudukan di Donggala dan Poso ditiadakan diganti dengan Pemerintahan Dewan Raja-Raja diketuai oleh R.M. Poesa dan dengan kedudukan ibu kota di Poso pada tahun 1948.

Setelah sekolah-sekolah dapat berjalan baik dan gaji para guru sudah dapat dibayarkan teratur tiap bulan melalui kas pemerintah maupun kas swapraja sesuai dengan status sekolah

6). Kementerian Penerangan Republik Indonesia, Republik Indonesia Propinsi Sulawesi, Makassar, Maret 1953.

yang ada (sekolah pemerintah dan sekolah *landschap* di zaman Belanda) maka mulailah pemerintah memikirkan pengembangan pendidikan untuk rakyat dengan menambah jumlah dan jenis-jenis sekolah yang diperlukan sesuai perkembangan zamannya.

Sebelum mengungkapkan keadaan perkembangan sekolah-sekolah yang ada, terlebih dahulu diketahui bahwa daerah Sulawesi menjadi bagian dari Wilayah Negara Indonesia Timur (NIT) mulai dari penghujung tahun 1946 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 (berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia) melalui masa transisi pemerintahan RIS dari tanggal 27 Desember 1949 sampai dengan tanggal 17 Agustus 1950 yang memakan waktu + 8 bulan lamanya.

Di daerah Sulawesi Tengah selama masa kekuasaan pemerintahan NIT yang memakan waktu kurang lebih empat tahun lamanya itu jenis sekolah yang ada baik sekolah milik pemerintah maupun milik swasta ialah sebagai berikut:

1. Sekolah Rakyat (SR) berkelas 3 di kampung-kampung yang berpenduduk antara 1000 - 2000 jiwa.
2. Sekolah Rakyat (SR) berkelas 6 di daerah-daerah tempat kedudukan ibu kota kerajaan dan kota-kota tempat kedudukan kepala distrik yang berpenduduk cukup banyak + 3000 - 4000 jiwa.
3. Sekolah Menengah Umum (SMU) 2 tahun (menamatkan murid hanya sampai kelas 2) terdapat di kota-kota Luwuk, Poso dan Palu, dibuka pada tahun 1948. Sekolah ini mempunyai tingkatan kelas lanjutan (kelas 3 dan 4) di kota-kota Makassar, Manado dan Gorontalo.
4. Sekolah Pendidikan Guru 2 tahun disebut OVO (*Opleiding school voor Volks Onderwijzer*) terdapat di kota-kota Luwuk, Palu, Buol dan sekolah Pendidikan Guru di Tentena, Poso, dijadikan *Normaal School* (NS) yang dibuka sejak tahun 1947.

1. Pendidikan Pemerintah

a. Pendidikan Dasar

Sekolah-sekolah yang melaksanakan pendidikan dasar bagi masyarakat di daerah Sulawesi Tengah terdiri dari Sekolah

Rakyat berkelas 3 dan Sekolah Rakyat berkelas 6 dengan keadaan sebagai berikut:

Daerah Donggala	: 66 buah
Daerah Poso	: 106 buah
Daerah Luwuk Banggai	: 70 buah
Daerah Buol Toli-toli	: 34 buah
Jumlah	: 276 buah

b. Pendidikan Menengah.

Pendidikan Sekolah Menengah Umum (SMU) mulai didirikan pada tahun 1948 terdapat pada tiga buah kota yaitu:

Luwuk	: 1 buah
Poso	: 1 buah
Palu	: 1 buah
Jumlah	: 3 buah

Ketiga buah sekolah Menengah Umum tersebut di atas melaksanakan pendidikan tingkat menengah hanya sampai pada kelas 2. Murid-murid yang ingin melanjutkan studi mereka di kelas 3 dan 4 mereka harus keluar daerah yaitu ke Manado, Makassar atau Gorontalo karena di kota-kota itu saja terdapat kelas lanjutan yaitu kelas 3 dan kelas 4 tersebut.

c. Pendidikan Kejuruan.

Sekolah kejuruan yang ada hanyalah sekolah pendidikan guru 2 tahun disebut OVO (*Opleiding school voor Volks Onderwijzer*) terdapat di tiga buah kota yaitu:

Luwuk	: 1 buah
Buol	: 1 buah
Palu	: 1 buah
Jumlah	: 3 buah

Sekolah Pendidikan Guru Zending di Tentena, Poso yang selama pendudukan Jepang di Sulawesi Tengah ditutup, pada tahun 1947 dibuka kembali dengan nama *Normaal School* (NS), lama belajar 2 tahun Kepala Sekolah Jan Kruyt.

Di Palu pada tahun 1947 dibuka pula *Normaal School* 2 tahun yang hanya menamatkan muridnya sekali/satu periode kemudian ditutup. Kepala Sekolah Bapak Pakasi, guru bantu

pada SMU Palu (Drs. Pakasi, dosen bahasa Inggris Fakultas Sastra UNHAS di Ujung Pandang, sebagai jabatan terakhir beliau).

d. **Guru-guru.**

Yang menjadi guru pada sekolah rakyat yang berkelas 3 dan berkelas 6 adalah mereka tamatan sekolah guru dua tahun *Kyoin Roseinso* (OVO) dan yang menjadi Kepala Sekolah; untuk sekolah rakyat berkelas 3 di kampung-kampung, guru tua yang telah berpengalaman tamatan CVO pada Zaman Belanda dan untuk Sekolah Rakyat berkelas 6 mereka tamatan *Normaal School* (NS).

Guru-guru yang mengajar pada Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Pendidikan Guru 2 tahun (OVO) ialah mereka tamatan HIK (*Hollands Inlandsche Kweekschool*) di Zaman Belanda atau tamatan KS (*Kweek School*) di Zaman Belanda yang telah berpengalaman lama. Yang menjadi kepala sekolahnya; untuk SMU adalah mereka tamatan Hoofdaete di Zaman Belanda dan untuk OVO mereka tamatan HIK yang telah memiliki masa kerja lama mengajar sebagai guru pada sekolah pendidikan guru.

Demikian pula halnya guru-guru yang mengajar pada murid-murid *Normaal School*, karena masih kekurangan guru pada waktu itu, guru yang mengajar pada SMU dan OVO mengajar pula pada murid-murid *Normaal School* yang berlaku di Palu dan Poso.

e. **Murid-murid.**

Semua anak-anak yang ingin menuntut ilmu pada sekolah rakyat baik SR berkelas 3 maupun SR berkelas 6 dapat diterima menjadi murid tanpa membedakan golongan agama ataupun status orang tua dalam masyarakat. Anak-anak yang bertempat tinggal di sekitar kampung/kota tempat sekolah tersebut dapat diterima menjadi murid tanpa ada ketentuan batas jumlah murid yang diterima. Bagi daerah-daerah yang padat penduduknya kadang-kadang satu kelas diisi oleh 60 orang lebih murid dan bagi kampung yang masih kurang jumlah penduduknya, satu kelas kadang-kadang hanya diisi oleh 15 – 20 orang murid saja. Hal demikian ini banyak didapati pada sekolah-sekolah rakyat yang ada di daerah Banggai kepulauan. Makin tinggi kelasnya makin berkurang jumlah murid yang ada pada tiap-tiap kelas. ⁷⁾

⁷⁾ Informasi hasil wawancara dengan Bapak Lakuning di Kampung Bungin, Luwuk, tanggal 23 – 9 – 1980.

Anak yang diterima menjadi murid pada sekolah menengah umum (SMU dan OVO adalah mereka yang lulus mengikuti ujian/testing masuk tamatan dari Sekolah Rakyat kelas 6 yang diadakan tiap akhir tahun ajaran.

Khusus untuk menjadi murid pada sekolah *Normaal School* 2 tahun baik yang ada di Tentena, Poso maupun yang ada di Palu adalah mereka para guru tamatan CVO atau OVO yang telah berpengalaman mengajar di SR 6 tahun minimal 2 tahun lamanya. Mereka ini jika telah tamat dari *Normal School* 2 tahun dipersiapkan untuk menjadi kepala sekolah rakyat 6 tahun, menggantikan kepala sekolah lama yang telah tiba masanya untuk pensiun.

f. Kurikulum.

Mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid Sekolah Rakyat berkelas 3 dan berkelas 6 sama dengan mata pelajaran yang diberikan pada Zaman pemerintahan Belanda dahulu. Buku-buku pelajaran yang menjadi pegangan guru dan murid pun sama.

Pada beberapa Sekolah Rakyat berkelas 6 di kota-kota tertentu yang dikepalai oleh seorang tamatan *Normaal School* pada kelas 5 dan 6 murid-murid diberikan pelajaran Bahasa Belanda permulaan oleh kepala sekolah bersangkutan.

Demikian pula halnya jenis dan jumlah mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid sekolah pendidikan guru 2 tahun OVO, sama dengan mata pelajaran yang diberikan pada murid-murid CVO di zaman Belanda ditambah dengan pelajaran bahasa Belanda.

Jumlah dan jenis mata pelajaran yang diberikan kepada murid-murid Sekolah Menengah Umum (SMU) dan *Normaal School* adalah sebagai berikut:

1). *Sekolah Menengah Umum (SMU) 2 tahun.*

- Bahasa Indonesia.
- Bahasa Belanda.
- Bahasa Inggris.
- Berhitung/Ilmu Pasti.
- Ilmu Bumi.
- Ilmu Sejarah.
- Ilmu Hayat.
- Menggambar.
- Latihan Jasmani.

Pengajaran Kerajinan. ⁸⁾

2). *Sekolah Pendidikan Guru Normal School (NS).*

Ilmu Hitung.

Aljabar.

Ilmu Alam.

Ilmu Hayat.

Bahasa Indonesia.

Bahasa Belanda.

Bahasa Inggris.

Ilmu Mendidik (buku pegangan De La Court).

Ilmu Bumi/Falak.

Sejarah.

Agama Kristen, hanya diberikan pada murid-murid beragama Kristen. ⁹⁾

2. **Pendidikan Swasta.**

Yang dimaksudkan dengan sekolah swasta dalam uraian di bawah ini adalah semua sekolah yang didirikan dan diselenggarakan oleh organisasi swasta baik dari Islam maupun Kristen ataupun organisasi-organisasi swasta lainnya yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bagi rakyat di daerah Sulawesi Tengah sesuai dengan rencana dan program pendidikan yang diatur dan ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran NIT di Makassar pada waktu itu.

Sekolah swasta dengan status subsidi, bantuan dan swasta penuh semuanya hanya disebut sekolah swasta saja.

a. **Pendidikan Dasar.**

Sekolah swasta yang menyelenggarakan pendidikan dasar bagi rakyat Sulawesi Tengah ialah Sekolah Rakyat berkelas 3 dan Sekolah Rakyat berkelas 6 dengan keadaan sekolah-sekolah sebagai berikut:

⁸⁾ Dikutip dari: Buku Kemajuan Murid kelas I pada SMU Palu tahun 1949; milik Daeng Patiro Laintagoa.

⁹⁾ Informasi hasil wawancara dengan Bapak Djeng Djalumang di Kampung Soho, Luwuk, tanggal 29 - 9 - 1980.

Daerah Donggala	: 14 buah
Daerah	: 21 buah
Daerah Luwuk Banggai	: 29 buah
Daerah Buol Toli-toli	: —
Jumlah	: <u>64 buah</u>

b. Pendidikan Menengah.

Satu-satu sekolah menengah umum didirikan pada tahun 1948 adalah SMI (Sekolah Menengah Islam) di Pagimana, Kabupaten Banggai. Sekolah ini didirikan oleh keluarga-keluarga Islam yang ada di Pagimana, memiliki tingkatan kelas sampai 3.

Yang menjadi gedung sekolah tempat belajar anak-anak adalah rehabilitasi gedung Sekolah Muhammadiyah yang telah ditutup pada zaman pendudukan Jepang (1942 – 1945).

Para guru adalah:

- 1). Sulaemana Masulili (Kepala Sekolah).
- 2). Djamhuri guru bantu
- 3). Padi guru bantu
- 4). Aslam guru bantu.

Keempat guru itu adalah tamatan dari Sekolah Nalfajri Karang-kajen di Yogyakarta. Sekolah ini masih berjalan terus hingga sekarang dan namanya menjadi SMPI (Sekolah Menengah Pertama Islam) dengan mendapat bantuan keuangan dan tenaga guru dari pemerintah c.q. Departemen P dan K. Sekolah ini memberikan pelajaran kepada murid-muridnya 75% umum dan 25% pengetahuan agama Islam. ¹⁰⁾

Jenis pendidikan lain selain yang tersebut di atas selama masa NIT tidak terdapat di daerah Sulawesi Tengah.

B. PERKEMBANGAN PENDIDIKAN SEJAK NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (1950 – 1980).

Sesudah berdirinya negara kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950 pulau Sulawesi menjadi sebuah Propinsi berdiri sendiri sebagai salah satu wilayah Republik Indonesia diberi nama Republik Indonesia Propinsi Sulawesi dengan

¹⁰⁾ Informasi hasil wawancara dengan Bapak Arnold Masulili di Kampung Dongkalan, Luwuk, tanggal 24 – 9 – 1980.

acting gubernur B.W. Lopian. Pada tanggal 1 Juli 1951 diadakan serah terima jabatan dari acting gubernur B.W. Lopian kepada Gubernur Republik Indonesia Propinsi Sulawesi yang baru Soe-diro.

Mulai dari saat itu semua rencana dan program perkembangan pendidikan untuk semua daerah di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia mengikuti apa yang telah diatur dan ditentukan oleh pemerintah c.q. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta.

Untuk mengatur dan melaksanakan tugas pembinaan dan pengembangan pendidikan di daerah Republik Indonesia Propinsi Sulawesi sesuai dengan ketentuan dari Jakarta, maka pada bulan Nopember 1950 dibentuklah Kantor Inspeksi Sekolah Rakyat Daerah X Propinsi Sulawesi.

Guna mendapatkan pelaksanaan yang teratur dan sebaik-baiknya di bidang pendidikan Sekolah Rakyat oleh pemerintah diadakan pembagian tugas sebagai berikut dari Inspeksi aparat Sekolah Rakyat.

Badan Penyelenggara Sekolah Rakyat pun segera dibentuk. Badan ini berkedudukan di daerah-daerah Kabupaten yang telah disertai urusan penyelenggaraan sekolah-sekolah rakyat. Tugasnya menyelenggarakan penerimaan murid, tata usaha keuangan, administrasi, alat-alat perlengkapan, alat-alat pelajaran, kepegawaian dan yang lebih penting lagi pembangunan gedung-gedung dan pekarangan sekolah. Di tangan badan inilah terlaksananya pendidikan dan pengajaran dengan baik dan sempurna di daerah-daerah.

Badan ini juga terdapat di daerah-daerah Kabupaten yang bertugas atas segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis tersebut antara lain menetapkan atau mengubah Rencana Pelajaran Sekolah Rakyat, menetapkan hari libur, melakukan pengawasan dan pimpinan mengenai pendidikan dan pengajaran.

Berhubung dengan adanya maksud memperluas Inspeksi Aparat Sekolah Rakyat guna melancarkan jalannya stabilisasi dalam pimpinan, maka pada pertengahan tahun 1951, dibentuklah Inspeksi Sekolah Rakyat Kabupaten yang dikepalai oleh seorang Kepala Kantor Inspeksi Sekolah Rakyat.

Untuk daerah Sulawesi Tengah Kantor Kepala Inspeksi Sekolah Rakyat Kabupaten tersebut terdapat di kabupaten Poso di Poso dan Kabupaten Donggala di Palu. Dengan adanya Kantor

Kepala Inspeksi Sekolah Rakyat di dua kota tersebut di atas maka rencana dan program pengembangan pendidikan dasar di daerah ini makin mantap pelaksanaannya.

Dalam melaksanakan rencana 10 tahun perluasan Sekolah Rakyat di daerah Republik Indonesia Propinsi Sulawesi, termasuk di dalamnya daerah Sulawesi Tengah (1950 – 1960) kesukaran-kesukaran yang dihadapi adalah:

1. Kekurangan tenaga guru.
2. Kebanyakan guru yang ada belum memiliki ijazah Sekolah Pendidikan Guru (guru magang).
3. Kekurangan gedung sekolah.
4. Kekurangan alat-alat perlengkapan pelajaran.

Untuk menanggulangi kesulitan kekurangan tenaga guru, guna melaksanakan rencana 10 tahun perluasan Sekolah Rakyat menuju kepada pelaksanaan Undang-undang kewajiban Belajar, pada tanggal 1 Desember 1950 di daerah Sulawesi Tengah didirikan Kursus Pengajar untuk Kursus Pengantar ke Kewajiban Belajar (KPKPKB) di 4 buah kota yaitu:

1. Buol.
2. Donggala
3. Poso.
4. Luwuk.

(Buol pada waktu itu masih masuk daerah Sulawesi Utara). Pada tahun 1951 didirikan pula Sekolah Guru B (SGB) 4 tahun di kota-kota Luwuk, Poso, Palu dan Buol untuk tempat mencetak tenaga para guru pengajar pada Sekolah Rakyat 6 tahun yang bermutu. Mulai tahun 1951 itulah sebagai titik tolak permulaan usaha pemerintah mengembangkan dan memajukan pendidikan dan pengajaran di daerah ini.

Di bawah ini kita dapat melihat Perkembangan kemajuan pendidikan dan pengajaran di daerah Sulawesi Tengah antara tahun 1950 – 1980. Pengungkapan mengenai keadaan sekolah-sekolah menurut jenis dan jenjang pendidikan yang ada selama periode waktu tersebut di atas, hanya secara garis besarnya saja sesuai data-data yang diperoleh. Perubahan dari satu jenis sekolah ke jenis sekolah lainnya seperti peleburan SGB menjadi SMP dan SMEP menjadi SMP beberapa waktu yang lalu dalam tulisan ini kami belum dapat mengungkapkan secara terperinci dan kronologis karena data mengenai hal itu belum kami dapatkan.

1. Pendidikan Dasar,

Sebelum menguraikan Sekolah Rakyat yang menyelenggarakan pendidikan dasar bagi rakyat di daerah ini bahwa perlu lebih dahulu diketahui sejak tahun 1951 itu Sekolah Rakyat berkelas 3 yang ada di kampung-kampung dijadikan Sekolah Rakyat berkelas 6. Sehingga mulai saat itu hingga sekarang setiap pendirian sebuah sekolah baru selalu dibuat gedung sekolah yang lengkap mulai kelas 1 sampai kelas. 6 Hal ini tidak hanya terjadi pada sekolah-sekolah negeri tetapi juga pada sekolah-sekolah swasta. Dalam mengungkapkan keadaan sekolah pendidikan dasar ini di dalamnya termasuk TK dan SD.

Kedadaan sekolah dasar dan taman kanak-kanak. ¹¹⁾

Kabupaten	Jenis Sekolah				Jumlah
	T.K		S.D		
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	
Donggala	—	60	471	90	621
Poso	1	69	341	37	448
Luwuk Banggai	1	10	261	66	338
Buol Toli-toli	—	7	205	3	215
Jumlah	2	146	1278	196	1622 ¹¹⁾

2. Pendidikan Menengah.

Yang dimaksud dengan sekolah pendidikan menengah yaitu sekolah menengah umum yang terdiri dari Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum tingkat Atas (SMA).

Adapun keadaan SMP dan SMA di daerah Sulawesi Tengah hingga akhir tahun ajaran 1980 ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

¹¹⁾ Kanwil Dep. P dan K. Propinsi Sulteng, *Nomer Statistik Sekolah TK-SD Propinsi Sulteng*, Palu 1979.

Kabupaten	Jenis Sekolah				Jumlah
	SMP		SMA		
	Negr.	Swast.	Negr.	Swast.	
Donggala	18	51	7	11	87
Poso	18	12	3	3	36
Luwuk Banggai	16	18	2	2	38
Buol Toli-Toli	10	3	2	—	15
Jumlah	62	84	14	16	176

12)

3. Pendidikan Kejuruan

Di daerah Sulawesi Tengah sekarang ini terdapat sekolah-sekolah kejuruan tingkat lanjutan pertama dan tingkat lanjutan atas yang terdiri dari:

- Tingkat lanjutan pertama: ST, SKKP, KPAN.
- Tingkat lanjutan atas: STM, SKKA, KPAA, SPG, SMEA, SGO, KPG, SMPS.

Untuk mengetahui keadaan masing-masing sekolah-sekolah tersebut di atas dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini :

I

Kabupaten	Jenis Sekolah										Jumlah
	ST		STM		SKKP		SKKA		KPAN		
	Ng	Sw	Ng	Sw	Ng	Sw	Ng	Sw	Ng	Sw	
Donggala	1	—	1	1	1	—	1	—	—	—	5
Poso	—	1	—	1	1	—	—	1	—	—	4

12). Kanwil Dep. P dan K. Propinsi Sulteng, *Nomor Statistik Sekolah TK - SD Propinsi Sulteng*, Palu 1979.

Luwuk Banggai	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	4	
Buol Toli-Toli	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
Jumlah		1	3	1	2	3	2	1	1	1	-	15

II

Kabupaten	Jenis Sekolah										Jmlh.		
	KPAA		SPG		SMEA		KPG		SGO			SMPS	
	Ng	Sw	Ng	Sw	Ng	Sw	Ng	Sw	Ng	Sw		Ng Sw	
Donggala	-	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-	1	9
Poso	1	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	7
Luwuk Banggai	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	5
Buol Toli-Toli	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	4
Jumlah	1	-	5	4	7	3	3	-	1	-	-	1	25

13)

Selain sekolah-sekolah yang tercantum dalam tabel I dan II di atas, maka di ibukota Propinsi Sulawesi Tengah Palu, terdapat pula sebuah Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) Sekarang sekolah itu berubah nama menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan Menengah Atas (SPPMA) yang didirikan oleh PEMDA Dati I Sulawesi Tengah. Lapornya tidak masuk ke Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tengah sehingga tidak termasuk dalam tabel I dan II. SPPMA ini telah berlangsung selama 16 tahun dan telah menamatkan muridnya 12 kali. Perlu diketahui bahwa sebelum daerah Sulawesi Tengah menjadi daerah otonom (Propinsi Sulawesi Tengah) yang berdiri sen-

13). Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sulteng, *Nomor Statistik Sekolah SLTP - SLTA Propinsi Sulteng*, Palu 1980.

diri, semua urusan administrasi sekolah lanjutan pertama dan lanjutan atas baik umum maupun kejuruan diatur melalui kantor Kepala Inspeksi dari jenis sekolah masing-masing yang berkedudukan di Manado sebagai ibu kota dari Propinsi Sulawesi Utara Tengah pada waktu itu.

Di kota Palu, ibu kota Propinsi Sulawesi Tengah terdapat pula sebuah pesantren Muhammadiyah tempat mendidik para muballig yang terletak di Jl. K.H.A. Dahlan. Pesantren ini didirikan tahun 1973 di Dewa Wani, Kecamatan Tawaeli, Kabupaten Donggala. Setelah berjalan beberapa tahun lalu dipindahkan ke Palu. Yang menjadi pimpinannya sejak mulai didirikan hingga sekarang adalah Bapak Kiyai R. Soeprapto dari Yogyakarta.

4. Pendidikan Tinggi

Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah terdapat pada tiga buah ibu kota Kabupaten terdiri dari Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta masing-masing di :
Kota Palu terdapat *Perguruan Tinggi Negeri*.

- a. UNTAD Cabang UNHAS Palu, terdiri dari empat Fakultas yaitu Fakultas Hukum, Sospol, Ekonomi dan Peternakan.
- b. IKIP Ujung Pandang Cabang Palu terdiri dari tiga fakultas dan enam jurusan :
FIP; jurusan Didaktik Kurikulum dan Pendidikan Sosial.
FKIE; jurusan Biologi dan Matematika.
FKSS; jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan jurusan Bahasa dan Sastra Inggris.
- c. IAIN Alauddin Cabang Palu, terdiri dari tiga fakultas yaitu Tarbiyah, Ushuluddin dan Syariah.

Perguruan Tinggi Swasta-nya ada di Sulawesi Tengah.

- a. AAN Palu, terdiri dari dua jurusan Administrasi Niaga dan Akounting.
- b. PTIA (Perguruan Tinggi Islam Alchairat) terdiri dari satu fakultas yaitu fakultas Syariah.
- c. Universitas Muhammadiyah terdiri dari dua fakultas yai-

tu Fakultas Ilmu Agama dan Da'wah (FIAD) dan Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP).

- d. Universitas Tujuhbelas Agustus (UNTAG) jurusan Administrasi Negara.

Di kota Poso ada juga Perguruan Tinggi Negeri yaitu :

- a. *Extention Course* Cabang IKIP Manado terdiri dari empat fakultas dan enam jurusan yaitu:
- b. FKIS; jurusan Ekonomi Perusahaan dan Civics Hukum.
- c. FKIE; jurusan Ilmu Hayat.
- d. FIP; jurusan Teori dan Sejarah Pendidikan.
- e. FKSS; jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia dan jurusan Bahasa dan Sastra Inggris.

Akademi Theologia di Tentena, Poso, didirikan oleh Organisasi GKST, suatu perguruan tinggi swasta di kota Luwuk ada Perguruan Tinggi Negeri, yaitu; Fakultas Sosial Politik filial UNSRAT di Manado.

Perguruan Tinggi Swasta juga ada di Luwuk, yaitu; Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP).

Topotika yang terdiri dari tiga jurusan yaitu Bimbingan Penyuluh, Ekonomi Perusahaan dan Civics Hukum. STKIP ini berada di bawah pengawasan IKIP Ujung Pandang dan dosen-dosen pengajarnya pun adalah dosen-dosen dari IKIP Ujung Pandang. Ujian Sarjana Muda para mahasiswa dilakukan oleh Kopertis Wilayah VII di Ujung Pandang.

Semua Perguruan Tinggi yang disebutkan di atas ini, baik negeri maupun swasta hanya menamatkan studi para mahasiswanya sampai tingkat Sarjana Muda. Bagi mereka yang ingin melanjutkan ke tingkat Sarjana harus ke Manado atau Ujung Pandang pada Perguruan Tinggi Induknya masing-masing.

BAB VII

PENUTUP

Sebagai penutup tulisan ini dapat dikemukakan bahwa perkembangan Pendidikan di Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut.

Sejak zaman Pra Sejarah sampai datangnya pengaruh agama Islam ke daerah ini yang diduga terjadi pada abad ke-16 pendidikan hanya berlangsung dan dilaksanakan dalam lingkungan keluarga oleh orang tua kepada anak-anaknya.

Yang diajarkan oleh orang tua adalah meliputi pendidikan:

1. Adat sopan santun dalam pergaulan hidup bermasyarakat di mana yang muda harus menghormati yang lebih tua, mana yang dapat dilakukan dan apa-apa yang tak boleh dilakukan serta anak-anak diajar mentaati adat warisan nenek moyangnya.
2. Pengetahuan ketrampilan yang dibutuhkan dalam memenuhi kebutuhan hidup.
3. Dalam segi kepercayaan diajarkan kepada anak-anak tata cara dalam pemujaan dan pengenalan pada kekuatan di dalam alam yang serba arwah/roh dengan mengikuti cara-cara pemujaan, warisan dari leluhurnya dan mentaati larangan-larangan/pantangan-pantangan agar tidak terkena kemarahan dari roh/kekuatan yang menghuni segala tempat di alam ini, sesuai dengan kepercayaan animis, dinamisme yang berkembang pada waktu itu.

Dengan datangnya ajaran agama Islam maka di daerah yang penduduknya telah menganut ajaran ini diadakanlah pendidikan agama untuk mengetahui ajaran agama ini baik meliputi pengetahuan tentang cara-cara ibadah, hukum agama, ilmu tauhid serta tasawwuf. Pendidikan masih tetap berlangsung dalam lingkungan keluarga. Kemudian berkembang pelaksanaan pendidikan sistem pondok di mana murid mencari guru agama untuk memperdalam pengetahuan agama yang diinginkannya.

Pendidikan agama ini masih bersifat individual artinya murid mencari guru untuk diajar tentang jenis pengetahuan agama yang diinginkannya. Sebagai taraf permulaan belajar aga-

ma adalah pelajaran mengaji dengan mempergunakan ejaan mengaji dalam bahasa Bugis. Tempat belajar masih belum menetap masih berpindah dari rumah ke rumah atau kadang-kadang di mesjid ataupun dilaksanakan di rumah tempat sang guru. Guru umumnya merupakan guru yang datang untuk waktu sementara kemudian kembali lagi ke daerah asalnya di luar Sulawesi Tengah.

Ada beberapa tokoh yang dikenal melalui tradisi lisan sebagai pembawa ajaran Islam ini ke Sulawesi Tengah dan berkumpul di sini tapi pada umumnya tokoh-tokoh tersebut sudah menjadi tokoh legendaris tidak banyak lagi diketahui tentang kehidupannya pada masa yang lalu, karena tidak adanya peninggalan tertulis tentang ini di Sulawesi Tengah.

Pendidikan yang melembaga dalam bentuk sekolah baru dikenal setelah tibanya zending di Sulawesi Tengah pada akhir abad ke-19 bersamaan dengan datangnya penjajahan Belanda ke daerah ini. Untuk kepentingan missinya mengadakan kristenisasi maka dibukalah sekolah-sekolah zending berkelas 2 di daerah Poso.

Kemudian sekolah kelas 2 ini ditingkatkan menjadi berkelas 4. Pengelolaan sekolah-sekolah dasar di Sulawesi Tengah bagian Timur dan Tengah umumnya diserahkan pemerintah Belanda kepada zending untuk menanganinya.

Sebagai tenaga-tenaga pengajar mula-mula didatangkan dari Manado Sangir dan Ambon. Tenaga guru merangkap juga sebagai pendeta. Untuk mengatasi kekurangan tenaga guru ini Zending lalu membuka sekolah pendidikan guru dua tahun di Tentena Poso. Tamatan sekolah guru inilah yang kemudian disebarkan ke pelosok daerah Sulawesi Tengah di daerah-daerah yang dijadikan lapangan kerja oleh organisasi-organisasi zending. Jadi pembukaan sekolah-sekolah dasar oleh zending di daerah Sulawesi Tengah erat kaitannya dengan usaha kristenisasi pada kelompok-kelompok suku yang masih animis. Itu pulalah sebabnya ketika pemerintah Belanda membuka sekolah rakyat di ibu kota kerajaan, rakyat takut menyekolahkan anak-anaknya karena khawatir pada kristenisasi. Sampai dengan datangnya penjajahan Jepang di tahun 1942 sekolah-sekolah yang ada di Sulawesi Tengah hanya tingkat sekolah dasar berkelas 3 (*Volks School*) dan berkelas 5 (*Vervolg School*) ditambah kursus guru 2 tahun (CVO). Anak-anak raja/bangsawan

kebanyakan dikirim ke Gorontalo, Manado, dan Ujung Pandang bersekolah.

Kemudian dengan dibukanya sekolah-sekolah oleh partai pergerakan nasional, organisasi sosial yang berdasarkan agama (Muhammadiyah) dan sekolah Islam Al Chairaat pada tahun 1930-an, maka kepada anak-anak yang dididik pada sekolah-sekolah ini ditanamkan jiwa kebangsaan di samping pelajaran pengetahuan umum dan ilmu agama pada sekolah-sekolah agama.

Kelak hasil didikan sekolah-sekolah pergerakan inilah yang sebahagian besar menjadi tokoh-tokoh pejuang mempertahankan kemerdekaan Bangsa dan Negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 - 8 - 1945, ketika penjajah Belanda dengan NICA - nya kembali menanamkan kekuasaannya setelah Jepang menyerah.

Sekolah Menengah tingkat pertama baru tahun 1948 dibuka di Sulawesi Tengah, ketika daerah ini menjadi wilayah dari NIT (Negara Indonesia Timur). Itu pun hanya ada di Palu, Poso dan Luwuk. Sampai tahun 1960-an anak-anak daerah Sulawesi Tengah yang akan melanjutkan pelajarannya ke sekolah yang lebih tinggi, harus ke Manado, Makassar (Ujung Pandang) dan Jawa melanjutkan pelajarannya.

Setelah terbentuknya Propinsi Sulawesi Tengah pada 13 April 1964 barulah terdapat kemajuan yang agak pesat dalam bidang pendidikan dengan dibukanya lebih banyak SLTP - SLTA serta Perguruan Tinggi walaupun Pendidikan Tinggi yang ada ini masih berstatus cabang dari UnHas dan IKIP Ujung Pandang dan IAIN cabang IAIN Alaudin Ujung Pandang.

Diharapkan pertengahan 1981 ini sudah dapat diwujudkan adanya Perguruan Tinggi berdiri sendiri di Sulawesi Tengah. Di samping sekolah-sekolah negeri maka sekolah swasta pun banyak didirikan mulai dari T.K. sampai tingkat Perguruan Tinggi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abu Ahmadi, Drs., *Sejarah Pendidikan*, untuk PGAA/SPG/KPG/SP.IAIN dan sederajat, Penerbit Toha Putra, Semarang 1975.
2. A.R. Lanasir, *Catatan Perjuangan Gerakan Pemuda Merah Putih di Luwuk - Banggai* (tidak diterbitkan).
3. Brower M. Melatie, *60 tahun Bala Keselamatan di Sulawesi Tengah*, diterbitkan oleh Bala Keselamatan di Kantor Pusat Indonesia, Jln. Jawa 20 Bandung, Cetakan I tahun 1977.
4. Catalogus, *Der Boeken Enz. Verkrijgbaar Bij het Depot Van Leermiddelen te Weltevreden*, Afdeling I, leeren Leesboeken voor het Inlandsch Onderwijs.
5. Dahlia Suaeb, *Alchiraat dalam Perkembangan Islam di Kabupaten Donggala* skripsi untuk mencapai gelar sarjana dalam Ilmu Usuluddin pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1975.
6. *Hasil Rapat Diskusi Tentang Kemungkinan adanya Perguruan Tinggi yang berdiri sendiri di Sulawesi Tengah*, bertempat: Hotel Batu di Batu - Malang pada tanggal 14 - 15 Agustus 1977.
7. *Hasil Rapat Persiapan Pendirian Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah*, tanggal 11 - 12 Desember 1978 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen P & K 1978.
8. J. Kruyt, *Kabar Keselamatan di Poso*, Sejarah Gereja Kristen Sulawesi Tengah sampai 1947, di Indonesiakan oleh P.S. Naipospos dengan bantuan Dr. Th. v.d. End, Penerbit BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1977.
9. J. Visser, Drs. dan Ny. S. Kadrawu, Ba., *Sejarah Kebudayaan Suku-Suku di Sulawesi Tengah*, Lembaga Penelitian Studi GKST, Tentena 1978. (Terjemahan bebas garis-garis besar dari "*De West Toradja's op Midden Celebes*" oleh Dr. A. C. Kruyt).
10. J. Djumhur dan Darnasuparta, Drs., *Sejarah Pendidikan untuk PGA 6 tahun SPG; KPG dan sekolah-sekolah/kursus-kursus Guru yang sederajat*, Cetakan ke-7, Penerbit CV. Ilmu, Bandung, 1976.

11. Koentjaraningrat. Prof. Dr., *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Cetakan ke-2, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1975.
12. Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tengah, *Nomor Statistik Sekolah SLTP - SLTA Propinsi Sulawesi Tengah*, Palu, 1980.
13. Kanwil Departemen P dan K Propinsi Sulawesi Tengah, *Nomor Statistik Sekolah TK - SD Propinsi Sulawesi Tengah*, Palu 1979.
14. Kanwil Departemen Agama Propinsi Sulawesi Tengah, Data-data keadaan Madrasah, *Madrasah dan Inpres Rehabilitasi Madrasah Ibtidaiyah tahun 1977 - 1978* Bidang Pendidikan Agama Islam Palu, 1978.
15. Kementerian Penerangan R.I., *Republik Indonesia Propinsi Sulawesi*, Makasar, 1953.
16. *Program Pengembangan Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah*, Team Pengelola Perguruan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, 1978.
17. Pringgodigdo. A.K. Mr., *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Cetakan IV Pustaka Rakyat, Jakarta, 1960.
18. Soegardo Poerbakawotjo. Prof., *Pendidikan Dalam Alam Indonesia Merdeka*, Penerbit PT. Gunung Agung, Jakarta, 1970.
19. Sartono Kartodirdjo, et.al., *Sejarah nasional Indonesia jilid V, VI*, Balai Pustaka, Jakarta 1977.
20. Sofyan Aman. Drs., *Laporan Team Tentang Kemungkinan adanya Suatu Perguruan Tinggi yang berdiri di Sulawesi Tengah*, Surat tugas Dirjen Pendidikan Tinggi No. 349/DJ176. tgl. 1-10-1976. Perjanjian Pelaksanaan Penelitian an No. 088/PSSR/DPPM/12/76. tgl. 27-12-1976.
21. T. Kawandaud, *Tambo dan Sejarah Buol*, Drukkerij Anna-ser, Gorontalo, 1949.
22. Tim Kerja IKIP Ujung Pandang Cabang Palu, *Prospek Perguruan Tinggi di Sulawesi Tengah* (Suatu Feasibility Study), Palu, 1977.
23. Zainal Abidin Betalembah, *Risalah Kenang-kenangan Mu'*

tama Al Chairat ke I di Palu, Penerbit Yayasan Kesatria, Makasar.

24. Zainal Abidin Betalembah, Kiyai Haji, *Alchairaat dalam Lintasan Sejarah*, Pidato pada Mu'tamar Alchairat ke III di Palu Sulawesi Tengah, tanggal 1 Agustus 1970.
25. J. Visser, Drs., M. Papasi. Sth. M. Lapasila. BA, Sri Wahyuni Kadoawu. BA dan Nn. Rs. Gugu; *Sejarah Kebudayaan Suku Mori*, suatu terjemahan bebas dari buku: "*De Mories van Tinompo*" oleh J. Kruyt. Lembaga Penelitian Studi GKST, Tentena, 1978.

DAFTAR INFORMAN

1. Nama : Arnold Masulili.
Umur : 69 tahun.
Pendidikan : Kursus Pegawai Pemerintah Dalam Negeri 1954/1960 di Makasar.
Pekerjaan : Pensiunan Asisten Wedana.
Alamat : Pagimana, Kabupaten Luwuk Banggai.
2. Nama : A. Kaloke
Umur : 74 tahun.
Pendidikan : Kweekschool Zending, Kaluwatu, Sangir.
Pekerjaan : Pensiunan Guru SMP Luwuk.
Alamat : Kampung Dongkalan, Luwuk.
3. Nama : Daud Kutika.
Umur : 78 tahun.
Pendidikan : Kweekschool Zending, Kaluwatu, Sangir.
Pekerjaan : Pensiunan Kepala SD di Luwuk.
Alamat : Kampung Soho, Luwuk.
4. Nama : Djeng Djalumang.
Umur : 59 tahun.
Pendidikan : Normaal School Tentena, tamat tahun 1949.
Pekerjaan : Pensiunan Penilik Sekolah.
Alamat : Kampung Soho, Luwuk.
5. Nama : M. Lakunsing.
Umur : 65 tahun.
Pendidikan : SGB, tamat tahun 1956.
Pekerjaan : Pensiunan Kepala SD.
Alamat : Kampung Bungin, Luwuk.
6. Nama : Yusuf Monoarfa.
Umur : 69 tahun.
Pendidikan : Volks Onderwizer School, tamat tahun 1927.
Pekerjaan : Pensiunan Asisten Wedana.
Alamat : Kampung Jolek, Simpong, Luwuk.
7. Nama : Levinus Simaela.
Umur : 76 tahun.

- Pendidikan : CVO (Cursus Volks Onderwijzer) tamat tahun 1926
- Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sekolah Dasar.
- Alamat : Kampung Baru, Luwuk.
8. Nama : Umpang Aimang.
- Umur : 74 tahun.
- Pendidikan : V.O. (Volks Onderwijzer) tamat tahun 1923.
- Pekerjaan : Pensiunan Kepala Desa.
- Alamat : Kampung Soho, Luwuk.
9. Nama : A.G. Khama
- Umur : 54 tahun.
- Pendidikan : SGB, tamat tahun 1970.
- Pekerjaan : Kepala SD Banggai II.
- Alamat : Kampung Tonobonunungan, Banggai.
10. Nama : M.K. Muid, Haji.
- Umur : 66 tahun.
- Pendidikan : Volkschool kelas 3 tamat tahun 1932.
- Pekerjaan : Petani Kelapa.
- Alamat : Kampung Mendano, Kecamatan Kintom, Kabupaten Luwuk Banggai.
11. Nama : Sulaeman Amir Haji.
- Umur : 74 tahun.
- Pendidikan : Standaard School 4 tahun tamat tahun 1920.
- Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Pamongpraja dan sekarang anggota DPRD Kabupaten Banggai.
- Alamat : Jalan Pangeran Hidayat 75 Luwuk.
12. Nama : B. Lumentut.
- Umur : 75 tahun.
- Pendidikan : Volks Onderwijzer di Luwuk tamat pada tahun 1932.
- Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sekolah Dasar.
- Alamat : Kampung Lawanga, Poso.
13. Nama : Wongkolemba Talasa.

- Umur : 67 tahun.
Pendidikan : Sekolah Pamongpraja.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri.
Alamat : Jln. Merdeka No. 56 Poso.
14. Nama : Hendrik Tumimomor.
Umur : 51 tahun.
Pendidikan : SPG Negeri.
Pekerjaan : Kakandep Dep. P dan K Kecamatan Mori Atas Kabupaten Poso.
Alamat : Tomata, Kecamatan Mori Atas, Poso.
15. Nama : Ahmad Rafiq Tolamoa.
Umur : 45 tahun.
Pendidikan : Alchaerat Muslimin
Pekerjaan : Guru Sekolah Alchaerat Ampana.
Alamat : Mentanaga B. Ampana, Kabupaten Poso.
16. Nama : I. Latonce Tolamoa.
Umur : 67 tahun.
Pendidikan : Zending Standaard School kelas IV.
Pekerjaan : Petani Kelapa.
Alamat : Kampung Lombogia, Poso.
17. Nama : Rabe Entoh.
Umur : 66 tahun.
Pendidikan : Inlandsche Standaard School, kelas IV.
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai PU Daerah Poso.
Alamat : Kampung Kolaka, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Poso.
18. Nama : Abu Saleh Tanjumbulu.
Umur : 56 tahun.
Pendidikan : Vervolg School kelas 5.
Pekerjaan : Anggota Veteran, bertani.
Alamat : Mentanaga B. Ampana, Kabupaten Poso.
19. Nama : Mahmud Radjaili, Haji.
Umur : 45 tahun.
Pendidikan : S.R. 6 tahun.
Alamat : Desa Malomba, Kecamatan Dondo, Kabupaten Buol, Toli-Toli.

20. Nama : Salim Abd. Kasim Batalipu.
 Umur : 69 tahun.
 Pendidikan : Volks Onderwijzer di Buol tamat tahun 1927.
 Pekerjaan : Pensiunan Guru SD.
 Alamat : Jln. Jenderal A. Yani No. 9 Toli-Toli.
21. Nama : R.M. Poesadan.
 Umur : 71 tahun.
 Pendidikan : Sekolah Pamongpraja Zaman Belanda di Makasar.
 Pekerjaan : Pensiunan Residen.
 Alamat : Toli-Toli.
22. Nama : Mohammad Mahmud, Haji.
 Umur : 58 tahun.
 Pendidikan : SGA tahun 1956.
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Dinas P dan K Kabupaten Buol, Toli-Toli.
 Alamat : Jln. Jenderal Soedirman No. 8 Toli-Toli.
23. Nama : Morel Matakang.
 Umur : 56 tahun.
 Pendidikan : Kyoin Roseinso Zaman Jepang.
 Pekerjaan : Swasta, juga seorang wartawan.
 Alamat : Toli-Toli.
24. Nama : Mohammad Salim Haji Mallu, Haji.
 Umur : 69 tahun.
 Pendidikan : Sekolah Rakyat 4 tahun.
 Pekerjaan : Pengusaha Swasta.
 Alamat : Kampung Baru, Toli-Toli.
25. Nama : Abu Baeda, Haji.
 Umur : 67 tahun.
 Pendidikan : Vervolgschool sampai kelas IV.
 Pekerjaan : Petani Kelapa.
 Alamat : Kampung Luti, Toli-Toli.
26. Nama : Usman Lajndjong.
 Umur : 56 tahun.
 Pendidikan : SMA.

- Pekerjaan : Pegawai Kantor BKDH Buol, Toli-Toli.
 Alamat : Bumi Harapan No. 11 Toli-Toli.
27. Nama : Tulisi Pantubuo.
 Umur : 78 tahun.
 Pendidikan : Volks Onderwijzer tamat tahun 1932.
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Sekolah Dasar.
 Alamat : Kampung Donggala Kecil, Kecamatan Palu Barat.
28. Nama : Yansen Mamondol.
 Umur : 72 tahun.
 Pendidikan : Normaal School Palu, tamat tahun 1949.
 Pekerjaan : Pensiunan guru SMEP Negeri.
 Alamat : Kampung Maesa, Kecamatan Palu Timur.
29. Nama : Tahima.
 Umur : 85 tahun.
 Pendidikan : Standaard School kelas 4.
 Pekerjaan : Swasta.
 Alamat : Kampung Gunung Bale, Donggala.
30. Nama : Abd. Wahid Maluku.
 Umur : 62 tahun.
 Pendidikan : Volks Onderwijzer di Palu.
 Pekerjaan : Bekas Kepala SD Negeri Wani, Kecamatan Tawaeli, berhenti, tidak memperoleh hak pensiun.
 Alamat : Kampung Limboro, Kecamatan Banawa.
31. Nama : Mohammad Djaruddin Abdullah, Haji.
 Umur : 70 tahun.
 Pendidikan : Vervolgschool kelas 5.
 Pekerjaan : Pensiunan Kepala Jawatan Pajak, Kabupaten Donggala.
 Alamat : Palu.
32. Nama : Ngenta Jiloi.
 Umur : 74 tahun.
 Pendidikan : Sekolah Pamongpraja di Manado.
 Pekerjaan : Pensiunan Asisten Wedana Kulawi.
 Alamat : Kampung Lamo, Kulawi.

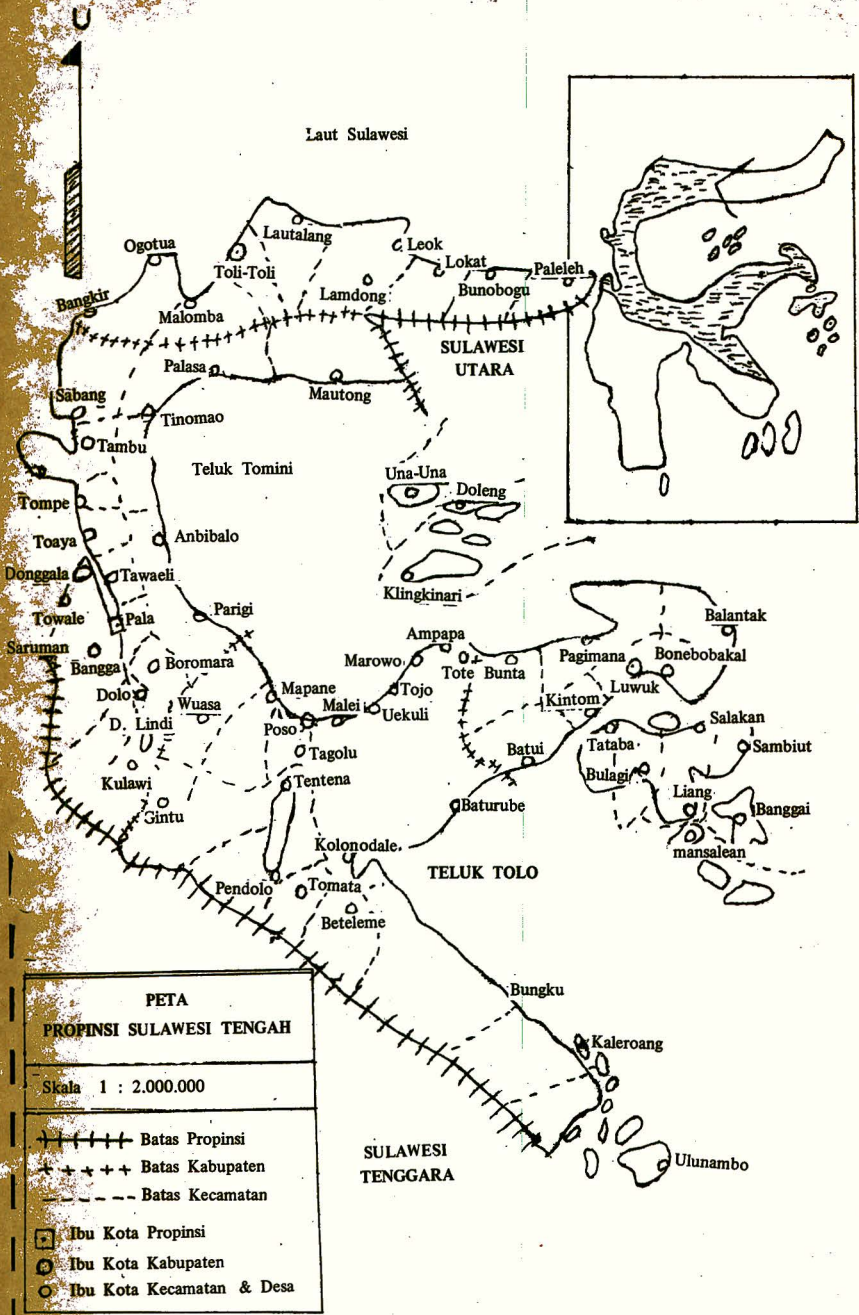
KETERANGAN MENGENAI FOTO-FOTO

1. Tim dari Jakarta didampingi oleh Kakanwil Departemen P dan K Sulawesi Tengah Drs. Soedarsono dan pimpro IDKD Drs. Bochari, pada waktu memberikan pengarahan kepada Tim Peneliti/Penulis daerah bertempat di Auditorium Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tengah.
2. Kelompok Tim Aspek Sejarah Daerah sedang menerima pengarahan dari Bp. Drs. M. Soenyoto K di ruang Auditorium Kanwil Dep. P dan K Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Bp. Tulis Pantobuo, Seorang pensiunan Kepala SD di Palu, sebagai informan tentang perkembangan pendidikan di kota Palu dan sekitarnya. Sampai sekarang masih menyimpan sejumlah buku pelajaran sebagai pegangan guru dan murid Sekolah Rakyat di zaman penjajahan Belanda dahulu.
4. Bp. Levinus Sima Ela, Seorang pensiunan Kepala SD asal Ambon di Luwuk, sebagai informan mengenai perkembangan pendidikan di Kabupaten Banggai.
5. Bp. Haji Sulaeman Amir, Seorang pensiunan pegawai Pamongpraja yang sekarang menjadi salah seorang anggota DPRD Dati II Banggai. Beliau salah seorang informan yang banyak memberikan informasi tentang perkembangan pendidikan di Kabupaten Banggai terutama di daerah Banggai Kepulauan.
6. Bp. Yusup Monoarfa, Seorang pensiunan bekas guru dan dewasa ini sebagai seorang anggota perintis kemerdekaan di Kabupaten Banggai. Beliau banyak memberikan tentang perkembangan pendidikan agama Islam di Kabupaten Banggai.
7. Bp. Arnold Masulili, pensiunan Camat Pagimana, banyak memberikan informasi mengenai perkembangan pendidikan di bekas wilayah pemerintahannya sejak dari zaman Belanda, Jepang, NICA hingga zaman kemerdekaan.
8. Yang memakai kopian Bp. Djeng Djalumang, pensiunan Penilik SD Kecamatan Luwuk Kota, sedang diwawancara oleh Sdr. Daeng Patiro Laintagoa di rumah kediaman beliau, di kampung Soho, Kecamatan Luwuk kota.

9. Sekolah Gubernur kelas dua yang pertama di kota Luwuk, yang kemudian dirobah menjadi Vervolgschool. Gedung ini menjadi tempat mencetak tenaga guru SR pertama di kota Luwuk yang kemudian disebar ke daerah-daerah di masa lampau pada waktu V.O. dibuka pertama kali. Setelah direhabilitir, sekarang menjadi gedung Sekolah Kepandaian Puteri Negeri (SKKPN) Luwuk.
10. Bekas perkampungan kota Mendono lama di Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai yang terletak di atas sebuah bukit dekat kampung Mendono sekarang. Di kampung Mendono lama inilah tempat rakyat menerima agama Islam yang pertama yang dibawa para muballig dari Bone (Sulawesi Selatan).
11. Bekas Mihrab Mimbar mesjid Mendono di perkampungan lama (sebelum kampung Mendono sekarang) yang dibuat dari kayu. Bekas Mihrab ini bertuliskan huruf Al Quran yang bertarikh (1235) Hijriah.
12. Tangga naik yang dibuat kemudian menuju ke atas bukit tempat perkampungan kota Mendono lama. Di tempat ini banyak terdapat bekas kuburan para penduduk dahulu.
13. 13a, 13b dan 13c Gambar Peta Alam yang dibawa oleh seorang muballig Islam bernama Mohammad Abdullah bin Alhasni yang juga dikenal dengan nama Mohammad Abdullah bin Jaelani di kampung Mendono dahulu.
14. Yang pakai kopiah haji adalah Haji A.K. Muid, Seorang informan yang menyimpan Peta Alam sebagaimana tersebut pada no. 13 di atas. Benda tersebut tersimpan baik di rumah beliau. Sayang sekali keterangan yang jelas mengenai benda itu beliau sendiri tidak mengetahuinya.
15. Gedung SPG Negeri Luwuk yang terletak di kompleks persekolahan Bumi Mutiara., Luwuk.
16. Dra. Ny. N. Nainggolan dan Dra. Ny. D. Borman R. sedang mewawancarai dua orang suku Tajie di kampung Oti, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala.
17. Dua orang suku terasing (Tajie) tersebut pada no. 16 di atas ketika sedang diwawancarai oleh Dra. Ny. N. Nainggolan dan Dra. Ny. D. Borman R di Oti, Kecamatan Sindue,

Kabupaten Donggala.

18. **Dra. Ny. N. Nainggolan dan Dra. Ny. D. Borman R.** sedang mewawancarai tokoh-tokoh masyarakat di kampung Oti, Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala mengenai cara menyiarkan Agama Islam pertama-tama di daerah itu oleh para muballig.



PETA	
PROFINSI SULAWESI TENGAH	
Skala 1 : 2.000.000	
+++++	Batas Propinsi
++++	Batas Kabupaten
-----	Batas Kecamatan
☐	Ibu Kota Propinsi
○	Ibu Kota Kabupaten
○	Ibu Kota Kecamatan & Desa

002439.3



3

Kebu

B5.3



PN BALAI PUSTAKA — JAKARTA